



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 26
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, PLT Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal perlindungan dan jaminan sosial, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI
- Sifat Rapat** : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 4 Oktober 2021
Waktu : 10.39-16.34 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara : 1. Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2021
2. Isu-isu aktual lainnya.
- Ketua Rapat** : 1. Wakil Ketua Komisi VIII/F-PG (Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.)
2. Wakil Ketua Komisi VIII/ F- PDIP (Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.)
- Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 39 anggota dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.(F-P. Golkar)
2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.
(F-PDI Perjuangan)
- ANGGOTA:**
FRAKSI PDI PERJUANGAN
3. I Komang Koheri, S.E.
4. Ina Ammania
5. M. Hasbi Asyidiki Jayabaya
6. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
7. H. Rachmat Hidayat, S.H.
8. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
9. Drs. Samsu Niang, M.Pd.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

10. Mohammad Saleh.
11. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., M.M.
12. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
13. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
14. Muhammad Ali Ridha.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

15. M. Husni, S.E., M.M.
16. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
17. Abdul Wachid.
18. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

19. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMtr.
20. Dra. Hj. Delmeria
21. Hj. Sri Wulan, S.E., M.M.
22. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
23. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

24. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
25. MF. Nurhuda Y.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

26. Drs. H. Achmad, M.Si.
27. Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

28. K.H. Bukhori, Lc., M.A.
29. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
30. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
31. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.
32. Dr. KH. Surahman Hidayat, M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

-

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

-

Anggota Izin

:

1. H. Hasani Bin Zuber, S.IP. (F- Demokrat)
2. H. Mhd Asli Chaidir, S.H. (F- PAN)

Undangan

:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial.
4. PLT Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
5. Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
6. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
7. Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
8. Beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Pagi.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.
Yang terhormat Pak Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Pak Inspektur Jenderal
Pak Badan Pendidikan penelitian dan penyuluhan Pak Dirjen pemberdayaan sosial.
Dan hari ini sekalian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati.

Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha kuasa yang atas kehendak-Nya kita dapat menghadiri acara Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini.

Sebagaimana kebiasaan di Komisi VIII, sebelum kita memulai acara marilah kita sama-sama membaca doa bagi yang beragama Islam kita membaca ummul kitab dan bagi yang beragama non muslim dipersilakan menyesuaikan. Al Fatihah.

BERDOA : MULAI BERDOA : SELESAI

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Fraksi-fraksi DPR RI tanggal 13 Juli dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 18 Agustus, maka pada hari ini Senin 4 Oktober Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda evaluasi program dan anggaran tahun 2021 serta isu-isu aktual.

Menurut laporan Sekretariat Komisi VIII yang telah hadir secara fisik sebanyak 13 Anggota dan secara virtual itu sebanyak 30 Anggota dari 9 Fraksi yang izin sebanyak 3 Anggota dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI, baik hadir secara fisik maupun virtual karena rapat yang diselenggarakan secara *hybrid* sesuai dengan tata cara rapat Komisi di masa pandemi di lingkungan Komisi DPR RI kemudian Sesuai dengan Pasal 254 ayat (5) Peraturan DPR RI tahun 2020 tentang Tata Tertib, dalam hal rapat dilakukan secara virtual kehadiran Anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 Anggota untuk setiap Fraksi.

Maka atas Persetujuan Sekjen, Dirjen, Irjen, Dayaos, dan Kepala Badiklit, Pensos serta Pimpinan Anggota Komisi VIII, maka rapat ini kami buka dan dinyatakan tertutup atau terbuka?

Terbuka ya, setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Agenda rapat pada hari ini adalah pengantar Ketua Rapat, penjelasan Sekjen, Irjen, Dayasos dan Kepala Badiklit, Pensos mengenai evaluasi program dan anggaran 2021 dan Isu-isu aktual, tanya jawab, kesimpulan, penutup. Sebetulnya kita bagi nanti siang Eselon I yang lain yaitu Penanganan Fakir Miskin kemudian Linjamsos dan Rehsos. Jadi sengaja supaya bisa efektif sebab kalau disatukan semua nanti waktunya terlalu lama.

Nah selanjutnya nanti kita akan akhiri pada pukul 12.30 ya? Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini atas nama Pimpinan Komisi VIII dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI mengucapkan selamat pada Doktor Insinyur Hari Hikmat M.Si. yang telah dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial yang baru menggantikan saudara Drs. Hartono Laras, M.Si.

Saya yakin kalau Pak Hartono ini tetap Sekjen, Pak Hari Hikmat penggantinya saja karena Pak Hartono ini jadi Sekjen dengan 5 Menteri ya Pak 6 Menteri. Coba bayangin 6 Menteri lho, Sekjennya beliau terus ya yang mendapatkan penugasan baru Pak Hartono sebagai Kepala Badan Pendidikan Penyuluhan dan Sosial kalau itu utama Pak.

Kami berharap tugas baru yang diamanahkan pada saudara Ari Hikmat dan saudara Hartono Laras dapat melahirkan energi baru sehingga meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen dan Eselon I Kementerian Sosial merupakan wujud dari pengejawantahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) bahwa DPR RI memiliki fungsi di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Atas dasar amanat konstitusi itu maka pada penjelasan Pasal 98 ayat(3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang telah beberapa kali

mengalami proses perubahan, maka tugas Komisi di bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Oleh sebab itu Komisi VIII dalam RDP ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di Kesekjenan, Irjen, Dirjen Dayasos dan Kabadiklit sampai pada triwulan ketiga tahun 2021.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja dengan Menteri Sosial tanggal 20 September 2021 yang lalu anggaran Kementerian Sosial setelah mengalami 4 tahap refocusing dan 2 kali penambahan anggaran melalui BA BUN sebesar Rp106.000.000.000.000,-. Merujuk pada besaran yang besar tersebut kami ingin mengetahui:

Pertama, tentu bagaimana dengan pelaksanaan program dan penyerapan di Sekjen khususnya di bidang pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dalam melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Ini Pak yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Jadi oleh karena itu kami ingin meng-*update* perkembangan dari pemutakhiran data yang selalu menjadi masalah sampai-sampai Bu Menteri harus marah-marah ya karena itu ini semua harus di-clearkan, jangan sampai menimbulkan masalah yang serius karena kita pandemi sudah 2 tahun dan rujukannya adalah data di dalam konteks program bantuan sosial dan tentu kita tidak ingin persoalan terus-menerus menjadi masalah. Bagaimanapun DTKS ini sangat vital dan krusial bagi suksesnya program penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Seperti yang saya sampaikan tadi misalnya ramai kemarin kemarahan Ibu Menteri Sosial di Gorontalo pun dipicu oleh persoalan data.

Yang kedua, bagaimana dengan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di Inspektorat Jenderal Pak Dadang, khususnya dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap program-program prioritas nasional untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan wewenang.

Yang ketiga, adalah bagaimana dengan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di Dirjen Pemberdayaan Sosial Pak Edi Suharto, khususnya program kewirausahaan sosial atau prokus yang menjadi program unggulan Dirjen Dayasos dan mendapat porsi anggaran yang cukup besar.

Dan yang keempat bagaimana dengan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial khususnya dalam penyiapan SDM Kesos, baik di Polteksos, Puslit Bangkessos Balai Besar Litbang Kesos maupun di Pusat Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

Ya walaupun Pak Hartono baru menjadi Kabadiklit tetapi saya kira sudah *khatam* soal pekerjaan di Badiklit Kesos Pensos ini.

Hadirin yang kami hormati.

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan, selanjutnya sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi kami pertama kali persilakan kepada Pak Sekjen, kemudian nanti Pak Irjen kemudian ke Pak Dirjen Dayasos dan nanti ke Kabadiklit Pensos untuk memberikan penjelasan. Dipersilakan Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. HARI HIKMAT, M.Si.):

Bismillahirrahmannirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat Pagi.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Ketua Komisi VIII dan para Wakil Ketua di Komisi VIII DPR RI.

Para Anggota Komisi VIII DPR RI dan seluruh rekan-rekan dari Kementerian Sosial yang hadir pada kesempatan hari ini.

Pertama sudah tentu kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya kita pada hari ini dapat hadir dan memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Yang selanjutnya izinkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah menjadwalkan RDP ini dengan agenda evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual.

Sebagaimana pokok bahasan dalam RDP pada hari ini dari Sekretariat Jenderal, kami akan menyampaikan evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu aktual pada, pada slide berikut seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pimpinan Sidang Pak Ketua, Pak Wakil Ketua yang menyampaikan bahwa ada perubahan pejabat di lingkungan Kementerian Sosial saya juga menyampaikan bahwa untuk jajaran Eselon II Kepala Biro Orpeg itu masih merangkap sebagai Plt. Kepala Biro Perencanaan Ibu Noviandari, kemudian selebihnya sama seperti yang sudah pernah hadir dalam acara sidang-sidang bersama Komisi VIII.

Selanjutnya kami ingin sampaikan untuk evaluasi program seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial pada saat Raker terdahulu bahwa realisasi anggaran Kementerian Sosial saat ini mencapai 64,76%. Kalau di antara Kementerian/Lembaga di Pusat, Kementerian sosial menempati urutan

12 jadi tidak terlalu buruk tetapi juga masih harus dipacu untuk ditingkatkan pada bulan-bulan terakhir ditahun 2021. Dan kami ingin sampaikan bahwa dari 64,76% dari anggaran Rp160.886.070.918.000 ,- untuk belanja modal memang masih sebesar 22.25% selebihnya masih relative pada angka yang wajar untuk bisa dicapai nanti secara maksimal pada bulan Desember.

Secara umum kami ingin sampaikan juga bahwa per unit kerja Eselon I untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial memang tertinggi 72.6% sementara yang terendah pada posisi di Sekretariat Jenderal yaitu baru mencapai 17.6% dari total anggaran Rp1.060.287.197.000,- kami nanti akan menyampaikan mengapa realisasi itu masih termasuk rendah.

Seperti yang disampaikan oleh Pimpinan juga bahwa Kementerian Sosial mengalami *refocussing* sebanyak 4 tahap dan setiap *refocussing* sudah tentu ada kebijakan strategis yang ditetapkan secara nasional antara lain dalam mengurangi dampak risiko dari pandemi Covid-19 ini terjadi pada tahap 1, tahap 2 dan ini di koordinasikan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan secara langsung dan Kementerian Sosial bisa memberikan kontribusi karena pada posisi tunjangan kinerja yang tidak jadi dibayar pada bulan ke-13 dan 14 selain pada *refocussing* dari unit kerja Eselon 1 lainnya dengan total Rp6.5 Miliar dari Sekjen untuk mendukung *refocussing* Kementerian Sosial sebesar kurang lebih Rp31.000.000.000,-

Begitu juga pada tahap ketiga anggaran Sekjen tinggal 1.2 dan *refocussing* ada Rp777.000.000.000,- yang pada intinya bisa diambil sumber dari belanja modal Poltek Kesos Rp159.000.000.000,- kemudian dari Pusdatin untuk keperluan verifikasi pada saat itu dikurangi Rp15.500.Miliar karena ada alternative atau ada opsi yang dipandang lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Selain daripada belanja modal dan belanja perjalanan dinas lainnya yang kebutuhannya pada waktu itu selain untuk mengurangi dampak dari resiko Covid tetapi juga ada tambahan untuk bantuan sosial tunai senilai Rp6.1Triliun dan Sekjen memberikan kontribusi sebanyak Rp777.8 Miliar.

Dan terakhir *refocussing* tahap 4 dengan ini Rp140.000.000.000,- dengan Sumber dari Poltekesos Rp140.000.000.000,- dan juga dari Badiklit Rp6.000.000.000,- lebih yang penggunaannya antara lain justru mengefektifkan proses verifikasi melalui program pejuang muda, selain pada tambahan untuk biaya salur untuk PT.POS terhadap penyaluran-penyaluran, yang seperti diketahui oleh Bapak Ibu Anggota Komisi VIII beberapa masalah terjadi di daerah sehingga pertimbangan-pertimbangan di daerah-daerah tertentu akan mengalihkan fungsi dari Himbara ke Pos, karena daya jangkau dari Himbara yang sulit untuk menyalurkan di daerah-daerah yang terpencil.

Bapak Ibu Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Realisasi anggaran Sekjen kalau dari jenis belanja itu belanja pegawai 71,26% pada angka yang wajar. Tetapi pada belanja barang dan belanja modal ini masih berkisar 15,21% dan belanja modal 11,38%. Sehingga secara keseluruhan baru mencapai 17.5%.

Nah tapi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan secara internal di lingkungan Sekretariat Jenderal, memang belanja barang ini masih rendah berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS yang masih dalam proses. Seperti yang Ibu Menteri sampaikan pada saat Raker terdahulu bahwa program pejuang muda itu akan dioptimalkan untuk melakukan verifikasi validasi DTKS.

Kemudian juga untuk mendukung optimalisasi belanja barang, belanja modal mohon maaf dan juga termasuk belanja barang maka penyediaan peralatan IT untuk mendukung fungsi dari Pusdatin termasuk penyediaan *command centre* yang sekarang sedang dalam proses, selain daripada berbagai aplikasi untuk verifikasi validasi itu terus dilakukan. Sehingga kami optimis bahwa pada bulan Oktober-November itu akan ada peningkatan realisasi anggaran yang cukup signifikan.

Sementara untuk belanja modal, kami sampaikan bahwa seperti sama-sama teman-teman Kementerian Sosial ketahui bagaimana *performance* gedung Kementerian Sosial di Salemba 28 itu sudah berubah sedemikian rupa dan sudah merefleksikan adanya satu nuansa *Eco Green* dan ini merupakan satu upaya keras agar suasana kerja di Kementerian Sosial bisa nyaman, teduh, dan memberikan semangat kepada semua pegawai Kementerian Sosial.

Kiranya pada kesempatan yang baik nanti ke depan Bapak Ketua dan juga Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi VIII, dapat berkunjung ke Kementerian Sosial yang penampakkannya sudah sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, ini berkat inisiatif dari Ibu Risma yang memang sama-sama kita ketahui beliau sangat konsen atas penataan lingkungan yang asri dan membuat para pekerja menjadi bekerja lebih nyaman.

Ini beberapa foto sempat ditampilkan sebetulnya kalau ke belakang lagi lebih lebih menarik dan kalau Bapak Ibu bisa naik ke ruangan itu sudah berubah penampakkannya dan bukan hanya berubah dari sisi *Eco Green*, tetapi juga seluruh sarana prasarana pegawai, dari mulai reguler sampai ke peralatan komputer itu sudah *by desain* untuk membuat ruangan itu lebih nyaman dan digitalisasi di ruangan itu lebih efektif, sehingga salah satu contoh teguran Ibu Menteri kenapa dalam satu ruangan sampai ada belasan printer, itu sebagai contoh padahal itu cukup 1 printer terkoneksi antar para pekerja yang membutuhkan pencatatan bahan atau kertas dan sebagainya. Itu contoh berarti ada perubahan yang cukup drastis dan itu membuat suasana di tempat kerja menjadi sedemikian berubah.

Bapak Ibu sekalian.

Kami sampaikan juga, bahwa belanja modal ini juga terkait dengan bagaimana beberapa kegiatan yang masih dalam *pre-sold* terutama oleh kantor jasa untuk penilaian *pre-sold* atas realisasi belanja modal yang perlu dibayarkan pada tahun ini. Sehingga gambaran keseluruhan dari Sekretariat Jenderal kalau dibagi minus Pusdatin nampaknya sebetulnya angka realisasi

masih relatif wajar untuk sampai bulan ke 8-9 ini, dengan catatan Oktober-November bisa dipacu untuk ditingkatkan adapun secara keseluruhan dengan adanya Pusdatin yang masih 3,72, inilah yang membuat realisasi di level Sekretariat Jenderal yang masih dipandang rendah yaitu kurang lebih 17%.

Nah beberapa kendala yang kami ingin sampaikan memang ada kebijakan blokir anggaran untuk gedung parkir dan gedung arsip. Bahkan pada akhirnya sebagai dampak kebijakan *refocussing* ini kegiatan pembangunan ini dihemat semua, artinya tidak jadi untuk dilaksanakan seperti tadi tuntutan *refocussing* yang disampaikan.

Kemudian juga pemberlakuan kebijakan PPKM, sehingga terjadi pembatasan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas ini terutama di *refocussing* tahap 3 dan juga kebijakan dari Luring menjadi Daring ini, sehingga pertemuan, seminar, Rakor pembinaan, dan Bimtek ini semua ditransformasi menjadi digital. Saya kira ini salah satu hikmahnya dari kondisi pandemi yang mengharuskan kita melaksanakan kebijakan PPKM. Dan juga kebijakan untuk memanfaatkan ruangan pertemuan aula atau ruangan serbaguna di balai atau PT milik Kementerian Sosial, sehingga banyak sekali anggaran yang bisa dihemat untuk kepentingan yang lebih luas terutama untuk pemanfaatan bagi penerima manfaat atau masyarakat yang membutuhkan.

Dari target atau indikator yang harus dicapai kalau dari sisi kesejahteraan sosial yang dimutakhirkan sebetulnya target 163.400.000,- saat ini sudah posisi 156.504.151,- orang yang berdasarkan SK DTKS Agustus 2021. Namun demikian kalau Bapak Ibu cermati daerah atau kabupaten yang melakukan pemutakhiran data itu, baru mencapai 54,18% jadi inilah salah satu *bottleneck* yang dialami oleh Kementerian Sosial. Ketika Kementerian Sosial melakukan turun kelapangan dan Ibu Menteri Sosial di berbagai kesempatan langsung mengecek tentang kualitas data yang dimiliki untuk kepentingan Bansos, sejumlah persoalan yang sebetulnya komitmen dari Pemerintah Daerah yang belum optimal di dalam melakukan verifikasi dan validasi data, termasuk pengusulan baru, penggantian, penambahan sedemikian rupa tanggung jawab dari pemerintah daerah belum dilaksanakan.

Padahal Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Pasal 8 sampai Pasal 10 itu sudah jelas mengatur bagaimana kewajiban untuk meng-*update* data secara terus-menerus, itu seharusnya ada di pemerintah daerah terutama pada level terendah dari kecamatan ke kabupaten sampai ke pusat. Nah ini upaya yang dilakukan selain pada sosialisasi terus-menerus turun ke lapangan atau melakukan kunjungan kerja, tetapi juga Pusdatin sudah menginisiasi sistem online untuk melakukan *updating* data secara dinamis seperti adanya nanti aplikasi cek Bansos.

Selain daripada itu Kementerian Sosial juga melakukan perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau data kependudukan. Ini sangat penting karena dalam penanganan penanggulangan kemiskinan tersedianya berbagai program perlindungan dan

jaminan sosial pemberdayaan maupun rehabilitasi sosial ketersediaan data *by name by address* yang berbasis NIK, bukan hanya BNBA berbasis nama dan alamat tetapi bergeser kepada sebuah pemikiran baru harus berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK, sehingga dengan kepastian atau kebenaran dan validasi data NIK ini akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai program Bansos, program jaminan sosial, dan program perlindungan sosial lainnya termasuk juga pemberdayaan sosial. Karena DTKS menjadi salah satu sumber satu-satunya untuk dijadikan rujukan untuk penanggulangan kemiskinan. Posisi inilah yang terus-menerus diperbaiki oleh Pusdatin dan kalau dari Agustus 2021 target 70% yang awal ditetapkan dalam kinerja Kementerian Sosial sekarang sudah mencapai 85,7%.

Nah bisa jadi, ketika turun ke lapangan ada PM yang sudah terima PKH tetapi belum penerima KIS atau belum penerima PBI atau anak-anaknya belum terima KIP ini salah satu sumber masalahnya, karena tidak terdeteksinya pemadanan data, tidak terdeteksinya NIK yang dimiliki dari kepala keluarga anggota keluarga terhadap program-program Bansos yang ada. Sehingga seringkali yang seharusnya mereka menerima secara lengkap tetapi faktanya ya mereka belum menerima kelengkapan Bansos, yang seharusnya mereka dapatkan itu seringkali terjadinya saya kira Bapak Ibu sangat memahami hal tersebut.

Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen seperti nilai reformasi birokrasi ini masih dalam proses, opini BPK juga. Kemudian kinerja anggaran Kementerian Sosial dan juga penerapan sistem *merit* walaupun sudah ada hasil verifikasi awal dengan nilai yang sangat baik, tetapi masih ada beberapa hal yang masih harus disiapkan terutama mengenai hasil asesmen atau uji kompetensi yang bisa memastikan ada *talent pool management system* untuk memastikan *manpower planning* dari Kementerian Sosial tanpa harus melalui seleksi terbuka dan sejenisnya. Jadi sudah diberikan kepercayaan oleh Menpan Kemensos bisa melakukan mutasi, rotasi, promosi dengan berdasarkan dengan berbasis kompetensi yang didasarkan pada *talent pool* yang sudah betul-betul bisa dipastikan memenuhi persyaratan atau indikator yang telah ditetapkan oleh Menpan.

Begitu juga masalah kearsipan ini masih kita menunggu dan mengenai pelayanan publik terkait dengan usul sanggah yang merupakan aplikasi cek Bansos. Ini sangat bermanfaat untuk pengecekan KPM Bansos, sanggahan terhadap anggota keluarga tanggapan kelayakan KPM yang mendapat Bantuan Sosial dan bahkan pendaftaran usulan baru.

Bapak Ibu sekalian.

Apabila berkenan bisa mengakses aplikasi di Google Play Store dengan *browsing* cek Bansos dan dengan memilih icon logo Kemensos itu, kalau sudah di *install* di masing-masing Handphone Android itu bisa login dan mengisi data pribadi di cek Bansos itu. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung kalau kembali ke dapil misalkan, diketahui ada Anggota keluarga atau rumah tangga yang mereka mengaku merasa layak untuk menerima tetapi tidak menerima bisa langsung dicek di aplikasi itu.

Jadi sebagai *user* yang bisa mengecek atas kebenaran data yang sudah tersalurkan atau belum tersalurkan langsung di masyarakat dan bahkan bisa menyampaikan tanggapan atas kelayakan dari Bansos itu, kalau misalkan ada bukti-bukti konkrit foto dokumentasi dari keluarga tersebut, ternyata tidak layak karena rumahnya itu termasuk rumah mewah seperti yang pernah ditemukan itu bisa dilaporkan di dalam cek Bansos ini. Sekarang luar biasa *follower*-nya sudah sampai 40.000.000 atas cek Bansos ini itu menunjukkan antusias dan komitmen dari masyarakat luas untuk sama-sama mengawal Bansos ini secara terbuka, transparan, dan akuntabel dan *follow up*-nya itu langsung ditindaklanjuti oleh Pusdatin bersama Direktorat teknis.

Jadi sebetulnya kalau mekanisme ini sudah berjalan secara efektif, apa yang terjadi di sejumlah daerah kehadiran Ibu Menteri sampai kondisi-kondisi yang tidak diharapkan atas data yang terkait dengan penerimaan Bansos ini bisa dieliminasi dengan sistem.

Bapak Ibu sekalian.

Secara keseluruhan sudah tentu Sekretariat Jenderal perlu memberikan dukungan terhadap fungsi Kementerian Sosial untuk memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu ke depan dari aspek manajemen ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, sarana prasarana, digitalisasi sistem, dan lain sebagainya. Perlu dipastikan bahwa berbagai bantuan yang disalurkan oleh Dirjen teknis itu bisa berlangsung efektif, bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya yang bisa dilihat juga dari kepuasan masyarakat bahkan juga apresiasi dari berbagai pihak. Termasuk juga Sekretariat Jenderal bisa dipastikan bisa menyampaikan kepada public atas keberhasilan yang dilakukan seperti misalkan dalam pelaksanaan *shelter* wokshop peduli.

Dan salah satu yang muara dari berbagai program yang ada antara lain lahirnya Sentra Kreasi Atensi yang sebetulnya inipun membutuhkan dukungan, bukan hanya Direktorat teknis yaitu dalam hal ini Dirjen Resos misalkan, tetapi bagaimana dengan dukungan regulasi sudah tentu ini ada *connecting* antara Sekretariat Jenderal dari aspek manajemen terhadap fungsi-fungsi dari organisasi ini, manajemen matriks yang harus di ciptakan sehingga Dirjen teknis fokus kepada pelaksanaan substansi program, tapi *supporting* sistem sedemikian rupa harus didukung oleh Sekretariat Jenderal.

Sebagai contoh bagaimana DSAK bisa diterapkan PNBK Rp0,- ini sudah tentu Biro Hukum di bawah manajemen di Sekjen memperjuangkan hal tersebut dan akhirnya kemarin rekomendasi dari Menteri Keuangan sudah dikeluarkan. Sehingga Permensos sudah bisa ditetapkan, sehingga di Sentra Kreasi atensi itu tidak lagi berlaku pemotongan pajak untuk hasil produksi dari penerima manfaat.

KETUA RAPAT :

Waktu presentasi Rehsos atau apa ini Pak?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. HARRY HIKMAT, M.Si.):

Ini menunjukkan bagaimana dukungan regulasi dari Biro hukum terhadap fungsi dari Resos nanti, fungsi resosnya nanti siang akan saya sampaikan ini sebagai contoh saja Pak.

Nah selanjutnya terkait dengan isu aktual. Kehadiran Sekretariat Jenderal terutama berkaitan dengan fungsi Pusdatin, terutama di dalam hal bagaimana DTKS yang sekarang disebut new DTKS baru yang diharapkan nanti program pejuang muda bisa terlibat aktif didalam melakukan berbagai kegiatan terutama verifikasi dan validasi. Dan harapannya tidak sampai disitu, tapi juga ada tugas-tugas tambahan lain yang mengarah kepada bagaimana pengembangan bantuan sosial sebagai *quality insurance*. Termasuk juga pemberdayaan fakir miskin dan juga dukungan akses fasilitas untuk kepentingan umum, maupun pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan.

Nah tugas pejuang muda khususnya untuk verifikasi-validasi DTKS baru itu pada terutama *updating* mengenai pekerjaan, pendidikan, geospasial terutama koordinat terutama dimana mereka berada dan bahkan *street view*. Ini yang sudah dalam proses finalisasi, sehingga apa yang akan dilakukan oleh pejuang muda ini artinya mahasiswa yang ditugaskan yang sekarang sudah posisinya ada 11.109 yang daftar luar biasa dibandingkan dengan program-program lain yang di-*launching* dalam kampus merdeka ini peminatnya tertinggi, bahkan melampaui jauh dari Program Kampus Merdeka ini peminatnya tertinggi dengan penawaran untuk terlibat dalam DTKS dan pemetaan kebutuhan program. Dari 11.109 itu akan terpilih 5.140 dan sebagai mentor terdaftar yang mendaftarkan diri 188 orang dan akan terpilih 60 orang. Ini akan dilaksanakan Oktober sampai Desember.

Inilah yang saya kira mohon dukungan dan mohon *support* dari Bapak Ibu Komisi VIII, bahwa pada akhirnya sistem untuk verifikasi validasi telah diputuskan sebuah opsi yang melibatkan perguruan tinggi, seperti kalau tidak salah pada saat Raker awal Ibu Menteri di Komisi VIII yang menyampaikan adanya keterlibatan perguruan tinggi untuk menjadi *quality assurance*. Dan tidak hanya itu sudah tentu indikator dan parameter kemiskinan pun saat ini sedang tahap finalisasi yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk menentukan seseorang termasuk miskin atau tidak.

Saya kira itu yang bisa disampaikan dari Sekretariat Jenderal tentang evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual. Selanjutnya mohon dukungan dari Komisi VIII agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik terima kasih.

Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sekjen, sebetulnya ada pertanyaan yang paling mendasar yang tidak dijelaskan secara gamblang. Tadi itu adalah soal mengapa serapan anggaran di Pusdatin itu baru 3.72%? Yang harusnya memang itu yang lebih di perdalam karena ini menyangkut dengan hal yang sangat elementer begitu ya, tapi itu nanti bisa ditanyakan oleh para Anggota.

Selanjutnya Pak Dirjen, Bapak Irjen, Pak Dadang silakan.

INSPEKTOR JENDRAL:

Terima kasih Pimpinan sidang.

Bismillahirrahmannirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Ketua Komisi VIII DPR RI.

Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Para Anggota Komisi VIII DPR RI.

Para hadirin yang berbahagia dan tentunya rekan-rekan Eselon I, Eselon II yang hadir pada kesempatan ini.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuhan yang Maha Esa pada hari ini kami dari Inspektorat Jenderal Kemensos dalam melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Langsung saja dari Inspektorat Jenderal menyampaikan terkait dengan realisasi anggaran dan kegiatan tahun 2021, dari Pagu Anggaran yang semula Rp38.408.503.000,- ini mengalami penurunan, karena adanya *refocussing* anggaran sebesar Rp6.150.000.000,- dan anggaran menjadi Rp32.258.503.000,-

Jadi dari anggaran tersebut terhadap realisasinya sampai sekarang *alhamdulillah* sudah mencapai 71,13% dan sisanya 28,81% dan ini terbagi menjadi di belanja pegawai dari target Rp17.179.299.000,- sudah terealisasi Rp12.468.348.091,- Jadi sudah terserap 72,58% masih tersisa Rp4.7 Miliar.

Untuk belanja barang dari target Rp14.134.000.000,- sekian realisasinya sudah mencapai Rp9.553.408.808,- mencapai 67.59% dan belanja modal sudah terserap 99,99% artinya memang ada pengurangan pada saat *refocussing* anggaran.

Realisasi per satuan kerja ini sudah tergambar dari tayangan kami Bapak Ibu sekalian. Di Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan Pagu Rp1.5Milliar realisasinya sudah

Rp1.2Miliar atau Rp81.97% di Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Pagu Rp988.464.000,- sudah terealisasi Rp565.324.000.300,- atau 57.19% begitu juga di Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari target Rp1.288Miliar sekian realisasinya sudah mencapai Rp1.009Miliar atau 78.71%.

Inspektorat Bidang Penunjang Rp991.026.000,- realisasinya sudah Rp715.829.700,- atau mencapai 72.23% di Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Pagu Rp27 (suara tidak jelas) dengan realisasi Rp19.438.023.351,- atau 70 74% dengan total seluruhnya dari 32 sekian Miliar sudah terealisasi Rp22.966.301.891,- atau 71.19% artinya masih ada anggaran Rp9.29Miliar.

Bapak Ibu Komisi VIII yang saya hormati.

Dampak *refocussing* anggaran tentunya sangat berdampak sekali terhadap capaian realisasi anggaran, kami sampai di triwulan ketiga tentunya ada beberapa penghapusan kegiatan, khususnya di audit kinerja yang memang akhirnya tidak dapat kami lakukan terkait di beberapa unit kerja Eselon I. Pembatasan jangkauan pengawasan juga ini menjadi salah satu juga akhirnya adanya pengurangan terhadap lokasi kegiatan, perluasan kegiatan, dan juga jumlah hari pelaksanaan kegiatan dan sasaran kegiatan itu sendiri.

Ada beberapa kegiatan yang sifatnya penunjang contohnya mungkin di kegiatan *workshop* anti korupsi yang biasa kami lakukan secara langsung mungkin dengan kondisi pandemi covid tentunya akan dilakukan secara virtual.

Ada penghapusan sistem belanja modal ini karena ada *refocussing* dan tentunya telah hadir terkait dengan cakupan pengawasan yaitu terbatasnya cakupan pengawasan.

Nah beberapa hal kegiatan yang sudah kami lakukan di triwulan ketiga itu mencakup adanya audit kantor pusat di 13 Satker, audit kewajaran harga. Ini sebagai bagian dari tindak lanjut rekomendasi BPK RI hasil pemeriksaan di tahun 2020 terkait dengan keuangan tahun 2020, ini sudah kami lakukan mungkin termasuk di dalamnya ini terkait kewajaran harga, masa program sembako, dan program-program lainnya, audit pelayanan di UPT ini juga sudah kami lakukan di 8 Satker, baik di satker Badiklit Pensos maupun di Satker Dirjen Rehabilitasi Sosial.

Berikutnya terkait dengan kegiatan yang sudah kami lakukan di tahun ketiga adalah review laporan keuangan di Semester kedua ini seluruh Satker, sudah kami lakukan review laporan keuangan semester 2 di tahun 2020 ini bagian dari laporan keuangan dan kami sudah melakukan review laporan keuangan disemester 1 tahun 2021.

Review rencana kebutuhan barang milik negara ini menjadi tugas yang kami harus lakukan RKBMN diseluruh Satker, *review* laporan kinerja Sakip

atau Lakip kami lakukan juga dan kami sudah melakukan *review* tentang cadangan beras Pemerintah atau CBP yang biasanya dimintakan oleh Bulog.

Kami juga melakukan *review* RKA K/L Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran diseluruh Satker. *Review* harga pengadaan barang dan jasa, salur kepada PT.POS ini tahun 2021 sudah kami lakukan evaluasi BMN juga evaluasi Sakip, kami lakukan evaluasi penanggung jawaban Tulkip FDS di program PKH ini juga bagian dari pemeriksaan BPK terkait dengan biaya kondisi salur Tulkip SDF ini.

Evaluasi dan *monitoring* penanganan bencana alam. Ini sudah kami lakukan juga evaluasi program sembako sudah kami lakukan. Termasuk kami melakukan pendampingan pemeriksaan BPK yang saat ini sedang dilakukan audit dengan tujuan tertentu di program Bansos, khususnya di Jaminan Sosial Keluarga dan di Dirjen PFM dan BPK pada saat sekarang sedang melakukan uji petik di 5 provinsi termasuk pemeriksaan terkait dengan masalah DTKS. Penelusuran Dumas bersama PH ini aparat penegak hukum kami juga arahan Bu Menteri kami melakukan penelusuran Dumas dengan pihak Bareskrim Polri dengan Jam Intel di Kejaksaan Agung. Ini sudah kami lakukan. Pemantauan TLHP progresnya sudah 80.17%.

Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan banyak TLHP-TLHP di tahun-tahun sebelumnya masih menjadi catatan untuk kami pantau tindak lanjutnya. Termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan di tahun 2020, pemeriksaan laporan keuangan dan juga pemeriksaan untuk PDTT di program Bansos dan ini progresnya sudah ada catatan untuk sudah diselesaikan. Artinya sudah hampir diatas 70% hasil tindak lanjutnya.

Kami juga melakukan penjaminan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pendampingan pelayanan reformasi birokrasi kemarin saja baru dilakukan evaluasi oleh tim Mempan RB terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita juga ingin melakukan pendampingan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani dan kita sudah mengusulkan di 17 satker, mudah-mudahan hasil evaluasi dari Mempan 17 Satker ini bisa lolos sebagai wilayah yang berpredikat zona integritas WBK atau WBPM.

(Suara tidak jelas) fisik dan *buffer stock* stok di dekat PSK BA di 24 provinsi ini sudah sesuai arahan Bu Menteri terkait dengan kondisi (suara tidak jelas) fisik barang-barang persediaan untuk penanggulangan bencana dan juga kita melihat kondisi aset yang memang berada di Dinas Sosial Provinsi adalah kabupaten secara hasil nanti bisa kami sampaikan ke Bapak-Ibu Komisi VIII DPR.

Bapak Ibu sekalian.

Rencana untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan ke-4 ada beberapa kegiatan yang memang harus tetap kami lakukan dengan sisa anggaran yang ada. Pertama di respon pengusulan Dumas ini menjadi isu yang menarik

karena banyak Dumas mulai melalui media online dan juga WA Group dan juga dari Bapak Ibu sekalian Komisi VIII yang harus kami telusuri ke lapangan. Contohnya mungkin kemarin didesa susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ini sudah kami telusuri juga.

Review RKA K/L pagu alokasi dan juga *review* laporan keuangan di November akan kami lakukan. *Review* RABMN pendampingan BPK evaluasi surat pertanggung jawaban evaluasi program di program Dayasos dan PFM. Audit program Direktorat jaminan sosial keluarga. *Workshop* anti korupsi di Kementerian Sosial. Uji petik penjamin mutu pelayanan publik ini bagian dari kegiatan reformasi birokrasi. Pendampingan sistem pengendalian internal Pemerintah ini menjadi bagian juga yang harus kami lakukan terhadap bagaimana setiap Satker Unit kerja Eselon I membuat semacam manajemen resiko terhadap pelaksanaan program kegiatannya dan pendampingan di kegiatan reformasi birokrasi.

Isu-isu aktual yang perlu kami sampaikan terkait masalah *refocussing* anggaran yang menyebabkan terbatasnya cakupan dan jangkauan pengawasan. Artinya ini menjadi isu untuk kami melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian, karena dari sisi target setiap unit kerja pasti akan mengalami pergeseran perubahan baik sisi kalau anggaran pasti tapi jangkauan pelaksanaan kegiatan *output outcome*- nya pasti juga mengalami perubahan juga.

Kedua terkait penyusunan perubahan program multi layanan, karena selama ini kami juga melihat dengan kebijakan Bu Menteri semua menjadi multi layanan setiap balai. Artinya kami pun juga bisa mengawal terkait dengan bagaimana regulasinya ini sudah dibuat atau belum (Juknis ,Juklak teknis segala macam) dari sisi alokasi anggaran juga, apakah karena ini juga mengalami pergeseran tentunya terkait dengan balai-balai ini. Selanjutnya capaian target *output outcome*-nya juga kami lihat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggung jawabannya artinya ini menjadi satu hal yang menjadi konsen kami di Inspektorat Jenderal.

Ketiga *opten fisik* dan *buffer stock* dan asset di PSK BA, mitigasi dampak bencana karena menghadapi kondisi alam yang saat ini sangat ekstrem dan Bu Menteri mengarahkan kami mencoba untuk melakukan (suara tidak jelas) fisik terhadap barang persediaan dan juga aset-aset yang ada di Dinas Sosial provinsi dan kabupaten.

Respons cepat pengaduan masyarakat ini juga menjadi arahan Bu Menteri bagaimana terkait di khususnya di Program BPNT, BST, dan di Program PKH ini yang masih banyak kasus yang muncul.

Kelima pengawalan program pejuang muda, kampus merdeka dan yang sudah disampaikan Pak Sekjen. Artinya dari sisi alokasi anggaran kegiatan pesertanya ini artinya perlu juga dirumuskan terkait dengan kebijakan regulasinya dan juga penataan mekanisme program pertanggung jawaban kegiatan yang harus juga kami kawal tentunya dari Inspektorat Jenderal.

Enam pengawalan reformasi Birokrasi Kemensos dan pengawalan program atensi anak yatim. Ini juga hal yang menarik karena dari sisi pelaksanaan ini sudah dilaksanakan. Tapi dari sisi regulasi dari sisi pelaksanaan program mekanisme dan anggaran tentunya sisi pelapor pertanggung jawaban dan capaian *output-outcome*-nya juga tentunya harus kami lihat dan kami nilai terhadap keberhasilan yang dicapai.

Next ini lokasi penelusuran Dumas bersama APH Bapak Ibu sekalian di beberapa Provinsi kami sudah lakukan. Memang yang banyak muncul disini adalah Provinsi Jawa Barat, kasus-kasus yang banyak dan kasus ini hanya 2 di program BPNT, BST, dan juga di program PKH.

Nah beberapa catatan hasil penelusuran kami pada program BPNT dan PKH ini ingin dapat kami laporkan ada berapa hal izin Pak Ketua kami bacakan atau ini? Ya terima kasih Pak Ketua sidang.

Pertama terkait dengan presisi penyaluran atas program bantuan pangan non tunai belum optimal, karena masih terdapat KPM yang tidak dapat melakukan transaksi. Artinya ada saldo 0 dan segala macam mungkin ini juga bisa pada saat Kunker Anggota Komisi atau Ketua Komisi VIII DPR menemukan seperti ini. Penentuan dan pemaketan komoditas sembako dilakukan sepihak oleh penyedia. Ini artinya pemaketan barang yang akhirnya berdampak pada kualitas dan juga nilai barang yang memang diberikan kepada KPM.

Harga komoditas sembako ditetapkan di atas harga pasar sehingga KPM mendapat sembako dengan jumlah atau kualitas yang tidak sesuai dengan nominal bantuan yang diterima. Artinya dari nilai Rp200,- mungkin hanya diterima bisa 160-170 karena sudah diambil oleh *supplier* dan juga oleh pihak E-Warong jadi dari sisi jumlah dan kualitas pun akhirnya tidak memadai.

Empat, transaksi jual beli oleh E-Warong hanya dilakukan saat penyaluran BPNT saja. Artinya E-Warong yang melakukan transaksi itu tidak murni semuanya sebagai warung-warung menjual sembako. Artinya pada saat transaksi mereka baru karena mereka ditiptkan mesin *EDC* oleh pihak Himbara akhirnya E-Warong ini berfungsi pada saat pejabat BPNT.

Kelima, E-Warong BPNT tidak terdaftar sebagai Himbara. Artinya banyak juga yang kita katakan mungkin agen-agen E-Warong liar ini yang memang mereka hanya mungkin dikerjasamakan dengan pihak-pihak Himbara atau tertentu.

Enam, mengadministrasikan transaksi atas penyaluran BPNT oleh E-Warong tidak tertib ini juga bukti-bukti *print* dari hasil penggesekan ini tidak bisa disampaikan tidak seluruhnya.

Ketujuh, pengumpulan KKS transaksi secara kolektif oleh pihak tertentu pada saat penyaluran BPNT. Oleh pihak tertentu baik mungkin oleh

TKSK Ketua RT dan segala macam ini kami temukan juga ya. Mungkin sama juga yang Bapak Ibu temukan di lapangan.

Sembako tidak langsung diterima oleh KPM saat melakukan transaksi di E-Warong. Artinya adanya penggesekan dulu dikumpulkan nanti baru diantarkan. Pengarahan KPM untuk melakukan transaksi BPNT ke E-Warong tertentu. Jadi ada pengalihan dari pihak-pihak tertentu kepada agen E-Warong tertentu yang mungkin dari sisi barang atau apa mungkin lebih baik atau apa.

Sepuluh, penyalahgunaan wewenang terkait penetapan penyedia komoditas harga oleh aparat pemerintah desa ini juga ditemukan KPM belum mendapatkan bantuan meski namanya terdaftar pada situs cekbansos.kemensos.go.id

Dua belas, terdapat perbedaan data antara data bayar PKH dan BPNT dengan informasi yang ditulis pada website <https://cekbansos.kemensos.go.id>.

Nah hasil penelusuran Dumas di program BST beberapa catatan yang kami dapatkan di lapangan adanya beberapa jumlah KPM antara surat penyaluran atau *standing instruction* dengan data PT. Pos. Realisasi penyaluran BST tidak memenuhi target. Penerima BST belum sepenuhnya tepat sasaran. Lokasi penyaluran bantuan sulit di akses KPM karena jarak yang jauh dari domisili. Adanya pungutan oleh oknum di daerah kepada KPM penerima BST. KPM tidak mendapat bantuan meski masuk dalam daftar penerima pada situs cek Bansos.kemensos.go.id. Pemetaan BST untuk kepentingan politik desa ini juga sudah memberikan saran rekomendasi Bapak Ibu sekalian terhadap hal-hal tersebut di lapangan.

Izin mungkin kami langsung ke opsi opten fisik di 24 provinsi ini bagi kami sangat penting ini kami laporkan pada dewan Komisi VIII DPR. Dari hasil opten fisik di 24 provinsi yang baru saja kami lakukan masih 10 Provinsi lagi. Kami sudah membuat catatan ada barang yang rusak berat itu sebesar 17% ada barang yang hilang, atau tanpa keterangan itu 1%, kondisi baik 27% dan rusak ringan 10%. Ini datanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Artinya untuk barang-barang yang hilang ini perlu kami telusuri, tentunya kami tindak lanjuti untuk melakukan penelusuran sebanyak 22 barang. Ini akan kami lakukan penelusuran melakukan pemeriksaan khusus terkait barang-barang yang hilang. Dan untuk barang yang rusak berat tentunya kami merekomendasikan kepada Pimpinan untuk segera dilakukan penghapusan dengan tentunya dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

Next, ini kalau dilihat dari barang yang rusak berat memang ada beberapa catatan terkait, khususnya untuk barang-barang yang perahu karet ini barang yang rusak berat, mesin tempel dan *handy talkie* ini barang-barang dari 10 aset yang kami coba petakan terkait pemanfaatan barang-barang yang ada di Provinsi ataupun di Kabupaten.

Bapak Ibu sekalian.

Kendala *opten fisik* atas *buffer stock* yang kami lakukan temukan adalah pencatatan barang persediaan yang belum memadai, sehingga jumlah dan kondisi barang tidak terpantau secara maksimal. Belum seluruh daerah menerbitkan berita acara serah terima ketika menyalurkan barang persediaan, sehingga terdapat selisih barang persediaan pada pencatatan yang seharusnya dicatat pada kartu barang. Penataan barang persediaan yang belum baik sehingga perhitungan barang dan pemantauan kondisi barang persediaan sulit dilakukan. Terdapat barang persediaan yang mendekati masa kadaluarsa belum disalurkan dan ini sudah dilakukan kepada Menteri Sosial dan *Insyallah* barang-barang yang mendekati *expired* di tanggal 31 Desember ini untuk disalurkan ke pihak-pihak tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Tenaga pengelola barang, persediaan yang masih membutuhkan peningkatan kapabilitas dalam hal logistik barang.

Berikut adalah kendala non fisik atas barang milik negara adalah aset BMN adalah digunakan untuk pribadi pemegang kendaraan. Aset BMN yang dipinjam pakaikan belum dilengkapi dengan berita acara peminjaman. Pencatatan aset yang tidak diperbarui secara berkala. Terdapat barang milik negara dengan kondisi rusak berat yang belum diusulkan untuk dilakukan penghapusan dan tidak dapat di manfaatkan.

Pengamanan aset BMN yang belum optimal, sehingga aset rentan rusak dan hilang. Pencatatan jenis barang yang tidak seragam di masing-masing daerah sehingga sulit untuk menentukan jumlah untuk masing-masing jenis barang. Biaya pemeliharaan kendaraan termasuk pembayaran pajak kendaraan hanya mengandalkan dana dekonsentrasi dan tidak didukung dari alokasi APBD.

Artinya banyak kendaraan-kendaraan kita yang pajak kendaraannya tidak dibayarkan sampai mungkin 5-6 tahun, karena mereka hanya teratasi Rp25.000.000,- dan ya akhirnya untuk pajak-pajak kendaraan di beberapa Provinsi dan Kabupaten ini tidak dibayarkan pajak kendaraannya termasuk di dalamnya ada kendaraan dapur umum kendaraan *truck* dan mobil rescue.

Aset BMN yang belum mendapatkan penetapan status penggunaannya. Nah ini juga sudah diberikan saran rekomendasi Bapak-Ibu sekalian hal-hal tersebut di atas dan tentunya mohon masukan lebih lanjut dari Anggota Komisi VIII DPR RI. Demikian terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Irjen. Selanjutnya Pak Dirjen Dayasos, silakan Pak Doktor Eddy Suharto.

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL (Dr. EDDY SUHARTO):

Bismillahirrahmannirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat Pagi.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih.

Yang kami hormati Ketua Komisi VIII DPR RI.
Para Wakil Ketua, juga Anggota Komisi.
Berikut Para Hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
Dan teman-teman dari Kementerian Sosial yang hadir pada saat ini.

Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan segera akan menyajikan dan berdiskusi terkait dengan tema yang diberikan kepada kita yaitu evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual.

Di Dayasos kami akan langsung saja ke *slide* yang pertama. *Next* berikutnya, ini tim kita ya jadi ada Pak Afrizon Tanjung Pak Ses yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit. Juga ada Pak Yahya untuk PSDBS. Nah beliau ini yang mengelola dana hibah, silakan nanti kalau ada kepentingan dengan Pak Yahya bisa berhubungan. Ibu Muharjani terkait dengan pahlawan keperintisan Pak Safii Nasution kini di KAT ya dulu di PSDBA, lalu ini ada Bu Mika ini juga terkait kewirausahaan sosial, karang taruna, dan lain-lain itu di Bu Mika.

Berikutnya selintas saja supaya fokus pemahaman kita mengenai pemberdayaan sosial. Jadi pemberdayaan sosial itu kalau disederhanakan ada 4 direktorat yang langsung menangani pelayanan sosial. Yang pertama adalah PSPKKM, lalu juga ada PSDBS ini terkait dengan penganggaran. Lalu ada Pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil). Termasuk juga ada Direktorat Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Nah kalau disederhanakan lagi kita punya 4 program. Jadi banyak yang kerjasama kita dengan Anggota Dewan. Yang pertama adalah kewirausahaan sosial. Lalu kita juga ada pemberdayaan pilar sosial di dalamnya ada pemberdayaan karang taruna, PSM, TKSK dan lain-lain. Kita juga ada pemberdayaan KAT yang sudah kita lakukan antara lain di Jambi terus juga di Suku Anak Dalam di Jambi terus juga di Suku Anak Dalam di Jambi, Suku Dayak di Kalimantan Selatan, Tengah dan lain-lain.

Kita juga punya restorasi sosial termasuk di dalamnya pemberian penghargaan pahlawan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan solidaritas sosial, di antara pilar-pilar sosial maupun penerima manfaat. Lanjut, ini selintas saja untuk mengenal program prioritas yang ada di Pemberdayaan

Sosial. Jadi ada terkait dengan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan target-targetnya sudah ada di dalam dokumen.

Kita lanjut saja ke target per satker. Ini target per satker jadi di PSPKKM misalnya kita punya target 7.230 TKSK. Pemberdayaan PSM termasuk kita punya tahun ini program kewirausahaan sosial ada 8.000 KPM. Pemberdayaan karang taruna dan lain-lain, ada di dalam data kita. Sementara untuk KAT ada bantuan stimulan pemukiman sosial ada 1.167 KK. Jaminan hidup dan seterusnya yang ada di 38 lokasi.

Sementara untuk K2KRS antara lain pada tahun ini terutama kita sudah berproses untuk mengusulkan calon-calon pahlawan nasional. Yang saat ini sudah diusulkan oleh Ibu Menteri, dari hasil Tim TP2GP di kita ke dewan gelar dan kehormatan ada 10 orang calon pahlawan. Mudah-mudahan nanti Bapak Presiden akan memberikan gelar pahlawan kepada berapa orang nanti biasanya diberikan pada tanggal 10 November. Selanjutnya ini kegiatan di PSDPS yaitu perizinan PUB dan juga pelayanan perizinan UGB.

Lanjut selintas saja ini kronologi perubahan anggaran di Dirjen Pemberdayaan Sosial yang hasil akhirnya kita saat ini punya anggaran Rp333.8 Milliar sekian yang ada di dalam data.

Next ini akan menjadi pusat perhatian kita terkait serapan ini juga kita masih mengalami beberapa kendala tetapi sudah teridentifikasi Insya Allah di bulan Oktober ini kita akan melejit mencapai sekitar 70%. Nanti kita kan jelaskan dari per Satker beberapa kendala dan respon serta strategi yang pernah kita lakukan untuk mempercepat serapan ini.

Jadi kita baru mencapai 46.61% yang bisa dilihat dari per jenis belanja untuk pegawai kita sudah tinggi. Ini yang barang yang kegiatan-kegiatan yang tadi karena ada beberapa pergantian dari hotel ke balai misalnya. Ini juga apa membuat anggaran kita masih tinggi begitu, termasuk kegiatan-kegiatan yang tadinya langsung menjadi lewat online misalnya dari *luring* ke *daring* ini juga sedang kita antisipasi bagaimana ini agar bisa di selesaikan.

Sementara untuk dekonsentrasi ini relatif bagus, karena di daerah juga biasanya di akhir-akhir ini karena mereka biasanya mengutamakan dulu APBD-nya. Tetapi sudah kita *push* supaya dalam waktu cepat dana dekonsentrasi bisa dipercepat untuk tahun depan kita tidak akan lagi dana dekonsentrasi sesuai dengan arahan Ibu Menteri.

Next ini realisasi anggaran Dekon per-provinsi yang tadi saya jelaskan dan ini terus kita pantau bahkan beberapa sudah direvisi sebenarnya yang bisa dialihkan. Tetapi ini yang tersisa yang sekarang realisasi sudah berjalan sekitar 53,53%. Berikutnya.

Bapak Ibu sekalian.

Ini yang barangkali menjadi fokus kita kenapa anggaran kita masih rendah. Jadi ini terutama yang masih terganjal di Direktorat PSPKKM kita

masih 30,82%. Tetapi di bulan ini akan segera melejit karena ada kegiatan Prokus terutama di nomor berapa disini ya Karang Taruna nomor berapa 6 ya? Oh ini juga masih berjalan ya masih terutama karena ada blokir yang juga sampai hari ini tengah diupayakan masih diblokir oleh Bappenas Rp2.000.000.000.000,- karena Bappenas kekeh begitu ya. Bahwa kegiatan prokus itu tidak boleh ada bantuan modal usahanya padahal sudah kita jelaskan bahwa target kita adalah usaha mikro yang kadang-kadang hanya Rp100.000 modalnya Rp200.000 tetapi kegiatannya harus pendampingan saja pelatihannya. Nah di Raker kita yang lalu Anggota Dewan juga terima kasih telah menyatakan bahwa bagaimanapun kewirausahaan sosial itu memerlukan bantuan baik itu modal usaha maupun bantuan-bantuan untuk katakanlah fasilitasnya untuk bibitnya untuk alat produksi dan seterusnya. Ini juga tengah kita lakukan terus.

Jadi di Direktorat PSPKKM ini realisasinya masih kecil tetapi pada Triwulan 4 ini kita sudah proyeksikan akan bisa mencapai 95,61%. Di antara lain ya tadi untuk yang prokus ini juga sudah di-*push* agar kegiatan-kegiatan pendampingan pelatihan segera bisa dilakukan dan dibayarkan sebenarnya mereka sudah dilakukan tinggal pembayaran dan pengadministrasiannya.

Berikutnya untuk KAT ini untuk pemberdayaan KAT kita sudah mencapai 65% bisa terlihat kegiatannya antara lain ada yang masuk pemberdayaan tahun 1 tahun 2 dan tahun 3. Ini beberapa LKS pendamping di wilayah timur ini masih banyak yang terkait kendala rekening. Ini juga sudah kita antisipasi yang paling penting mereka sudah berkegiatan sehingga transfer ke depan ini bisa segera di lakukan. Dan Direktur KAT sudah berkomitmen *Insy Allah* bulan Triwulan 4 ini bisa mencapai 100%.

Berikutnya ini untuk Ke-Pahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dari pagu anggaran Rp43,3 Miliar itu sudah terserap 41%. Ini juga sebenarnya bisa tercapai di Triwulan 4 ya karena banyak kegiatan itu di ujung seperti hari pahlawan HKSAN yang cukup besar juga ada di ujung. Selain itu masih ada sedikit kendala soal lelang tapi ini juga sudah bisa di antisipasikan jumlahnya juga tidak terlalu besar.

Terkait pembatasan wilayah di beberapa daerah ini ada ada beberapa kegiatan pengumpulan masa untuk Restorasi Sosial ini yang masih terkendala kalau di pidahkan ke online *daring* anggarannya ya menipis begitukan sehingga tetap saja ini dalam tanda *quote and quote* kecil serapannya.

Berikutnya ini untuk Direktorat PSDBS yang tertinggi ini sudah mencapai 78.26% ini relatif tidak mengalami hambatan dan *insyallah* di triwulan 4 bisa sebesar 99.34% ini kegiatannya juga memang relative bisa dikontrol seperti identifikasi dan analisa pelayanan perizinan pemberian izin ini terus bergerak.

Berikutnya ini di Ses Dirjen ini juga relatif sudah bagus ada sekitar 66% yang sudah terserap dan ini juga sudah berjalan ya. Terutama untuk gaji

tentunya ini menunggu sampai bulan akhir ya tapi kegiatan-kegiatan lain sudah bisa berjalan dengan baik.

Baik kita menuju ke isu-su aktual. Nah ini beberapa Isu aktual yang ada di daya yang pertama integrasi kegiatan kewirausahaan sosial lintas UKE 1 maupun untuk LKS. Jadi kita ada dua model di kewirausahaan sosial ini yang pertama adalah modern integratif dan yang kedua model adaptif. Yang integratif ini kita diharapkan bisa dalam tanda petik memberdayakan mantan-mantan klien dari Linjamsos misalnya graduasi PKH atau juga walaupun belum graduasi mereka sudah menerima bantuan sosial di tahun kedua, ketiga. Kalau kita bisa masuk di sini diberdayakan mereka bisa langsung keluar dari PKH misalnya ini juga kegiatan ini sangat strategis sebenarnya.

Yang berikutnya juga sesuai arahan Ibu Menteri kita juga melakukan integrasi dengan Rutilahu yang pernah disampaikan di rapat sebelumnya. Bahwa penerima manfaat Rutilahu nanti jangan hanya menerima uangnya saja, jangan sampai mereka uang rumahnya bagus rumahnya saja diperbaiki tapi kegiatan ekonomi tidak berjalan. Karena itu kita bergerak nanti kewirausahaan sosial itu bisa menempel di mereka sehingga mereka bisa rumahnya bagus lalu buka jendelanya dibuka untuk warung-warung misalnya ini model sederhananya. Atau mereka bisa melakukan kegiatan usaha ekonomi mikro. Berikutnya juga integrasi kita untuk sekarang sedang ramai di mana karang taruna ini juga bisa melakukan kegiatan kewirausahaan sosial.

Nah ini isu kita dan ini sudah banyak kerja sama kita dengan anggota dewan. Lalu kontribusi Direktorat KAT ini terkait dengan HAM karena kita ini dipantau oleh Kemenlu terutama untuk terkait dengan namanya perlindungan hak-hak *Indigenous People* ini juga kita lakukan. Termasuk sinergitas dengan KL lain terkait dengan Dukcapil. Jadi warga KAT ini selain terpencil secara geografis mereka juga banyak yang belum punya KTP sehingga belum dapat menerima bantuan sosial PKH dan lain-lain ini sudah kita gerakan dengan Ibu Menteri kita sudah ke Jambi ke Kalimantan Selatan sekaligus mereka pemotongan di lapangan sehingga mereka sekarang secara perlahan terpenuhi hak-hak sipilnya terutama terkait dengan identitas dirinya itu. Persiapan hari Pahlawan sudah berproses ini juga sudah terpilih Ketum juga telah ditentukan itu segera akan kita laksanakan adalah 10 November.

Yang terakhir isu kita adalah masih adanya penyelenggara UGB dan PUB dimasyarakat yang belum tidak berizin. Ya di kita kadang-kadang kumpulan dana berjalan seolah-olah itu inisiatif lokal seolah-olah ini pelan-pelan juga perlu dirapikan ya. Terus mendorong optimalisasi pemberdayaan UGB dan PUB ini agar diperkuat lagi agar masukan kita untuk dana hibah ini bisa lebih banyak lagi.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Pak Ketua dan Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf mohon dukungannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Ya terima kasih Pak Eddi Suharto. Selanjutnya Pak Hartono Laras sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Sosial, dipersilakan.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYULUHAN SOSIAL (HARTONO LARAS):

Terima kasih Pak Pimpinan.

*Bismillahirrahmannirahim
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Salam Sejahtera untuk kita semua.
Selamat Siang.

Pak Ketua Komisi VIII DPR RI yang kami hormati serta seluruh Wakil Ketua Komisi yang hadir pada RDP siang hari ini.
Bapak Ibu Anggota Komisi VIII DPR RI.
Dan yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen dan Pak Dirjen Pemberdayaan Sosial.
Dan rekan-rekan Eselon II yang hadir pada RDP pada siang hari ini.

Pertama kami menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami pada RDP ini. Sebagaimana RDP yang dilaksanakan kami akan menyampaikan 2 hal yang berkaitan evaluasi program dan anggaran BP3S Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial dan isu-isu aktual untuk mohon nanti perhatian dari bapak Ibu sekalian.

Yang pertama, bahwa tugas dan fungsi BP3S ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah pendidikan yang di dalamnya ada pelatihan. Kemudian yang kedua adalah fungsi atau program utama penelitian yang di dalamnya ada pengembangan, dan kemudian fungsi penyuluhan sosial dan fungsi-fungsi yang berkaitan untuk profesionalitas dari SDM baik aparatur maupun SDM dari kesejahteraan masyarakat.

Ada 13 satuan kerja yang mendukung tugas dari BP3S sebagaimana laporan yang telah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu yang berkaitan dengan tugas pada satuan kerja Pusdiklat Kesejahteraan Sosial ini di Jakarta, kemudian Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial itu juga ada di Pusat di Jakarta. Kemudian ada Pusat Penyuluhan Sosial itu, juga di Pusat Jakarta dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial itu ada di pusat di Jakarta dan fungsi layanan dukungan manajemen di BP3S yaitu di Sekretariat BP3S. Kemudian ada kantor-kantor kami yang ada di daerah yaitu ada 6 Balai Besar Diklat Regional dan kemudian ada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Layanan Kesejahteraan Sosial dan satu Politeknik Kesejahteraan Sosial.

Bapak Ibu sekalian

Mohon izin untuk melaporkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kepala BPS BP3S yang lama Pak Prof. Sahabudin berkaitan dengan alokasi dan realisasi anggaran untuk tahun 2021. Sebagaimana tadi Pak Sekjen sampaikan Pak Dirjen dan Pak Irjen bahwa ada 4 *refocussing* yang dilaksanakan di tahun 2021. Tadi juga Pak Pimpinan sidang menyampaikan bahwa pada intinya dinamika anggaran di tahun 2021 itu sangat cepat sekali ada perubahan-perubahan. Secara singkat bahwa BP3S dari alokasi Pagu awal Rp344.515.950.000,- kemudian setelah melalui satu *refocussing* anggaran itu terakhir alokasi anggaran itu menjadi Rp231.015.950.000,-

Kemudian dari laporan realisasi keuangan berdasarkan pada online *monitoring* sistem penyerapan anggaran negara Omspan dari alokasi anggaran Rp237.015.950.000,- realisasinya 62,69%. Nanti akan kami laporkan dari konfigurasi realisasi dari masing-masing Satker.

Nah kemudian berdasarkan pada jenis belanja. Jadi berdasarkan pada perhitungan juga per jenis kewenangan. Jadi alokasi anggaran untuk BP3S yang sebesar Rp237.015.950.000,- tadi untuk di kantor pusat itu 60,91%. Kemudian di daerah itu yang ada di UPT-UPT dari BP3S itu 64,16%. Sementara kami juga mengalokasikan di tahun 2021 ini untuk pusat penyuluhan melalui dana dekonsentrasi sebesar Rp7.000.000.000,- itu realisasinya 55,44% yang Insya Allah nanti sesuai dengan rencana dan kebijakan dari Bu Menteri Sosial ini akan kita tarik ke alokasi yang ada di tingkat pusat sehingga kita bisa untuk melakukan penguatan dan modifikasi dari berbagai program yang ada.

Kemudian berikutnya Bapak Pimpinan, realisasi dari BP3S per 1 Oktober sebagaimana kami laporkan tadi ada Pusdiklat Kessos itu masih 45,72%. Ini ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses untuk pembayaran. Kemudian yang BP3S regional Papua asli Papua 57,52%. Sekretariat Badan 59,87%. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 62,66%. Pusat Penyuluhan Sosial 63,2% kemudian Balai Diklat Regional Jogjakarta 64,30%. Kemudian Balai Diklat Regional 4 Banjarmasin 64,32%. Kemudian Balai Diklat Regional 1 Padang 64,96%. Kemudian Puslitbang Kesejahteraan Sosial 65,70%. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 71,25%. Balai Diklat Regional 5 Makassar 74,15%, dan kemudian Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluhan Sosial 77,38%. Jadi total realisasi 62,69%. Kita sudah meminta kepada jajaran satker untuk melakukan langkah-langkah percepatan berkaitan dengan pelaksanaan program dan penyerapan dari anggaran.

Bapak Ibu sekalian.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal capaian dari masing-masing fungsi sebagaimana kami laporkan. Tadi fungsi yang pertama yang tadi berkaitan dengan diklat. Pada fungsi pendidikan jadi ada Diklat yang berkaitan dengan kemampuan manajerial Pimpinan. Kemudian

Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional kemudian ada Pelatihan Dasar Latsar untuk CPNS kemudian juga ada Diklat yang sifatnya teknis seperti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, *public speaking* Pustakawan, Diklat penyegaran untuk pejabat penandatanganan surat perintah membayar PPSPM, Diklat PIPK dan juga ada beberapa yang berkaitan dengan TOT.

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dari target 833 orang realisasinya 884. Jadi ada peningkatan atau melampaui dari target yang ditargetkan. Seperti juga untuk yang berkaitan dengan Diklat masyarakat jadi ada 2 diklat, diklat unsur aparatur dan diklat untuk masyarakat juga ada peningkatan, dari target yang telah ditetapkan hari ini didasarkan pada kita melaksanakan semua Diklat ini secara Daring atau Online.

Kemudian yang berkaitan dengan capaian kinerja untuk peningkatan kualitas pendamping PKH, jadi Diklat untuk pendamping PKH di laksanakan di Balai Besar Diklat untuk yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan *stunting*. Jadi ada 6 Balai Diklat Besar itu melaksanakan Diklat untuk pendamping PKH, masing-masing dari laporan yang kami terima dari 14.622 orang itu realisasinya per-hari ini 12.999 orang dan ada beberapa yang sudah tercapai target, sudah selesai dan apa ada beberapa yang masih berjalan. Dan wilayah cakupan dari Diklat tersebut itu meliputi dari wilayah kerja regional dari Balai Besar Diklat. Dari keseluruhan capaian realisasi untuk Kediklatan ini hingga 1 Oktober tahun 2021 sebesar 88.90%.

Kemudian yang berkaitan dengan capaian kinerja dari penelitian kebijakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, dari tahapan penelitian yang telah ditetapkan yang saat ini kita sudah masuk pada tahapan dari seminar hasil penelitian untuk beberapa tema atau judul penelitian yang sudah ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan Unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial. Sebagaimana ada dalam bahan ini, mulai dari pelayanan sosial bagi kelompok marginal, studi pada gelandangan dan pengemis misalkan capaian kinerjanya 95%. Seluruh penelitian sudah dalam tahap susunan *policy brief* dan *executive summary* dan tinggal melakukan untuk seminar hasil penelitian.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan progres pelaksanaan kegiatan untuk kebijakan bidang sosial, ini juga ada beberapa bidang penelitian yang terkait dengan tugas-tugas pusat penelitian dan pengembangan, dari kegiatan yang berkaitan dengan bidang penanganan fakir miskin dan perlindungan dan jaminan sosial dan penunjang dan bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan dengan beberapa judul penelitian, dan tahapan pelaksanaan yang saat ini sedang dan kita akan selesaikan sesuai dengan sisa waktu dari anggaran tahun 2021.

Kemudian yang berkaitan dengan penelitian yang ada di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, jadi di Jogjakarta itu ada 2 Balai Besar, Balai Besar yang satu adalah Balai Besar Diklat. Yang kedua adalah Balai Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang lebih kepada orientasi penelitian yang bersifat

terapan aplikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Misalnya judul atau tema penelitian yang ada di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dampak sosial program sembako bagi keluarga miskin dan masa pandemi Covid-19, yang saat ini juga sedang keputusannya laporan. Dan kami mohon izin nanti dapat melaksanakan ini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat kami para peneliti menyampaikan hasil dari penelitian sesuai dari tema atau judul penelitian.

Kemudian yang berkaitan dengan pengembangan SDM kesejahteraan sosial jadi dalam rangka peningkatan profesionalitas dari SDM dan kesejahteraan sosial. Jadi pusat pengembangan profesi penyuluh sosial juga melakukan kaitannya sertifikasi kepada para pekerja sosial, para penyuluh sosial pada SDM Kesejahteraan sosial. Dan akreditasi dilaksanakan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan tentu akreditasi untuk peningkatan kompetensi standar dari LKS itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Kita melaksanakan dengan melakukan langkah-langkah untuk upaya melalui akreditasi kepada lembaga dan spesifikasi kepada orangnya, itu meliputi pekerja sosial, penyuluh sosial, relawan dan lain sebagainya.

Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami akan masuk pada pusat penyuluhan sosial. Sebelumnya ada beberapa dokumentasi kegiatan visitasi lapangan dalam rangka akreditasi lembaga kesehatan sosial yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

Untuk yang berkaitan dengan pusat penyuluhan sosial ini ada 3 agenda kegiatan yang dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan manajemen penyuluhan, kemudian pengembangan materi atau media penyuluhan, sarana dari penyuluhan dan kemudian pelaksanaan ataupun implementasi dari penyuluhan yang dilaksanakan. Yang pada dasarnya ini merupakan satu sistem yang dilaksanakan sebagai gerak dasar pembangunan kesejahteraan sosial. Ini kalau di dalam sistem penyelenggaraan sosial penyuluhan sosial itu adalah sebagai gerak dasar dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kemudian kami akan masuk ke capaian sasaran dari penyuluh sosial. Jadi jumlah SDM penyuluh sosial masyarakat sebagaimana dilaporkan dalam rapat sebelumnya. Di tahun 2020 kita membentuk 1265 orang. Kemudian tahun 2021 ini kita tambahkan 200 orang. Jadi itu sebagai penyuluh masyarakat unsur masyarakat pemerintah membentuk dan kemudian memberikan satu advokasi peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Jadi total penyuluh sosial nanti diharapkan sampai dengan tahun 2021 itu sejumlah 1.465.

Kemudian jumlah daerah yang telah memiliki penyuluh sosial di tahun 2020 ada 34 Provinsi tapi sangat tersebar, yang kecil sekali di Kabupaten/Kota 46 Kabupaten Kota dan 1187 desa. Di tahun 2021 kita akan tambahkan yang 200 orang penyuluh dari masyarakat dengan 51 kabupaten/kota. Jadi total semuanya nanti diharapkan kita semakin

meningkat ya. Kalau semua provinsinya semua sudah ada tinggal menambahkan yang kabupaten/kota. Kemudian beberapa dokumentasi yang disiapkan yang berkaitan penyuluh sosial dan program yang dilaksanakan ini hanya apa gambaran singkat dan tentu tidak bisa kami laporkan semuanya.

Terus, yang terakhir kami akan menyampaikan segera rekapitulasi sandingan target realisasi. Tadi secara sekilas sudah kami laporkan, karena ini rapat evaluasi sehingga penting untuk kami melaporkan beberapa capaian dari target-target awal dan kemudian realisasi dan kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan dari kinerja yang telah dilakukan.

Misalkan pelatihan penanganan dan pencegah *stunting* bagi SDM PKH dari 8000 orang kita sudah menambahkan justru. Targetnya melampaui menjadi realisasinya 13.002 orang. Dan kita merencanakan untuk di tahun 2022 nanti juga kami akan upaya kalau ada anggarannya, kami akan tingkatkan untuk jumlah kaitannya dengan target untuk kaitannya dengan pelatihan. Dan begitu juga seterusnya ya untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan ada dalam laporan kami.

Bapak Ibu sekalian kami akan masuk yang terakhir isu-isu aktual. Yang pertama sebagaimana arahan dari Bu Menteri Sosial, bahwa PP yang ada di BP3S ini juga kita akan perkuat kita perluaskan fungsi dalam melaksanakan fungsi layanan untuk sosial di Kementerian Sosial. Jadi balai-balai besar ini kita dorong juga kaitannya dengan langkah-langkah untuk melakukan percepatan asisten layanan dukungan psikososial dan penanganan-penanganan yang berkaitan dengan masalah kedaruratan.

Kemudian penguatan sumber daya manusia Diklat. Jadi orangnya kita tingkatkan yang ada di wilayah 1 sampai 6, kemudian rencana pengalihan mohon izin untuk pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial ini Puslitbangkesos. Jadi Satker yang ada BP3S yang ada di tingkat pusat. Kemudian juga ada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jogjakarta ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kemudian peran penyuluh sosial masyarakat dan perluasan jangkauan sosial masyarakat, guna memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi program kesejahteraan sosial dan mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Dan kami juga sedang mengodok langkah-langkah penguatan multi layanan tersebut dalam suatu program yang tentu akan dilaksanakan upaya percepatan penanganan kemiskinan dan juga penanganan permasalahan sosial. Istilahnya cukup bagus ini Program Segoro. Segoro ini sentra edukasi gotong royong. Jadi ini adalah sebagai bentuk kolaborasi tugas BP3S sebagaimana kami sampaikan untuk mendukung tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya penanganan masalah sosial dan juga pengentasan kemiskinan melalui edukasi sesuai dengan tupoksi daripada BP3S.

Kemudian yang lain-lain saya kira ini contoh yang telah dilakukan berkaitan dengan dukungan BP3S dalam merespons berbagai kedaruratan.

Dan yang terahir kami ingin menyampaikan skenario dari pengalihan peneliti Kemensos ke BRIN. Ini sudah ada Surat Edaran Kemenpan RB bahwa tanggal 22 Juli nanti ada pengalihan pada kegiatan-kegiatan Litbang dari Kementerian/Lembaga ke BRIN yang diberi waktu sampai 22 Desember. Dan kami telah menindak lanjuti dengan Biro Organisasi Kepegawaian, Sekretariat Jenderal terkait pemetaan jabatan fungsional peneliti di lingkungan Kemensos yang bergabung dalam BRIN yang sudah dilakukan bagi SDM Puslitbang Kesos dan B2PPPKS. Seperti misalkan jumlah pegawai Puslitbang sekarang itu 56 orang, 37 orang laki-laki, 19 orang perempuan. Dan ada peneliti yang tentu kita akan siapkan untuk yang beralih pindah ke BRIN dan ini terus kita lakukan koordinasi dengan BRIN dan juga dengan Kemenpan RB bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan Program Segoro nanti kita akan bahas lebih lanjut ya program-program yang intinya sebagaimana laporan yang kami sampaikan tadi.

Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan kami mohon dukungan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang berkaitan upaya kita untuk memperkuat program-program di BP3S. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Kabadiklit. Waktu kita sudah 12.23. Saya mengusulkan kita skors dulu untuk sholat dan makan dan setelah itu kita dengarkan Eselon I yang lain yang masih ada empat. belum masih ada 4 nanti akan kita batasi paling lama 10 menit ini tadi setiap Eselon I ini agak terlalu lama jadi waktu kita jadi molor begitu ya. Apakah bisa di setujui ya? Ya oke.

(RAPAT : SETUJU)

Kita skors ya kita kembali nanti Pukul 13.00, cukup, tidak cukup, tidak Pak Kyai sholatnya, cukup tidak makan sama sholat cukup.

F – P NASDEM (Hj. SRI WULAN S.E) :

13.15 Ketua.

KETUA RAPAT :

Ya 13.15 kalau Bu Wulan sudah kasih Fatwa saya tidak bisa tolak, oke saya kira demikian ya nanti kembali 13.15 terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

(RAPAT DISKORS DARI PUKUL 12.25-13.15 WIB.)

KETUA RAPAT:

Kita akan lanjutkan, sebagaimana kesepakatan rapat kita tadi di awal bahwa kita akan langsung persilahkan kepada 3 eselon lainnya yaitu pertama Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Pak Asep Sasa Purnama. Kemudian setelah itu Pak Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Pak Pepen Nazaruddin dan nanti di akhiri oleh PLT ya Pak Sekjen apa namanya PLT Dirjen Rehsos.

Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan nanti penanganan fakir miskin, bahwa ada beberapa program yang memang menjadi perhatian kita semua, yaitu soal sejauh mana bantuan pangan non tunai betul-betul didistribusikan dan dari hasil pengawasan yang kita lakukan dari berbagai program baik BPNT maupun BST masih ditemukan gagal salur yang cukup besar. Dan saya kira ini perlu diungkap akar persoalannya, mengapa gagal selalu itu terjadi dan bagaimana keterlibatannya dengan PT. POS yang ditugaskan untuk melakukan distribusi bantuan sosial tersebut.

Yang kedua, untuk program Linjamsos adalah program unggulannya adalah program keluarga harapan, untuk kita harapkan ada penjelasan yang lebih *up to date* ya terkait dengan program PKH ini dan sejauh mana penyerapan anggaran program PKH di lapangan. Dan yang terakhir adalah dari program Reksos ya karena kita tahu bahwa Rehsos memiliki program Atensi namanya Asistensi Rehabilitasi Sosial yang merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pemulihan pengebangan fungsi sosial, terutama program baru yaitu yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19.

Nah untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak Dirjen PFM dulu untuk menyampaikan penjelasannya dan mohon waktunya untuk dipersingkat Pak paling lama 10 menit silakan Pak.

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN:

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yang terhormat Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
Yang terhormat Para Anggota Komisi VIII DPR RI.
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali pertemuan ini kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'laa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan agenda evaluasi program dan anggaran tahun 2001 dan Isu-isu aktual.

Pimpinan Sidang.
Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat.
Serta hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana pokok bahasan dari Rapat Dengar Pendapat ini, kami akan menyampaikan materi sesuai dengan agenda tersebut di atas. Saya kira langsung saja ke realisasi anggaran. *Next*, Bapak Ibu sekalian per tanggal 3 Oktober 2021, kami menyampaikan informasi tentang realisasi belanja. Secara umum realisasi anggaran Dirjen Penanganan Fakir Miskin hingga saat ini berjumlah 62,61%. Jadi rata-rata keseluruhannya terdiri dari untuk Sekretariat prestasi atau kinerja realisasi yang bisa dicapai sebesar 60,4%, kemudian Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah I 63.7%, kemudian Direktorat PFM wilayah 2 62.9%, selanjutnya Direktorat PFM Wilayah III 60.6%, kemudian untuk Dekonsentrasi kami baru mencapai 54,8%. Sehingga keseluruhan rata-rata prestasi kinerja realisasi yang kami bisa gapai adalah 62,6%.

Tentu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih, prestasi ini tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat, ini mungkin akan sulit ya dan Insya Allah kami sangat yakin realisasi nanti di tahun anggaran ini akan lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 per Oktober ini, kami mendapatkan anggaran sejumlah Rp73,8 Triliun, kemudian realisasi yang sudah kami laksanakan sebesar Rp46,2 Triliun. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 38% yang kami harus selesaikan dalam waktu 3 bulan ini. Insya Allah kami sudah melakukan skenarionya mudah-mudahan nanti pada saatnya nanti di akhir tahun bisa tercapai secara maksimal.

Bapak Ibu sekalian, *next* untuk program sembako di tahun 2021 ini untuk Januari prestasi kami di 84,7. Kemudian untuk prestasi atau kinerja Februari 2021 84.6. Selanjutnya untuk Maret prestasi realisasi sembako 82.6% jadi kisarannya masih 80%, tentu kenapa demikian? Karena data KPM program sembako ini di tahun 2021 mengalami transformasi atau satu

perubahan yang sangat mendasar dengan dilakukannya pemadanan NIK yang Padan dengan Dukcapil ini implikasinya cukup besar Bapak Ibu sekalian terhadap proses salurnya begitu.

Dalam perkembangannya Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai bulan Juli, bulan Juli realisasi dari 18.800.000,- KPM ini kami sudah bisa mencapai angka 16.9 kami sangat yakin target 16.9 masih kurang. Ya sehingga total pada Bulan Juli 2021 itu target KPM dari 18.8 ini tercapai 17.000.000.- KPM dengan prestasi realisasi sekitar 90.8%. Kemudian untuk bulan Agustus masih sama Juli Agustus begitu juga September.

Bapak Ibu sekalian.

Berkenaan dengan data ini, kami tengah melakukan konsolidasi dengan Himbara terutama karena masih ada data cukup banyak sekitar 1.000.000 lebih Pak Pimpinan ini masih mengalami konsolidasi di internal Himbara begitu. Ada dari proses yang masih terkendala kemudian kami terus melakukan konsolidasi dengan Himbara begitu. Mudah-mudahan di bulan Oktober sekarang ini angka sudah bisa mencapai di 18.000.000 lebih begitu.

Tentu berkaitan dengan program sembako ini, kami harus memastikan atau mengoptimalkan target 18.800.000 Pak Pimpinan. Karena 18,8 juta ini juga menjadi hitungan pemerintah sudah memberikan untuk 2 bulan ya tambahan atau insentif untuk KPM yang kaget 18,8 juta begitu.

Kemudian berkenaan dengan itu juga bulan-bulan ini di awal-awal Oktober ini kami melakukan konsolidasi berkenaan dengan data untuk 5.900.000 begitu. Sehingga di awal Oktober kami merencanakan dan dikawal oleh Pusdatin ini angka seumpama tercapai semuanya KPM kumulahnya itu 18.800.000 ditambah 5.900.000 untuk BPMT yang PTKN berarti total angkanya di 24.7 Juta begitu.

Jadi angka ini sangat besar dan termasuk usulan-usulan BPMTM PPKM yang disampaikan Anggota Dewan Terhormat, tidak ada yang masing-masing 1.000 ini tengah dilakukan oleh Pusdatin pemadannya. Jadi Pusdatin tengah melakukan proses memadankan data yang masuk ini supaya padan dengan Dukcapil tentunya seperti itu. Itu berkaitan dengan program sembako.

Kemudian ada informasi juga Pak Pimpinan dari rapat beberapa hari lalu yang dipimpin oleh Pak Wapres dalam rangka mengakselerasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, khusus untuk KPM yang masuk kategori miskin ekstrem jumlahnya kurang lebih sekitar 1,8 ya 1.800.000 ya mungkin 2.000.000 kurang begitu. Ini nanti akan mendapatkan intensif 3 bulan Pak Oktober, November, Desember. Nah tahapan ini juga siapa-siapa yang menjadi KPM-nya tentu Pusdatin tengah melakukan konsolidasi, baik dengan BPS maupun dengan TNP2K begitu.

Yang ini yang masuk kategori miskin ekstrem dari 18.800.000 ini nanti akan mendapatkan tambahan bantuan, tapi indeksnya bukan Rp200.000,-

Pak Pimpinan tapi Rp300.000,-. Tentunya dimaksudkan supaya kemampuan KPM yang dimaksudkan kategori miskin ekstrem bisa lebih baik ya. Dan ini dimaksudkan untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem paling tidak untuk agenda 2021 yang nanti akan dilanjutkan sampai 2024 begitu.

Selanjutnya akan diinformasikan berkenaan dengan bantuan sosial tunai. Kami informasikan Bapak Ibu sekalian, prestasi untuk BST di tahapan 1 Bulan Januari kami bisa mencapai 96,22%. Itu di Januari dengan target 9.600.000 begitu. Kemudian untuk tahapan kedua sebesar 95.95%. Kemudian untuk tahapan ketiga atau tahapan bulan Maret BST itu 93.4%. Kemudian untuk bulan April atau tahap 4 91.8%. Nah kemudian untuk tahapan 5 dan tahapan 6, tahapan 5 itu 99.98% dan tahapan ke 6 sama prestasi yang bisa dicapai untuk menyalurkannya 99.98%. Kalau dilihat dari data disini memang ada peningkatan kinerja salur BST di Bulan Mei dan Juni begitu.

Nah kemudian yang berkenaan dengan progres usulan RS-RTLH per 30 September 2021. Jadi yang RS-RTLH Bapak Ibu sekalian, jumlah susulan aspirasi yang masuk ini per hari ini totalnya 4.864. Jadi Bapak Ibu sekalian Pak Pimpinan RS-RTLH ini juga mengakomodir bukan hanya apa namanya aspirasi tapi ada usulan-usulan daerah sebelumnya. Nah hanya memang kami memprioritaskan untuk yang apa namanya itu anggaran yang tersedia ini diprioritaskan untuk yang aspirasi dengan indeks 20.000.000

Kemudian tahapan yang sekarang telah dilakukan adalah data yang kami terima dan kiriman dari Bapak Ibu sekalian, sekarang tengah proses konsolidasi data di Pusdatin begitu. Itu lebih memastikan data ini harus masuk ke DTKS kemudian data itu berikutnya harus padan dengan Dukcapil.

Nah kemudian langkah yang akan dilakukan Para Direktur Bapak Ibu sekalian, adalah kami akan melakukan secara simultan Pak, khusus nanti untuk data yang sudah padan dengan Dukcapil sudah *clear* secara administratif itu, nanti akan diproses administrasi keuangannya supaya apa? Supaya nanti secara simultanlah. Kalau menunggu nanti lengkap begitu di khawatirkan nanti akan numpuk begitu karena ada beberapa data yang mungkin harus dilakukan proses pemadanan dengan Dukcapil begitu. Kami berharap mudah-mudahan data yang dikirimkan dari Bapak Ibu sekalian *clean* dan bagus begitu, sehingga nanti akan mempermudah proses administrasi dan transfer nanti. Karena ini prosesnya dikirimkan melalui Bank, Bank Mandiri harus buka rekening juga. Terutama sama ada juga sebaran-sebaran dari RS-RTLH usulan kami hanya per orang di 1 desa jadi modalnya ada yang kolektif mungkin ada yang per individu. Nah kami berharap nanti mulai awal bulan Oktober ini proses Salur bisa kami lakukan kira-kira seperti itu.

Kemudian sedikit yang berkenaan dengan Isu-isu strategis Bapak Ibu sekalian, saat ini kami tengah melakukan *pilot project* di 3 lokasi tentang pengembangan model dari RS-RTLH yang pertama di Minahasa Provinsi Sulawesi Utara jadi Provinsi, Kabupaten Minahasa inilah bekas eks korban bencana alam. Jadi apa namanya itu kita ambilkan satu lokasi di situ sebagaimana arahan Ibu Menteri, kemudian yang kedua ada di desa

Kusamba Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, yang ketiga ada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Kota Batam ini dihuni di Pulau Bertam ini dihuni SukuLlaut yang sebelumnya menjadi binaannya Dayasos yakni komunitas adat terpencil. Jadi setelah purna karena indikator kemiskinan yang masih nampak kemudian kami rencana melanjutkan bimbingan lanjutnya begitu, tentu dalam konteks percepatan penanganan kemiskinan

Saya kira itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan dengan informasi singkat ini bisa memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana yang akan kami lakukan untuk ke depan. Sekian demikian.

*Akhirun kalam Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Dirjen Asep.

Bapak Ibu sekalian kita sepakat menyepakati Pukul 15.00 ya? selanjutnya Pak Dirjen Linjamsos, Pak Pepen dipersilakan 10 menit Pak.

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL (PEPEN NAZZARUDIN):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI.

Yang saya hormati Para Anggota Komisi VIII DPR RI.

Yang saya hormati rekan sejawat dari Kementerian Sosial dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pertemuan ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat hadir dan memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial hari Senin 4 Oktober 2021.

Tentunya pada kesempatan ini Hari Senin 4 Oktober 2021, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas acara penjadwalan Rapat Dengar Pendapat ini dengan agenda evaluasi program dan anggaran tahun 2021 serta isu-isu aktual.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Lanjut, *next*. Ini struktur organisasi Dirjen Linjamsos saya kira tidak ada perubahan sejak rapat terakhir, pada RDP belum ada perubahan dari masih sama untuk susunan organisasi Dirjen Linjamsos. Kemudian berikutnya kami hanya flashback saja menyampaikan terkait dengan fungsi dari Dirjen Linjamsos yaitu untuk perumusan kebijakan pelaksana kebijakan penyusunan ormas tanpa prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada keluarga dan masyarakat dalam keadaan tidak stabil rentan mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi. Itu sebagai *flashback* dari tugas Dirjen Linjamsos.

Kemudian arah kebijakan umumnya terkait dengan 2 aspek yaitu membangun sistem, yaitu membangun sistem perlindungan sosial adaptif dan komprehensif serta peningkatan reformasi birokrasi.

Bapak Ibu sekalian.

Kebijakan teknis yang dituangkan di pelaksanaan program Dirjen Linjamsos terdapat 4 kebijakan yang mengacu kepada 4 Direktorat yang ada. Yaitu kebijakan program dari jaminan sosial keluarga; kemudian kebijakan program dari perlindungan sosial korban bencana alam; kebijakan program dari perlindungan sosial korban bencana sosial; dan kebijakan pendukung korban dukungan manajemen inilah yang kita lakukan pada tahun 2021 dan untuk program-programnya sebagai berikut.

Kami mendapat mandat untuk pelaksanaan tahun 2021 terkait dengan program prioritas nasional ada beberapa target program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh Dirjen Linjamsos. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing ini untuk keluarga miskin dan rentan, yang mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak Rp10.000.000, ini seperti Bapak Ibu ketahui ini sudah dilaksanakan pada program keluarga harapan di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Kemudian program prioritas nasional lainnya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, ini untuk target tahun 2021 220.000 warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapat kesiapsiagaan dan mitigasi. Kemudian 130.000 korban bencana alam yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Kemudian untuk memperkuat stabilitas Polhukhanham dan pelayanan publik dengan target 2021 kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme, ini kita istilahkan dengan program-program kearifan lokal. Kemudian 224.270 warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapat pencegahan konflik sosial. Ini kita akrab dengan istilah program keserasian sosial.

Kemudian Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 Pagu Anggaran Dirjen Linjamsos mengalami beberapa perubahan, karena ini evaluasi juga kami sampaikan terkait dengan kronologi anggaran Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2021 diawali dengan Pagu Rp30.7 Triliun atau Rp 30.720.055.300.000,-. Kemudian ada beberapa perubahan dari mulai revisi 1 sampai revisi 2, revisi 3, revisi 4 sampai revisi 5 seperti yang bisa dilihat pada paparan dan pada makalah Bapak Ibu sekalian. Maka pada Oktober ini Pagu Anggaran Dirjen Linjamsos adalah Rp30.223.964.450.000,-

Kemudian dari pagu alokasi anggaran yang ditetapkan itu, maka realisasi kami laporkan pada Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, realisasi anggaran Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2021 per 3 Oktober 2021 *alhamdulillah* sudah mencapai 72,69% dari anggaran 30,1% dan terealisasi sampai saat ini Rp21.9Triliun dan sisanya Rp8,2Triliun.

Kemudian dilihat dari realisasi per jenis belanja, maka untuk belanja pegawai 74.99% kemudian belanja barang 66,40%, belanja modal 17.92% kemudian belanja Bansos 73.09%, adapun untuk kewenangan Dirjen Linjamsos juga masih melaksanakan Dekonsentrasi utamanya adalah untuk pengeralihan Tagana di daerah jadi masih 55.84%.

Lanjut inilah realisasi dari masing-masing Direktorat UKE 2 di Dirjen Linjamsos pada sisi capaian realisasinya masih berimbang antar direktorat untuk Set Dirjen Linjamsos sudah 66.08%. Kemudian untuk Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sudah mencapai 50.31%. Kemudian untuk Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sudah mencapai 53.59%. Kemudian untuk Direktorat JSK tertinggi 72.95% ini terkait dengan realisasi dari program PPK. Sehingga menyeluruh total realisasi Dirjen Linjamsos per 3 Oktober adalah 72.75%.

Dari realisasi Pagu Anggaran itu maka, kami kerucutkan pada capaian target prioritas nasional sebagaimana sampaikan di awal maka untuk target prioritas nasional warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapat kesiapsiagaan mitigasi tadi targetnya adalah 220.000 orang sampai saat ini sudah tercapai 187.231 orang atau 85%. *Insyallah* ini di akhir tahun biasanya melebihi target. Kemudian warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapat pencegahan konflik sosial melalui program keserasian sosial dan kearifan lokal itu sudah 75%. Kemudian korban bencana alam yang mendapat perlindungan dasar, malah ini sudah melebihi dari target karena ada beberapa kali terjadi bencana dan kita melaksanakan beberapa penyaluran program penyaluran bantuan sehingga sudah mencapai 131%. Kemudian kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapat pencegahan terorisme itu baru 20%.

Kemudian penjelasan dari realisasi yang tadi kami sampaikan, kami laporkan pada Bapak Ibu Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Pertama adalah terkait dengan program prioritas nasional dari program keluarga harapan. Kami sampaikan bahwa untuk sampai Oktober ini penyaluran program PKH tahap 3 sudah mencapai 100% penggenapan 10.000.000 sehingga ini untuk target sudah bisa dicapai bulan Oktober ini.

Kemudian untuk Direktorat PSKBA, ini target Tagana masuk sekolah atau anak sekolah yang mendapat edukasi bencana mencapai 92.000 dari target 135, masih kita kejar target ini dalam 2 bulan ke depan. Kemudian masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana ini sudah mencapai target 12.500. Kemudian Tagana yang ditingkatkan kompetisinya juga sudah mencapai target 4307 orang. Kemudian Tagana yang mendapatkan perlengkapan siaga bencana sudah mencapai target juga yaitu 39.445 pemenuhan kebutuhan bantuan makanan keperluan keluarga korban bencana alam sebanyak 132.332 kemudian seperti yang tersebut.

Nah untuk perlindungan sosial korban bencana sosial, maka realisasi bantuan keserasian sosial sudah mencapai 18.240 orang dan sisanya dalam proses pre-verifikasi, termasuk beberapa usulan dari Bapak Ibu sekalian Anggota Komisi VIII. Kemudian bantuan kearifan lokal juga demikian sudah korelasi dan sisanya masih dalam proses penajakan dan pencairan.

Kemudian untuk dekonsentrasi yang masih 50%, lanjut kami sampaikan bahwa ada pencairan biaya operasional pelaksanaan P2K2 di daerah, yang ini memang kita letakan pada dana dekon di daerah ini masih belum optimal serta beberapa kegiatan Tagana masuk sekolah masih penyesuaian dengan belum dilaksanakannya kebijakan PPKM. Insya Allah setelah ini semua akan bisa dilakukan setelah pasca PPKM ini.

Kemudian Bapak Ibu sekalian, realisasi tinggal Triwulan akhir ini, maka rencana percepatan realisasi di Triwulan IV. Beberapa strategi yang kami kemukakan adalah kami meninjau penyaluran Bansos PKH Triwulan IV selain memang sudah padat vasenya tahap 4, kita juga optimalkan sampai penggenapan 10.000.000 sehingga di tahap 4 ini sudah kita salurkan. Kemudian melakukan percepatan pencairan biaya operasional P2K2 di daerah serta melakukan percepatan pelaksanaan Tagana masuk sekolah dan melakukan percepatan proses verifikasi proposal keserasian sosial dan proses penajakan kearifan lokal.

Demikian beberapa hal untuk memacu realisasi, selanjutnya mohon izin kami menyampaikan terkait dengan isu-isu aktual secara singkat saja. Yang pertama terkait jaminan sosial keluarga sebagaimana kami laporkan di rapat RDP terdahulu adalah penggabungan program Keluarga Program Sembako menjadi bagian SDM PKH, ini tentunya juga memerlukan konsekuensi penanganan alokasi anggaran dan pembagian kewenangan dan tugas serta membuat satuan SBML terkait.

Kemudian evaluasi dan rekonsiliasi Bansos PKH, ini gencar dilakukan tadi disampaikan Pak Dirjen PFM kami bersama-sama bersinergi dengan pelaksanaan Bansos Sembako untuk rekonsiliasi dan evaluasi terkait dengan Bansos. Penyaluran Bansos PKH utamanya adalah untuk meminimalisir kartu KKS yang tidak terdistribusi ataupun KKS yang tidak tertransaksi, ini semua dilakukan secara maraton. Di samping juga kita melakukan graduasi dan pemberdayaan untuk KPM usia produktif.

Kemudian untuk perlindungan sosial korban bencana alam isu-isu aktualnya adalah.

KETUA RAPAT:

Jadi artinya sebentar Pak, arinya sekarang TKSK bantu PKH begitu PKH bantu untuk?

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL (PEPEN NAZZARUDIN):

Korda Pak! Korda Bansos BPNT untuk bantu PKH nanti di 2022. Kemudian untuk Isu Aktual lainnya sedikit lagi dari perlindungan sosial korban bencana alam. Ini korban bencana alam atas arahan Ibu Menteri Sosial kita lakukan secara terintegrasi utamanya di Lingkungan Kementerian Sosial dan melibatkan UPT Kementerian Sosial di daerah, baik itu UPT Eselon II, Eselon III. Kemudian tindak lanjut revisi undang-undang yang *insyaallah* besok kita akan rapat kerja terkait dengan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Kemudian implementasi perlindungan sosial adaptif serta yang paling penting adalahantisipasi dampak ancaman tsunami di pesisir pulau Jawa dan Sumatera. Itu menjadi isu aktual pada tahun 2021 ini yang kita laksanakan. Kemudian untuk perlindungan sosial korban bencana sosial hampir sama dengan bencana alam penanganan korban bencana alam secara terintegrasi Kemensos melibatkan UPT Kemensos ini untuk lebih memperluas jangkauan dan mempercepat penanganan.

Kemudian kami sampaikan sedikit terkait dengan beberapa inovasi perubahan terkait dengan penanggulangan bencana. Pertama adalah langsung saja pada tenda serbaguna. Kami laporkan bahwa tahun 2021 ini kita sudah membuat tenda serbaguna yang memenuhi Protokol kesehatan, ini sudah kita terapkan pada penanganan bencana di Kalimantan Selatan dan di Sulawesi Barat dengan spesifikasi lanjut. Jadi tenda ini sifatnya tidak mudah bocor atau rembes dan bisa menyerap matahari, sehingga ke dalam tidak terlalu panas dan yang paling penting adalah ini bersekat. Jadi mulai saat ini tenda-tenda umum bersekat sehingga bisa mencegah mendukung prokes. Kemudian juga meningkatkan privasi dari para pengungsi.

Kemudian tenda keluarga lanjut. Ini juga arahan dari Bu Menteri Sosial terkait dengan tahun 2021 kita perbanyak tenda keluarga. Karena ini menyangkut kegiatan-kegiatan kebencanaan yang pada 1-2 hari para penghuni tidak berani untuk meninggalkan tempat tinggal rumahnya, namun tidak berani juga untuk meninggalkan rumah. Jadi ini didirikan di depan rumahnya sehingga mudah didirikan lebih privasi dan lebih nyaman.

Kemudian lanjut isu-isu di tahun 2021. Terkait tadi disampaikan upaya kita untuk melakukan evaluasi dan rekonsiliasi penyaluran Bansos diberbagai

daerah, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan arahan dari Bapak Ibu Komisi VIII yang sama-sama dengan kami melakukan evaluasi dan rekonsiliasi penyaluran Bansos di daerah seperti dilaksanakan di Bandung dengan Bapak Wakil Ketua Pak Ace. Kemudian juga di Jawa Timur di beberapa tempat kemudian juga kita lakukan bersama-sama di Pekanbaru Riau, di Semarang Jawa Tengah, kemudian di Provinsi Gorontalo dan di Sragen dan di beberapa tempat lainnya.

Ini mendampingi Bapak Ibu sekalian. Para Anggota DPR yang kami hormati di ikut dengan kunjungan spesifik Komisi VIII di beberapa daerah. Nah ini kita laksanakan semata-mata sesuai dengan tujuan kita bersama untuk lebih mengutamakan penyaluran sampai ke masyarakat serta meminimalisir KKS yang tidak distribusi dan KKS tidak transaksi.

Kemudian ideal pemberian penghargaan kepada aparaturnya penegak hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan Bansos di beberapa lokasi. Kemudian lanjut ini kita melakukan antisipasi dampak ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah di Pacitan bersama Ibu Ina Amania yang terhormat kita melaksanakan kegiatan.

Lanjut, ini kami laporkan betapa dahsyatnya ancaman tsunami di Pacitan. Sehingga kita menyusun beberapa rute termasuk melakukan pemasangan tenda-tenda evakuasi Insya Allah ini akan diterapkan di beberapa daerah di lokasi utamanya di pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa dan Sumatera. Ini baru di Pacitan nanti berikutnya akan kita lakukan di daerah. Ini adalah pemasangan rambu-rambu Bu Menteri Sosial bersama Ibu Kepala BMKG dengan sosialisasi ini. Mudah-mudahan ketika terjadi bencana bisa masyarakat mematuhi atau mengetahui arah yang dilakukan.

Kemudian penyerahan logistik di beberapa daerah ini terkait dengan bencana sosial. Kemudian lanjut penanganan banjir di beberapa daerah juga akan dilakukan di dalam rangka secara cepat kita melakukan antisipasi terhadap bencana.

Terakhir kami laporkan terkait dengan penyelenggaraan dapur umum, yang memang baru 2021 kita lakukan untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar tenaga kesehatan dalam rangka Covid-19. Kita lakukan di beberapa UPT kita dari beberapa wilayah 6 wilayah sebagaimana bisa dilihat di paparan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan lebih lanjut dari Bapak Ibu Anggota Komisi VIII DPR yang kami hormati untuk terlaksananya program Dirjen Linjamsos yang berkualitas.

Demikian terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikum'salam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirjen Linjamsos Pak Pepen. Selanjutnya ke PLT Dirjen Rehsos Pak Harri Hikmat silakan Pak.

PLT. DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL (HARRY HIKMAT):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua.
Wakil Ketua Komisi VIII; dan
juga para Anggota Komisi VIII yang kami muliakan.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Para Dirjen sebelumnya terkait dengan Dirjen Rehsos izinkan saya selaku PLT Dirjen Rehsos menyampaikan evaluasi dan isu-isu aktual.

Langsung saja next ini sebagian Para Direktur hadir disini ada Pak Ses Dirjen ada Bu Direktur Anak yang menangani atensi anak yatim boleh acung tangan atau berdiri ada Bu Eva Kasim di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Viktor Direktur Napza ada Pak Budi terkait dengan tuna sosial dan Pak Andi yang berhubungan dengan Lansia.

Langsung saja pada halaman 9 anggaran dari bukan itu bukan. Itu gelandangan pengemis itu langsung halaman 9. Jadi anggaran Dirjen Rehsos ini posisi sekarang Rp1.1Triliun dari 1.29 sebagai dampak dari *refocussing* yang dilakukan seperti halnya para Dirjen yang lain dan pada posisi Rp1.1Triliun, langsung di slide 13. Slide 13, satu lagi nah ini postur anggaran dari setiap Direktorat atau setiap program seperti yang nampak di dalam slide yang sebetulnya memberikan gambaran, bahwa anggaran yang disediakan di Dirjen Resos itu mayoritas ditujukan untuk penerima manfaat. Sementara belanja modal yang semula cukup tinggi itu karena *refocussing* dan juga dialihkan untuk kepentingan penerima manfaat sebagai sebuah komitmen baru yang diharapkan di Resos bisa terlaksana terutama di unit pelaksana teknis atau balai-balai di lingkungan Dirjen Resos.

Untuk realisasi anggaran pada slide berikut halaman 14, saat ini mencapai 42.55%. Kemudian sekarang ini, pelaksanaan untuk pengadaan alat bantu aksesibilitas ini memang masih dalam proses dan setiap UPT yang sudah mendapatkan penugasan untuk membuat lakukan perakitan untuk motor roda 3 untuk usaha. Kemudian juga kursi roda elektrik dan apa tongkat penuntun adaptif itu masih dalam proses penyediaan bahan. Penataan ruangan dan juga penyiapan PN yang akan menjadi pelaksana atau tenaga kerja dari instalasi produksi dalam kerangka pemberdayaan para penerima manfaat. Dan penugasannya memang tidak hanya di Balai Disabilitas tetapi seluruh balai mendapatkan tugas seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri pada saat rapat kerja sebelumnya.

Upaya untuk mempercepat realisasi anggaran selain daripada menggunakan mekanisme tender cepat dan E-Purchasing, tetapi juga kami beserta terus menerus melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran termasuk untuk memaksimalkan anggaran yang ada dalam rangka merespons dampak Pandemi Covid khususnya untuk anak-anak yatim.

Selain daripada mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi yang melibatkan seluruh pilar-pilar kesejahteraan sosial. Jadi bukan hanya pegawai dari balai tetapi juga pendamping Rehsos yang di BKO-kan oleh direktorat teknis dan juga melibatkan pendamping PKH, pendamping BPNT dan juga petugas Dinas Sosial serta relawan bahkan Tagana dan TKSK ikut serta untuk melakukan verifikasi dan validasi bagi anak yatim piatu. Saat ini sudah masuk data 37.951 anak dan yang sudah di verivali itu ada 24.481.

Kalau berdasarkan target sasaran, maka masing-masing cluster sudah mencapai berkisar antara 21 sampai 75%, bahkan ada yang melebihi sampai 100%, secara keseluruhan dari 142.000 saat ini sudah terealisasi 83.404 atau 58.4%.

Dari sisi akuntabilitas yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja yang juga saat ini mengalami perubahan. Karena sasaran strategis yang semula diarahkan keberfungsian sosial, tetapi dampaknya semua harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang fakir miskin dan rentan.

Oleh karena itu ada perubahan dari sisi indikator kinerja, termasuk memasukan kualitas tata kelola di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Kemudian output dan outcome-nya mengarah kepada kemandirian sosial ekonomi dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan. Ini tidak hanya berlaku untuk program rehabilitasi sosial tapi berlaku juga untuk program dari Unit Eselon I lainnya.

Kemudian akuntabilitas capaian akuntabilitas 58.74% terealisasi, yang terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Kemudian keluarga penerima manfaat itu 106.97% komunitas atau LKS yang mampu melaksanakan atensi 93.19% sementara jumlah SDM yang mampu melaksanakan atensi, seperti yang tadi kami sampaikan tidak hanya melibatkan SDM pegawai dari UPT tetapi juga SDM pendamping Rehsos lainnya dan juga pendamping Sosial dari berbagai program lain di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga targetnya sudah tercapai 160%.

Untuk Isu-isu aktual terutama terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua tentang perkembangan atensi anak yatim. Jadi kami laporkan bahwa data usulan dari pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial termasuk juga yang direkomendasikan oleh Komisi VIII yang selanjutnya diproses melalui Dinas Sosial dan ditujukan kepada Kementerian Sosial itu berjumlah 37.951.

Cleansing awal itu diperoleh 32.481 anak. Selanjutnya kami verivali lapangan langsung oleh para pendamping diperoleh 24.481. Nah kalau kami melakukan *exercise* anggaran untuk estimasi kemampuan anggaran Dirjen

Rehsos karena belum teranggarkan sejak awal sebanyak 60.000 kali rata-rata 930.000 per anak untuk 4 bulan, dengan rincian Rp300.000,- untuk yang belum sekolah dan Rp200.000,- untuk yang sekolah dengan perhitungan 1:3. Maka kebutuhan anggaran diperlukan 55.8% dan dapat dialokasikan dari sisa anggaran atensi yang sampai saat ini belum terealisasi.

Jadi ada sejumlah komitmen bersama LKS yang dapat ditunda karena tidak *urgent* dapat ditunda 2022 dan itu bisa terealisasi di awal tahun Januari-Februari. Jadi tidak ada keberatan dari LKS yang mengalami penundaan karena ada urgensi untuk menangani anak-anak yatim.

Namun demikian pada posisi tahun 2022 sudah tentu kami mohon dukungan lebih lanjut. Karena dari perhitungan yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri kebutuhan anggaran kalau keseluruhan anak yatim ditangani itu ada 4.386.983 anak dan kebutuhan anggarannya sekitar Rp11.6Triliun. Nah ini yang belum ada kepastian mengenai alokasi anggaran 2022. Dan Ibu Menteri Sosial sudah mengirimkan surat usulan terhadap tambahan anggaran untuk anak yatim itu. Maka itu kami mohon dukungan lebih lanjut apakah nanti lewat BA-BUN atau revisi dan sebagainya.

Nah pada slide berikut ada realisasi atensi anak yatim, yang Bapak Ibu bisa lihat memang untuk sejumlah daerah dimana kunjungan kerja Ibu Menteri dilaksanakan itu bisa tersalurkan. Kami baru hari ini mengirim surat ke Dirut Bank Mandiri atas risiko keterlambatan di dalam penyaluran bantuan Atensi. Jadi ini mitigasi awal karena jumlah data yang telah kami sampaikan ke Bank Mandiri ada 15.622 anak.

Sementara yang sudah dibukakan rekening dan sudah salur harus 1.143 anak. Sehingga anak yang belum di buka rekening atau belum mendapatkan bantuan Atensi itu sebanyak 13.674. Padahal surat terakhir yang kami kirim ke Bank Mandiri itu 27 September dan surat yang paling awal sudah kami kirim pada akhir Agustus. Sehingga ini menjadi perhatian saya minta perhatian untuk Bank Mandiri ternyata proses mereka untuk pembukaan rekening Atensi ini masih tersentralistik

Jadi ini salah satu sumber yang mungkin terjadi juga sumber masalah yang terjadi di PKH maupun di BPNT karena proses pembukaan rekening atau Auto Kredit dan sebagainya itu terpusat di Jakarta begitu. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan ada penggantian kartu/penambahan kartu dan lain sebagainya itu tidak bisa direspin cepat. Oleh karena itu kami sedang mempertimbangkan untuk atensi anak yatim itu karena pembukaan rekeningnya adalah rekening biasa, rekening anak seperti simple Britama Junior dan lain sebagainya maka cukup itu dibuka di lokal dan bisa saja tidak harus bank tertentu bisa bank siapa pun yang memang sanggup melayani apa pembukaan rekening untuk anak yatim sehingga proses lebih sederhana dan lebih cepat.

Hari ini kami sudah kirim surat dan semoga tanggapan segera, karena kalau tidak situasi yang mendesak untuk membantu anak-anak yatim yang

orang tuanya meninggal akibat Covid tidak bisa terpenuhi dengan sebagaimana mestinya.

Next lanjut ini ada Ibu Ina juga lengkap kalau ini tapi Pak Ketua belum ada nanti di foto berikut. Karena saya memerintahkan staf, tolong jangan sampai ada Anggota Komisi yang tidak ada fotonya, karena ditegur nanti mudah-mudahan terwakili kalau tidak ada mohon maaf sebelumnya karena tidak sempat mengecek.

Lanjut nah kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi, maka untuk Dirjen Rehsos. Kalau tadi pada saat posisi saya sebagai Sekjen masuk memberi kontribusi untuk updating data DTKS secara dinamis, maka pada posisi pengentasan kemiskinan secara terintegrasi Dirjen Rehsos memberikan kontribusi untuk penyediaan sentra kreasi atensi sebagai wadah bersama pemberdayaan masyarakat. Termasuk juga giat dari program pahlawan ekonomi bisa dilakukan seiring atau terkoordinasi di sentra kreasi atensi. Itu gambaran garis besarnya selain daripada upaya peningkatan pendapatan dimaksud, ada upaya pengurangan beban pengeluaran antara lain melalui bantuan-bantuan atensi yang diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang termasuk pada kelompok marginal rentan atau apa mempunyai kebutuhan khusus.

Bapak Ibu sekalian.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sentra kreasi atensi. *Next* sebetulnya sentra kreasi atensi sudah menjawab persoalan bagaimana merespons kemiskinan ekstrem karena mereka pada umumnya tinggal di daerah yang tidak jelas status tanahnya, status rumahnya, tidak punya akte, tidak punya data kependudukan, tidak punya kartu identitas dan sebagainya, yang sebetulnya membutuhkan penanganan khusus dan itulah yang ditemui oleh Bu Menteri di berbagai kesempatan termasuk tidak hanya di pedesaan tetapi di perkotaan dan itu dibawa ke balai-balai untuk diberikan berbagai peningkatan kemampuan kewirausahaan dan vokasional. Pada slide berikut. Dan juga mengaksesskan pada lapangan kerja sampai bisa terwujud satu usaha ekonomi produktif. *Next* lambat ya *foto*-nya besar mungkin jadi lambat. Sampai terwujud mereka punya usaha ekonomi produktif, bahkan mereka sudah belajar mandiri di sentra kreasi atensi.

Dan Bapak Ibu sekalian dalam kunjungan kerja sudah terlibat di dalam meresmikan kreasi atensi ini, mohon dukungan lebih lanjut (pada slide berikut.) Saat ini omsetnya slide berikut sudah Rp1.36Miliar dengan laba Rp418.346.000,- untuk 25 sentra kreasi atensi yang sudah terbangun di balai-balai dan 8 di antaranya sudah diresmikan.

Bapak Ibu sekalian Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Mohon kiranya bisa melihat atas kemungkinan kunjungan kerja sambil meresmikan di SK-SK yang lain, apakah di dapil yang terkait Bengkulu, Bali, Palu dan seterusnya sampai juga ke Medan dan seterusnya. Kami mohon juga informasi lebih lanjut agar nanti perencanaan peresmian ini rata-rata

sudah siap diresmikan oleh Bu Menteri. Kami mohon nanti dengan TA mungkin bisa berkoordinasi.

Next ini yang tadi sering disampaikan oleh Bu Menteri tentang perakitan kursi roda multiguna *Cerebral Palsy*, maupun kursi roda elektrik yang terus dikembangkan di Balai dan memang karena ada kurang lebih 10 Balai yang mendapatkan penugasan sementara penyediaan sarana prasarana juga harus disiapkan sedemikian rupa, karena itu ada sedikit kendala di dalam penyerapan anggaran agak sedikit terlambat dalam penyerapan anggaran, karena anggaran tersebut merupakan hasil *refocussing* yang tetap membutuhkan persetujuan dari DJA. Jadi kita bertahan sekitar 1 bulan untuk revisi dimaksud begitu juga untuk tongkat penutup adaptif, motor roda 3 dan seterusnya.

Terakhir kami sampaikan tentang penataan organisasi, dimana rencana 41 UPT akan di-*marger* menjadi 31 UPT untuk lebih mengoptimalkan fungsi UPT dimaksud terutama UPT yang lokasinya berdekatan, begitu sementara untuk kebijakan seperti yang tadi kami sampaikan selain daripada merevisi Permensos Nomor 16 tentang Atensi menjadi Permensos Nomor 7 yang telah mengatur prinsip multi fungsi legal standing untuk sentra kreasi atensi BNPB Rp0,- dan Posyandu Lansia ,maka BNPB Rp0,- menjadi sah adanya karena sudah ada penetapan Permensos Nomor 9 tahun 20201 dengan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Dan di sentra kreasi atensi juga diintegrasikan dengan penyediaan Rusunawa, dimana rencana Rusunawa itu akan dibangun di 16 lokasi di luar daripada tambahan yang di luar daripada 2 Balai yang sudah mulai dibangun *next* dan konsep pendekatan pembangunan bagaimana menciptakan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu bisa kembali ke kawasan yang layak huni, dari kondisi yang awalnya kumuh atau tidak layak huni bahkan tunawisma.

Itulah yang dimaksudkan oleh Ibu Menteri dan Rusunawa ini bukan anggaran dari Kemensos tapi anggaran dari PUPR dengan rata-rata anggaran sekitar Rp40.000.000.000,- dan denah registrasi interiornya saya kira cukup layak dan ini gambaran dokumentasi pembangunan Rusunawa di Balai Panghudi Luhur, maupun di Balai apa RPTC di Bambu Apus. Sekarang sudah masuk ke lantai 5 dan sudah mulai apa pelapisan tembok dan sebagainya, sehingga di sebelah kanan desain akhir kurang lebih seperti itu yang ada di gambaran lantai 5 dengan kurang lebih dapat mampu menampung sekitar 90 keluarga penerima manfaat.

Terakhir kami sampaikan dokumentasi kunjungan kerja Komisi VIII. Baik di Serang, Kabupaten Bandung ada apa Pak Ace Pak Wakil Ketua Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sragen, Surakarta, Jember, Pekanbaru, Jakarta, Banjar Baru, Kendal, Gorontalo dan Bandar Lampung.

Kiranya Bapak Ibu sekalian bila nanti pada saatnya berkunjung, kami memastikan bahwa bantuan atensi tidak hanya disalurkan di kota di mana kunjungan Menteri berlangsung, tetapi juga kabupaten/kota di sekitarnya.

Sehingga jumlahnya memang variatif ada yang kebetulan tersebar di kabupaten/kota sekitar Dapil Bapak Ibu sekalian, sehingga nilainya cukup signifikan tapi ada juga yang misalkan tidak terlalu banyak sasaran atensi yang diberikan. Tapi ini semua kerjasama dengan juga bersama-sama dengan Dirjen PFM Dirjen Linjamsos dan juga Dirjen Dayasos untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial yang diperuntukan untuk wilayah-wilayah Dapil Bapak Ibu sekalian.

Saya kira itu dari Dirjen Resos mohon masukan dan dukungan terima kasih.

Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Waalaikum'salam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Pak PLT Dirjen Resos.

Selanjutnya kita menginjak pada acara tanya jawab atau tanggapan. Pertama kali saya akan biasanya suka dari atas, tapi kita bikin sekarang dari bawah ya. Oleh karena itu saya persilakan pertama dari Partai Persatuan Pembangunan Pak Kyai Muslich biasanya tidak ada oke ,saya lanjutkan ke Partai Amanat Nasional tidak ada juga? Oke, inikan lebih efisien. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera singkat Pak Kyai.

F – PKS (K.H. BUKHORI., Lc. M.A.):

Pak Ketua yang saya hormati.

Dan Anggota Komisi VIII dan juga Pak Sekjen dan segenap jajaran.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Saya tahu karena waktu ini sangat singkat ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak berkomentar dengan hal-hal yang tidak terlalu relevan satu-satu saja. Pertama terkait dengan Irjen ini Pak saya berharap Irjen ke depan ini harus lebih memperbanyak kerja sama dalam pengawasan dengan DPR karena memiliki tupoksi yang sama ini saya kira.

Yang kedua terkait dengan Badiklit ini Pak ya, saya setuju ini dengan program Segoro ini ada program baru Segoro. Ini program Segoro yang tadi disampaikan ini saya kira juga program yang akan bisa memperkuat SDM serta juga memperbanyak SDM, khususnya SDM Kesejahteraan Sosial dan ini tentu akan *in-line* dengan gerakan teman-teman di Komisi VIII ya.

Dan yang kedua, kami berharap ini Pak jadi karena Badiklit, Lit-nya ini akan dipindahkan begitu ya penelitian dan pengembangan penelitiannya saya kira itu akan dipindahkan ke kelembagaan yang baru, tapikan di Kementerian

Sosial pasti dia memiliki semacam pengembangannya. Nah saya mengharapkan bahwa semua program-program di Kementerian Sosial ini ketika ditumbuhkan atau kemudian dibesarkan, dikembangkan itu harus berbasis kepada sebuah satu kajian yang tentunya sama disini, sehingga semua program yang ada. Misalnya contoh PKH, PKH ini sudah berjalan kurang lebih dari 10 tahun karena itu perlu ada kajian dari Badiklit, seperti apa sebenarnya model yang lebih tepat seterusnya. Karena kalau kita lihat jumlah orang miskin yang di-cover melalui APBN dari APBN itu dari tahun ke tahun itu bukannya berkurang tapi bertambah ini perlu ada pemikiran.

Yang berikutnya, terkait dengan yang terkait dengan realisasi anggaran yang cukup kecil ini di Dirjen Pemberdayaan Sosial. Pak, ini realisasi kita masih kecil ya di halaman 10, itu kita lihat ada misalnya program-program program seperti SLRT dan Puskesmas. Saya kira ini satu nafas ya? Karena kalau Puskesmas di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten begitu kecamatan atau kabupaten ya jadi kecamatan ya Puskesmas. Desa kalau SLRT ditingkat kabupaten ya yang kemudian semacam menjadi *hub* begitu.

Nah saya berharap bahwa program ini Pak, ketika ini bisa dijalankan dengan baik itu akan menjadi etalase yang bagus dari Kementerian Sosial. Tapi *problem*-nya bahwa Puskesmas ini belum terbentuk di seluruh desa atau di seluruh kelurahan. Jadi pertanyaan saya, saya berharap atensi ini karena ini memang tidak waktunya untuk kemudian tanya jawab berkepanjangan begitu. Jadi saya kira depannya mesti harus ada sebuah satu *political will* untuk memperkokoh terhadap kelembagaan ini, karena tanpa ini saya kira nanti Kementerian Sosial itu akan menjadi kementerian yang pembuangan sampah saja atau mengelola sampah. Padahal sampah masyarakat itu kalau kita lihat adalah sebuah satu *power* atau sebuah satu sumber daya, dia akan menjadi sebuah energi yang besar begitu. Tapi ketika kita lihat begitu itu hanya sebuah sisa maka kita akan mengeluarkan energi besar tidak akan bisa memberdayakan ini.

Berikutnya terkait dengan RTLH di ini di PFM ini Pak. Ini PFM saya kira juga ada kaitannya tadi dengan Pak Hari selaku PLT, daripada apa ini ya yang atensi tadi ya? Jadi atau sebelumnya saya juga menyampaikan selamat dulu ya kepada Pak Harry dan juga Pak Hartono yang sebetulnya dua-duanya ini bergantian posisi, sebenarnya tidak ada naik turun tapi bergantian kursi saja satu deretan itu.

Jadi ini kaitan dengan RTLH kami mengharap Pak. Jadi RTLH yang sekarang ini sedang di *propose* oleh Kementerian Sosial gagasan yang kemarin yang disampaikan Bu Menteri dan kita juga meng-*endorse* yaitu bagaimana setelah orang miskin ini dibantu secara rumahnya itu, harus diberdayakan dari sisi sosial dan ekonominya. Ini penting dan itu belum muncul dimana itu misalnya pola apa pola mengerjakannya seperti apa dan

seterusnya. Kalau tidak ada saya khawatir gagasan ini hanya akan lepas keluar begitu saja Pak. Itu saya kira yang terpenting terkait dengan PFM.

Nah berikutnya ini terkait dengan ini Pak Pepen ya? Terkait dengan Direktur Jenderal Mensos, ini apa namanya perlindungan sosial ini Pak. Saya kira yang terkait dengan perlindungan sosial ini untuk capaian-capaiannya sudah cukup baik lah. Tinggal tadi itu bagaimana kemudian jumlah orang miskin ini atau memberdayakan orang miskin ini Pak tidak hanya. Kemudian kalau disini memang menanggulangi persoalan kemiskinannya. Tapi yang belum kemudian disinkronkan dengan Dirjen yang lain menurut saya ini adalah pemberdayaannya.

Jadi pemberdayaannya terhadap KPM ini masih minim Pak, jadi masih menggantungkan suatu yang sangat apa namanya tradisional atau konvensional sekali. Jadi pemberdayaan orang miskin atau KPM itu hanya diserahkan kepada pendamping. Sementara pendamping itu *background*-nya macam-macam lalu seakan-akan dia Ala Kulli Syai-in Qadir seakan-akan dia bisa menangani segala-galanya dan praktiknya di lapangan itu KPM ini ketika mengadu kepada pendamping tidak hanya persoalan masalah bantuan yang mereka terima sampai kadang-kadang persoalan bayi mereka mengadu KPM ini. Jadi saya kira bagaimana ini perlu ada sebuah satu kolaborasi dari berbagai macam Dirjen ini untuk kemudian semuanya mengarah kepada pemberdayaan ini pemberdayaan sosial maupun pemberdayaan secara ekonomi.

Nah saya melihat pemberdayaan yang paling pertama kali dimunculkan itu adalah secara mental. Jadi ini umumnya rata-rata KPM kita ini kan inferior artinya orang yang minder dalam hidup. Itu karena itu memang perlu adanya semacam satu pemicu. Jadi makanya misalnya KPM atau pendamping ini diberikan pelatihan pertama kali adalah bagaimana kemampuan untuk memberikan motivasi. Jadi tidak hanya sekedar motivasi secara tutur kata tetapi motivasi ini secara praktik Pak. Ini saya kira yang menjadi catatan penting yang saya rasakan begitu.

Dan yang terakhir ini Pak sebelum, sebelum terakhir ada terkait dengan masalah. Jadi kalau ini yang berikut ini adalah di Rehabilitasi Sosial. Di Rehabilitasi Sosial ini Pak PLT, ini saya setuju ini jadi gagasan-gagasan cukup bagus ya terima kasih. Cuma ini Pak, jadi kalau kemarin itu ada apa namanya ada program tentang anak yatim dan jumlahnya kurang lebih harus memerlukan sekitar 11, sekian Triliun dari 4.3 Juta anak inikan data ini dinamis. Nah karena itu saya mengusulkan Pak ini perlu ada 1 regulasi ya nanti tidak hanya menjadi satu kebijakan di tingkat dirjen tetapi ini harus menjadi kebijakan tingkat negara, negara harus hadir Pak.

Nah, harapan saya bahwa kalau ada gayung bersambut antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial untuk menangani persoalan anak yatim tidak

hanya secara program tetapi secara utuh sebagai manusia maka kemudian perlu dibentuk adanya semacam regulasi. Sekurang-kurangnya ini adalah mungkin program Bapak ini adalah perlu ada Peraturan Menteri baru kemudian nanti kita buat undang-undangnya. Ini saya kira yang sangat penting dan bersifat strategis untuk kemudian menyelamatkan anak-anak yatim kita yang jumlahnya cukup besar.

Dan yang terakhir terkait dengan pejuang muda ini saya juga masih belum tahu terkait bagaimana posisi pejuang muda ini dimaksudkan. Kemarin mau diikuti dengan kuliah merdeka ya atau kampus merdeka. Nah kampus merdeka ini kan ada kaitan dengan kampus-kampus ini saya kira juga perlu dibuat semacam juklak yang lebih *clear* Pak supaya tidak hanya sekedar menjadi apa kambing percobaan atau kelinci percobaan. Maksud saya begini ketika kemudian para pejuang muda ini dilibatkan terlalu jauh baru mendapat pengalaman bersifat tutorial, lalu kemudian pengalaman empirik yang sifatnya adalah mendapat transfer empirik dari pihak lain. Lalu kemudian dipercayakan untuk mengelola satu program, saya khawatir nanti akan bisa menjadi ganjalan bagi Kementerian Sosial sendiri. Karena itu saya berharap perlu ada 1 Juklak yang lebih *rigit* untuk memastikan, kita perlu memastikan bahwa program itu sukses tapi jangan sampai pejuang-pejuang muda ini hanya menjadi apa namanya ngikutin semangat saja. Semangat boleh ya tapi kemudian pengalaman menjadi penting.

Contoh misalnya kalau kemarin salah satu uraiannya itu dalam rangka untuk memberdayakan terhadap misalnya berbagai masalah persoalan sosial, khususnya misalnya ketika ada program Rutilahu itu, kemudian nanti program-program mereka yang menerima Rutilahu, kemudian nanti yang membuat proposalnya adalah mereka yang menjadi pendampingnya mereka, mereka belum berpengalaman saya khawatir nanti mereka akan menemukan kegagalan.

Jadi mereka mesti harus tidak langsung diterjunkan untuk menjadi pengguna atau tidak menjadi apa namanya langsung menjadi tutornya masyarakat tetapi dia harus masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi saya kira intinya pejuang muda ini menurut saya tolong diberikan Juklak yang lebih *clear*.

Dan yang terakhir, ini saya kira Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan Kesekjenan ini Pak, ini saya melihat kenapa ini ya Pusdatin Kesos ini baru terealisasi baru 3,7%? Jadi ini saya kira juga perlu menjadi atensi. Padahal ini merupakan sebuah satu atensi kita bersama, bahkan di Komisi ini ditahun 2020 telah dibentuk adanya satu Panja tentang Verivali yang kemudian kesimpulan akhirnya adalah memberikan atensi dan dorongan kepada Kementerian Sosial untuk menyelesaikan persoalan masalah DTKS, bahkan waktu itu kami mendorong adanya anggaran badan, anggaran yang cukup besar Rp1,3Triliun sampai akhirnya Rp1,6Triliun. Meskipun kemudian tidak

masalah tetapi kemudian ini kenapa baru terealisasi 3,72%. Ini saya kira perlu ada penjelasan yang lebih rinci.

Terima kasih Pak Ketua mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Kyai Bukhori. Selanjutnya dari Fraksi PKB, kalau tidak ada kita lanjutkan ke Fraksi Nasdem. Demokrat *sorry*, mohon maaf silakan Pak Achmad mohon maaf. Silakan, oke.

Silakan Pak Achmad mohon maaf.

F – P DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD M.si) :

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam Sejahtera.

Selamat Siang.

Kami sebenarnya apa yang kami apa rencana berapa pertanyaan ini sudah diborong oleh Pak Ustadz kita. Jadi kami hanya menambahkan. Pertama ini Pak kan ada temuan dari Irjen sebanyak 12 item ya? Di halaman berapa tadi itu, itu 12 item sampai yang mana tindak lanjut daripada temuan ini di Kemensos itu Pak itu perlu kita pertanyakan, karena apa 2019 sama juga ceritanya 2020 sama juga temuannya.

Berarti kan saran Irjen ini hanya sebatas saran tidak ditindaklanjuti oleh Dirjen atau Kepala Diklat lainnya. Jadi kami mengharapkan temuan-temuan yang 12 item ini hendaknya ditindaklanjuti dan tadi belum disampaikan saran itu saran sudah disampaikan oleh Irjen, tapi tindak lanjut dari masing-masing Dirjen atau apa belum disampaikan begitu. Sehingga belum ada terobosan untuk persoalan-persoalan di Kementerian Sosial ini. Jadi kami mohon penjelasan nanti apa tindak lanjut dari saran daripada 12 item masing-masing Dirjen atau Diklat? Itu pertama.

Yang kedua, ini masih banyak diketemukan Pak ini ada graduasi daripada KPM kita ya. Artinya dikeluarkan mungkin karena itemnya sudah tidak ada lagi, kemudian dia sudah mampu atau seterusnya. Lalu dimasukkan sistem DTKS KPM baru ya ternyata 30% di lapangan KPM baru yang DTKS ini itu tidak tepat sasaran Pak. Jadi sudah masuk dalam sistem itu dia tapi ternyata di lapangan kami kemarin Pak 2 Oktober yang lalu pertemuan

dengan seluruh apa namanya pendamping PKH 12 kabupaten/kota senada semuanya Pak.

Jadi yang dimasukkan pengganti graduasi itu 30% itu tidak tepat, artinya apa mungkin data DTKS yang diambil itu data yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Sehingga apabila di praktikkan ke lapangan itu tidak terkena sama sekali. Jadi item-item yang di dalam PKH itu tidak masuk sama sekali dia menerima. Yang kedua mungkin waktu memasukkan DTKS dia tidak mampu ternyata sekarang dia mampu dan masuk di dalam daftar KPM. Jadi seperti itu.

Jadi oleh sebab itu, kami sarankan untuk mendapatkan KPM yang akurat yang betul-betul mungkin bisa dengarkan saran atau pendapat atau data yang dibuat oleh pendamping PKH itu sendiri, karena ini *update* terus Pak. Sebagaimana yang kami sampaikan kemarin apabila kita padankan data DTKS dengan data pendamping PKH itu jauh lebih update, lebih akurat pendamping ini. Jadi ini temuan yang termasuk data 2021 yang baru menjadi KPM baru itu tidak tepat sasaran 30%. Jadi ini tolong cepat ini diperbarui kembali itu yang kedua.

Yang ketiga, sampai hari ini seperti di Riau lebih kurang 40%. Itu data KPM yang mendapat PKH itu sampai hari ini saldonya Rp0,- alasan SP2D, belum ada bank tidak bisa cair katanya bagaimana cerita Rp0,- Januari sampai Oktober ini Pak Rp0,- Itu temuan kita di lapangan. Jadi kami kira tidak jauh berbedanya ini sama saja secara nasional mungkin sampelnya Riau. Tapi ini mungkin koreksi Pak bagaimana ini sampai hari ini Rp0,- saldo mereka padanya mereka tercatat resmi semuanya, jadi harapan kami ini tolong ditindak lanjuti

Terakhir ini Pak mengenai pejuang muda ini, ini diambil dari mahasiswa ya 5.140 iya yang mempekerjakan sekitar 2 bulan untuk mendapatkan DTKS yang update. Nah ini betul-betul apa namanya suatu kerja yang tidak mudah sebab sebagaimana di singgung Pak Bukhori tadi mereka belum punya pengalaman, mereka belum terjun ke masyarakat hanya mengandalkan intelektual saja. Saya khawatir nanti kegiatan ini bukan pesimis tidak mungkin kegiatan ini nanti bisa menjadi masalah DTKS itu sendiri, karena tanggung jawab moral mereka tidak ada sukses, tidak sukses DTKS tidak ada tapi berbeda dengan RT-RW bagaimana ke depan ini kenapa pendataan DTKS tidak akurat, karena RT-RW ini tidak diberi operasional untuk pendataan itu saja masalah di lapangan. Tapi kalau seandainya nanti 5.140 mahasiswa ini ada pembiayaan untuk operasional memperoleh data DTKS, kenapa tidak nanti untuk anggaran berikutnya kita efektifkan RW dan RT karena dia punya tanggung jawab moral terhadap apa namanya kemiskinan di daerah itu tanggung jawab terhadap warganya.

Kami rasa mahasiswa ini tidak punya tanggung jawabnya habis selesai program itu selesai kalau akurat tidaknya tidak ada urusan. Nah ini perlu pertimbangan nanti supaya betul-betul merekrut ini, mungkin orangnya punya loyalitas punya integritas ini kan sulit mencari dalam waktu dekat ini karena pelaksanaannya Oktober sedangkan sekarang baru dalam rekrutmennya bagaimana ini? Dan apa dasar apa regulasinya? Dan ini berkaitan dengan anggaran setiap rupiah di keluarkan mesti ada aturan regulasinya. Kami kira itu saja Pak Ketua terima kasih.

Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Waalaikum'salam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Achmad, selanjutnya dari Nasdem, oke silakan.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Baik terima kasih.

Ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati.
Pak Sekjen, Dirjen, dan seluruh jajarannya.

Tadi saya sudah mendengar paparan Pak Sekjen yang baru Pak Hari, tapi saya ini ingin bertanya Pak kenapa ini cuma belanja barang ya 15% begitu di Sekjen Bapak ini dan modalnya hanya 11? Apakah ada hambatan peraturan, aturan atau regulasi begitu? Sementara ini sudah Bulan 10 Pak kalau bulan 12 itu sudah kita bilang sudah ujung-ujung hari dan biasanya anggaran agak susah, kalau untuk belanja barang, belanja modal untuk mengadakan lelang bagaimana mekanismenya, saya mau tahu ini Pak. Inikan Rp700.000.000.000,- yang satu Rp230.000.000.000,- Pak jadi Rp1.000.000.000.000,-? Hampirkan jadi ini tidak ada progresnya ini bakal mandeg ini bakal kembali kan begitu. Jadi saya ingin tahu bagaimana ini Bapak Pak Sekjen yang baru ini kepiawaiannya itu kalau belanja pegawai sudah pasti habis Pak? Karena untuk menggaji dan segalanya begitu itu Pak Dirjen, Pak Sekjen.

Kemudian ini yang sedikit lagi tentang Pak Dirjen, apa ini tadi Pak Asep tentang Rutilahu Pak. Rutilahu inikan kita sudah ajukan seperti Bu Menteri kemarin sampaikan, ada beberapa dari kita juga aspirasinya kalau kita jumlahkan sampai ratusan semua seluruh aspirasi kita Pak. Jadi dan ini juga sudah menuju akhir bulan, akhir tahun. Tapi saya dengar dari bawah juga dari Sekretariat Bapak belum ada realisasi Pak begitu. Penyerapannya belum ada dijadikan akhirnya mandeg ini Pak. Sementara Bu Menteri dulu janji bulan

berapa Bu bulan 8 ya Bulan Juli ini sudah harus sebulan ini Bapak-bapak cepat semua begitu janjinya kan?.

Nah kita sudah cepat saya yang paling lengkap saya suruh Pak tapi akhirnya molor juga ini maksudnya tidak sesuai bahasa dengan realita begitu. Ini kita berharap Pak Asep ini yang serius. Maksudnya yang sudah siap tindak lanjut Pak realisasinya. Jadi penyerapannya kan terus berjalan Pak begitu itu harapan saya Pak

Kemudian juga Pak Pepen, tadi ada program keserasian sosial dan kearifan lokal ya Pak itu juga mandeg Pak begitu maksudnya lama begitu maksudnya dari 2-3 bulan lalu kita apa kita sama-sama ajak itu orang dari daerah untuk bermohon untuk juga *survey* katanya ya? Tapi kenapa lambat begitu birokrasinya apa yang salah apa yang menghalangi? Kalau ada Bu Menteri mungkin kita lebih enak nanti ngomong ini tapi karena ini Pak Sekjen Dirjen tolong juga paparkan begitu. Kami berharap ini jangan lama Pak jadi kita dibawah juga sudah berjanji kita sudah bilang Bu Menteri itu orangnya bagus cepat maunya birokrasinya tau-tau ditingkat Dirjennya lama begitu. Jadi saya ingin ini sesuai sama apa akselerasi kinerja Bu Menteri begitu.

Dan yang satu lagi Pak Sekjen yang lama ini Pak Hartono ini tentang Diklat Pak. Saya melihat di daerah itu pendamping PKH itu banyak yang saya tidak nuduh Pak ya kualitas kerjanya belum begitu baik itu Pak. Contoh temuan-temuan di Jawa itu yang dia menyelewengkan mengambil melalui kartunya diambil, disimpan dia pas nanti keluar dia yang ngambil begitukan.

Itu saya lihat didaerah masih banyak di sini Bapak kan ada program penyuluhan dan pendidikan latihan ya Pak. Kalau bisa ini Pak dilakukan di Dapil- dapil contoh Dapil saya begitu atau Dapil teman-teman terserah. Karena itu sangat penting begitu Pak, tenaga pendamping ini sepertinya mereka tenang-tenang air mengalir, tahu-tahu selesai begitu. Seperti yang diributkan di marahkan Ibu Risma itu sebenarnya mendukung Pak mau orang bilang bagaimana saya mendukung.

Karena realitanya pendamping itu banyak yang kunyuk Pak begitu di dapil saya itu bermain begitu cuma diam-diam semua dan ketika Bu Risma turun banyak yang tidak bermasalah dia. Dia sudah over begitu sudah over lepas begitu marahnya, akhirnya jadi *bully-bullyan* kepada Bu Menteri itu ya sudahlah namanya tugas tapi Bu Risma itu Lillahi Ta'ala, dia demi rakyat Pak kalau saya amati dengan netral ya begitu tidak dengan politik begitu. Itu saya pikir yang utama Pak Ibu semua Pak Dirjen, Pak Sekjen terima kasih.

Wassalam'mualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Waalaikum'salam Warahmatullah Wabarakatuh.

Selanjutnya dari Gerindra ya Pak Husni, silakan Pak Husni?

F- P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Kapoksi saya dulu.

Yang saya hormati Pak Ketua Pak Ace.

Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII.

Yang saya hormati para Eselon dari Kemensos.

Pertama dan terutama sekali saya mengucapkan selamat untuk Pak Sekjen yang baru. Selamat bertugas Pak. Selamat juga untuk Pak Hartono Laras sebentar lagi Bapak naik pangkat ini paling kurang jadi Profesor.

Pak Ketua mudah-mudahan suara saya lebih lembut daripada biasanya. Begini, disini ada sedikit saya tambahkan untuk Pak Irjen di halaman 14 ada 12 hasil penulisan Dumas pada program BPNT dan PKH. Dumas ini berartikan pengaduan masyarakat Pak ya? Saya tambahkan lagi ini pengaduan dari Komisi VIII mungkin teman-teman juga hampir sama. Disini ada 12 banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh ya Pak. PKH itu ada yang digadaikan Pak itu mungkin bisa di poin ke 13 digadaikan. Jadi penerima PKH anaknya perlu motor mungkin ya dia pinjam uang sama orang motornya diambil itu pengambilan apanya hasil dari PKH-nya sudah jatuh di orang lain.

Begitu juga banyak kejadian-kejadian di Himbara itu gara-gara salah titik, salah koma itu uangnya tidak cair-cair Pak. Jadi saya pada tahun 2020 termasuk yang banyak membantu para KPM dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini di Himbara.

Kemudian juga tidak sinkronnya ini apa realita sekali. Tidak sinkronnya antara kepala desa atau lurah dengan para pendamping PKH itu sendiri, dalam melakukan pendataan-pendataan orang-orang miskin itu Pak. Ya saya tidak tahu kenapa itu tidak sinkron mungkin dari Pak Irjen nanti lebih paham, karena ini masing-masing mempunyai kepentingan di dalamnya itu sendiri.

Kemudian juga ini untuk Pak Hari ya. Saya terus terang Pak Hari apa yang dilakukan Ibu Menteri itu saya sangat mendukung sekali, karena di lapangan ini luar biasa kejadian-kejadiannya saya waktu itu juga waktu di Bandung Barat bersama Pak Ace melihat kejadian langsung, bahwa permasalahan-permasalahan dari Himbara itu sendiri ya. Jadi saya juga waktu turun di Dapil, saya kalau saya tanya ke Himbara bagaimana aman Pak

Husni minggu depan sudah bisa kita bagikan semua, cuma karena kita tak lama-lama di Dapil kita pikir betul. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang sama-sama kita saksikan sendiri.

Kemudian ini ya kami Pak Sekjen. Kami banyak menemukan-menemukan ini apa koordinator-koordinator PKH ini kan diangkat dengan SK Kemensos. Mereka kalau saya tidak salah mereka kan mempunyai SK itu lebih kurang 1 tahun dan kemudian kan bisa diperpanjang itu ya. Bagaimana kira-kira jalan keluar apabila kita ketemu dengan koordinator-koordinator yang kita sendiri di Komisi VIII selalu memantau kinerja-kinerja daripada mereka, yang mereka tidak mau bekerja sama dengan kita di Komisi VIII? Jadi kira-kira jadi apabila misalnya kita tanya bagaimana penyaluran di lapangan? Dia cuek saja Pak, kemudian apa kendala-kendala di lapangan tidak mau tahu dia. Jadi seolah-olah dia punya orang kuat mungkin di Kemensos.

Jadi tolong Pak Sekjen, kira-kira langkah-langkah apa orang-orang seperti ini untuk kita bisa ditindaklanjuti? Karena terus terang jangan kejadian-kejadian yang lama juga setiap tahun berulang-ulang. Jadi mohon ini Pak Sekjen supaya kita kira-kira langkah apa untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Apalagi dia setahun sekali juga di ini di apa, di apa itu namanya SK-nya harus diperbarui ini khusus untuk kepala balai-balai pendidikan.

Tadi saya baca-baca bolak-balik adapula Pak Samsu Niang disitu. Tapi sudahlah sudah betul itu di Makassar cuma waktu ke Medan kenapa tidak ada Muhammad Husni begitu Pak Ketua? Makanya mulai dari sekarang saya harus pesan ini dulu sama Pak Hartono Laras ya, habis dari tadi saya lihat mana foto saya kok tidak ada? Saya kira itu saja Pak ya lebih dan kurang saya mohon maaf.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum'salam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Husni, selanjutnya dari Golkar Bu Endang atau Pak Ali, silakan Bu Endang.

F-P GOLKAR (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi VIII.

Pak Sekjen Pak Hari dan seluruh Dirjen yang beserta seluruh jajarannya Pak Dirjen semuanya.

Kita menghemat waktu saja. Terima kasih sekali atas paparannya sudah disampaikan mulai dari Pak Sekjen yang sekaligus juga PLT Pak. Sedikit saja karena sebetulnya sudah disampaikan banyak oleh Pak Bukhari, jadi saya hanya menambahi saja. Yang pertama Pak mengenai. Jadi secara global saja. Yang pertama seberapa efektif penyuluh-penyuluh yang ada? Karena dari masing-masing Dirjen inikan ada pendamping, ada penyuluh ada TKSK kemudian masih ada yang lainnya. Ada Pensos dan sebagainya.

Kalau saya *simple* sebetulnya bagaimana orang boleh banyak, tetapi mungkin dengan *capacity building* seperti diberikan *capacity building* penyuluhan sosial sekian banyak, setiap desa kali berapa orang Pensos dan sebagainya. Ini mencakup untuk *capacity building* adalah mencakup, sehingga mereka masing-masing ketika memberikan penyuluhan ke bawah ini satu frame ketika mengadakan penyuluhan ke bawah satu frame, framenya itukan Kementerian Sosial.

Kemudian mereka tidak membawa terkesan misi pribadi atau tadi kalau saya boleh perjelas apa yang disampaikan Pak Husni itu sebetulnya bukan Kemensos Pak, tetapi ini seolah-olah justru pendamping ini takluknya pada bupati bukan pada Kemensos Pak.

Jadi yang sudah apa kata bupati kebanyakan. Nah itu dia jadi kita mengadakan pengawasan juga agak sulit begitu ya mengadakan pengawasan agak sulit. Nah ini tentunya perlu ramuan khusus bagai Kemensos bagaimana caranya meramu sehingga efektif, mungkin mereka tujuan dari Kemensos tepat sasaran efektif dan efisien itu maksudnya. Masyarakat berdaya karena penyuluhannya efektif, efisien dan satu frame itu tadi. Dengan banyaknya apa namanya penyuluh dan pendamping ini mereka masing-masing sendiri akhirnya data ini tidak terpadu Pak. Kalau kita harapkan menjadi terpadu dulu dengan semenjak zamannya Bu Khofifah kita berharap satu pintu untuk segala jenis bantuan itu datangnya satu tidak masing-masing berbeda.

Nah kita berharap ini *next*-nya ada perbaikan-perbaikan di sana kemudian kita berharap bahwa tidak hanya sekedar di sini ada catatan penyuluh sekian apa setiap kali begitu Pak. Tetapi juga mungkin pelibatan rekan-rekan untuk lebih memperkuat di bawahnya, kemudian pengawasannya sekaligus kita bisa melihat pengawasan ya mungkin kita bisa juga barengan, begitu maksud saya yang ini tadi yang sosialisasi dan sebagainya itu tadi.

Kemudian kita berharap bahwa apa yang disampaikan Pak Rudi, Bu Menteri dulukan minta cepat-cepat. Nah nampaknya kita dan rekan-rekan itu sudah ditanya berkali-kali jangan hanya PHP begitu. Kita berharap ini ada

percepatan juga apa namanya oleh Bapak, sehingga ketika ini ada percepatan penyerapannya juga akan lebih maksimal. Karena ini sudah mendekati akhir tahun.

Kita berharap kalau percepatan di Bulan Agustus kesini suatu saat ketika pembahasan anggaran realitasnya penyerapannya bagus dan ini adalah multi player efeknya, betul-betul dirasakan oleh masyarakat mengapa tidak kita untuk selalu push anggaran itu untuk lebih bisa dimanfaatkan kepada masyarakat? Meskipun realisasinya ada yang 61 ada juga yang realistis hanya 60 dan ada yang kurang, saya kira ini nanti bisa terselaraskan Pak harapan kita seperti itu.

Kemudian untuk sistem penyaluran. Mungkin Kemensos perlu memikirkan kembali cara terbaik, jika selama ini kita melihat Bu Menteri masih harus sampai marah-marah, itu berarti kan harus ada yang kita pikirkan upaya terbaik dalam sistem penyalurannya. Sistem penyalurannya yang terbaik bagaimana? Kan data yang pegang siapa yang menyalurkan, siapa akhirnya terjadilah *misleading* seperti itu begitu maksudnya, ini perlu menjadi pemikiran bagi Kemensos dan kita semua karena faktanya dengan adanya perbedaan orang Kemensos seperti hanya menyalurkan uang ini di bawahnya terjadi banyak hal.

Atau kalau pun seperti itu orang kemudian berpikinya hanya dalam arti, dalam arti tanda kutip saja nah kita berharap dengan perbaikan ke depan ini Pak sistem penyaluran, progress itu baik BPNT, BST dan sebagainya citra dari Kementerian Sosial itu semakin lama semakin bagus tidak ada lagi misalnya. Kemarin ada kasus-kasus korupsi ini akan sirna itu kan dimulai dari Bapak sendiri. Dari ini-ini beberapa yang kita lihat. Disalurkan melalui Pos ternyata juga sama alamatnya yang pegang siapa, kemudian yang menyalurkan siapa al-hasil ternyata seperti itu.

Kemudian yang Himbara pun sama. Ternyata dari beberapa kunjungan kita mengamati bahwa banyak sekali sebetulnya mereka karena tidak ada data ini akhirnya menjadi persoalan dari beberapa Kepala Daerah. Ada yang menanyakan itu karena tidak punya data. Tapi memang sudah dijawab bahwa itu bisa saja minta. Jadi ini kan saya kira apa namanya keterbukaan ini penting bagi semua, sehingga apa *trust* yang diberikan kepada Kemensos lambat laun akan semakin menguat harapannya seperti itu Pak untuk semua saya kira. Dan bagaimana program-program ini memang seluruhnya dari apa dari Kemensos juga *fair* kepada Komisi VIII, Komisi VIII juga memberikan salinglah, saling menguatkan untuk semua program dan percepatannya dengan harapan yang saya sampaikan dimuka Pak, jadi tidak ada lagi di belakang beda cerita Pak. Ini mohon maaf apabila yang saya sampaikan hanya secara garis besar karena yang awal akan saya sampaikan kebetulan sudah disinggung oleh Pak Bukhory jadi tidak perlu saya ulangi kembali.

Semoga bantuan-bantuan baik, kearifan lokal kemudian apa namanya kearifan lokal, kemudian rumah tidak layak huni, kartu miskin, ini benar-benar sampai pada tangan mereka karena ini sudah menjelang akhir tahun. Untuk rumah tidak layak huni di tempat saya yang sudah saya ajukan, akhirnya tersapu habis oleh puting beliung. Jadi saya semakin sedih karena bantuan belum sampai rumahnya sudah hilang. Jadi kita mau bagaimana lagi ini Pak semoga ini tidak kalau segera turun semoga tidak sampai rumah-rumah yang lain juga menjadi hilang. Sebelum hilang sudah diperbaiki sehingga orang betul Kementerian Sosial ada.

Harapan terakhir Bapak, dari masyarakat ini sampai saya menahan rasa sedihnya itu. Harapan terakhir masyarakat itu pada kita Bu kalau kita sama Pemerintah daerah sama pendamping sama dinas sudah bantuan itu tidak pernah sampai ke kita, ketika Ibu datang ini ternyata kok ternyata kok tidak juga bisa hadir berarti saya sudah tidak bisa berharap apa-apa pada negara.

Nah ini semoga Bapak-bapak yang mendapatkan amanah bisa mewujudkan harapan mereka Terima kasih mohon maaf Pak Ibu jika ada salahnya.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bu Endang, selanjutnya dari PDI Perjuangan, siapa Bu Ina atau Pak Samsu Niang?

F- PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Senior.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VIII
Pak Sekjen yang baru ini ada *lokir* ya Pak kalau main catur Pak Hartono Laras.

Yang terhormat para Dirjen beserta jajarannya.

Saya hanya ingin menambahkan saja, tadi sudah dikupas panjang lebar oleh rekan-rekan saya, saya mengapresiasi pada saat membuat mitigasi bencana di Pacitan. Yang mana ini kalau diprediksi oleh BMKG dan potensi bencana seperti tsunami Aceh jadi mungkin lebih besar karena skala richter-nya diperkirakan lebih tinggi.

Namun saya meminta agar *me-monitoring* agar kesiapsiagaan ini ketika ada bencana juga sudah siap siaga. Karena kalau hanya mitigasi setelah itu ditinggalkan tanggal apes tidak ada di kalender Pak. Jadi oleh sebab itu kita siap-siap di sekolah-sekolah. Atau kemarin yang sudah diberikan titik-titik kumpul di monitor sejauh mana sudah diadakan. Karena kalau umpama tidak ada monitor seperti jembatan yang sudah kita saya tinjau kemarin untuk titik kumpul kalau umpama tidak ada monitor itu tidak akan terjadi.

Saya tahu kalau Pak Linjamsos pasti akan konsen, namun tidak berhenti dalam mitigasi yang ada di daerah saya. Saya berkonsen juga untuk daerah-daerah yang diprediksi untuk adanya sungguhpun tidak tsunami atau bencana yang lain tolong Pak Dirjen Linjamsos lebih respons apabila siapa pun yang melaporkan ke Bapak.

Nah yang kedua Pak PFM. Saya di untuk Rutilahu banyak kendala ini. Karena begini, ada rakyat yang masyarakat miskin tetapi dia sudah 20 tahun 10 tahun hanya menempel di kepala desa atau desa-desa dan tanahnya bukan miliknya itu tidak bisa Pak. Bahkan, padahal kita melihatnya cuma hanya pakai bambu supaya tidak kehujanan tapi kan tidak bisa menolongnya. Nah mungkin ada regulasi yang untuk bisa menolong hal-hal yang seperti ini artinya bisa dinamis Rutilahu ini, bagaimana kalau umpama memang yang kita lihat ini kalau umpama secara politik satu tambah satu tidak harus 2 Pak tetapi ini harus bisa ditolong. Bagaimana cara regulasinya masyarakat yang seperti ini?

Nah mengenai Resos tadi disini halaman 20, halaman 20 estimasi target yang akan dilayani dalam tahun anggaran 21 mengenai anak yatim sebanyak 20.000 dengan besaran 939.000. Nah maksud saya begini Pak ini barometernya darimana? Karena laporan yang kita sampaikan mungkin belum terserap karena baru sampai kepada staf ahli staf ahli yang disampaikan. Oleh sebab itu saya mohon penjelasannya ini sudah keluar angka yang halaman 20 ini?

Nah juga mengenai regulasi anak yatim yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Bukhori sehingga ini akan negara harus hadir ditanggung oleh negara. Sehingga ketika ada anak yatim tidak perlu lagi dia mendapat belas kasihan tetapi sudah menerima haknya untuk dia sudah mentas sekolah. Jadi tidak lagi saya lapor anak yatim cari-cari tidak kalau sudah regulasi suatu sistem otomatis dia tercatat dan dia mendapatkan hak-haknya sesuai daripada undang-undang. Mungkin nanti juga saya usul ada Undang-undang untuk anak yatim sehingga sudah ada tertera di situ ketika ada anak yatim. Mungkin di dalam klausulnya nanti ketika sudah ada orang tuanya yang bertanggung jawab itu akan tergradiasi mungkin ada klausul yang seperti itu.

Nah terakhir sedikit lagi mengenai UMKM Pak Eddy. Kalau umpama UMKM itu pasti mereka mempunyai group dan mempunyai usaha yang agak besar. Tapi masalahnya pedagang-pedagang kecil yang cuma mereka butuh cuma Rp5.000.000.0000,- Rp2.500.000,- Rp3.500.000,- itu bagaimana mintanya? Karena dia cuma hanya berdagang di sekolah-sekolah SD yang mana dia tidak mengerti apa-apa. Nah oleh sebab itu nanti saya mohon bagaimana caranya untuk membantu pedagang-pedagang kecil ini apa penyampaiannya?

Nah satu lagi Pak sedikit lagi satu lagi. Nerkaitan dengan program pejuang muda yang diminati berdasarkan data yang disampaikan hingga sekarang sudah terdapat 11.109 mahasiswa. Artinya melebihi target yang ditetapkan secara jumlah. Pertanyaan kami bagaimana realisasi kerjasama program tersebut dengan Kemenbud Ristek terkait dengan jumlah SKS yang diusulkan dan durasi waktu? Mohon dijelaskan.

Satu lagi untuk Pak Hartono Laras, Poltekesos inikan menghasilkan pekerja sosial ya Pak? Ya tadi sudah dibahas oleh teman-teman kita semua bahwa ketika masuk Poltekesos. Hati kita inikan sudah untuk bekerja sosial. Nah oleh sebab itu jangan di dalam *mindset*-nya itu hanya memberikan sembako, terus juga makan gratis tetapi juga ditingkatkan SDM-nya. Ini saya memberikan masukan untuk dosen-dosennya Pak karena menurut saya ketika dosen itu mempunyai skill yang lebih dari mahasiswanya dan disiplin dan juga dengan praktek-praktek tentunya anak didiknya juga akan segan. Seperti apa namanya STAN betapa susahnyanya masuk STAN.

Maksud saya kalau umpama Poltekesos dibuat seperti profesional, apa SDM-nya ditingkatkan pentingnya semua orang akan berlomba-lomba ke Poltekesos dan itu menjadi prioritas dan harapan bagi orang tua yang ingin mendaftarkan ke situ. Itu saja yang saya sampaikan.

Wa Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang lain nanti minta juga Pak. Tuh kan pasti ada tambahan. Karena kita tadi menyepakati Pukul 15.00, ini kita perpanjang ya kita perpanjang setengah jam jadi 15.30.

(RAPAT: SETUJU)

Kita kasih kesempatan atau bagaimana tuh kan jadi banyak Pak. Oke saya kasih waktu 2 menit ya silakan.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Sekjen. Selamat ini Pak Sekjen baru. Begitu juga Pak Badiklit Pak Hartono selamat juga ditempatnya, kalau Pak Hartono barangkali sudah menempati posisi-posisi semua jadi sudah *khatam*.

Saya cuma ingin katakana Pak *simple* saja saya mau sampaikan. Bahwa Anggota DPR inikan waktu Bapak itu tinggal 3 bulan praktis 3 bulan Pak. Anggota DPR mau Reses tanggal 7, sebagai sinergi dengan Bapak apa kira-kira yang bisa dibawa di Dapilnya masing-masing Anggota DPR ini Pak? Intinya disitu Pak intinya disitu Pak. Kenapa ini kita melakukan evaluasi anggaran 2018? Kalau berbicara anggaran 2021 titik komanya saya sudah tahu semua Pak. Sudah paham semua ini sudah mengerti. Karena sudah berapa kali kita bahas tinggal apa yang harus dibawa ke Dapil dalam rangka untuk reses Anggota DPR dalam waktu dekat ini sebagai sinergitas antara Komisi VIII dengan Kementerian Sosial Pak.

Saya kira itu yang paling utama, tidak perlu banyak-banyak terori disini yang perlu *action* begitukan yang dibutuhkan Anggota Komisi VIII itu bagaimana program-programnya Bapak itu yang realisasinya masih banyak itu yang belum terselesaikan kita percepat bersama-sama Pak. Kita sama-sama ke lapangan untuk mempercepat bagaimana realisasi terselesaikan dengan baik tanpa dan Bapak lagi mendapatkan WTP. Itu yang kita harapkan Pak, jadi kita hanya mendorong kalau capek-capek mendorong ya apa namanya membantu Bapak supaya cepat-cepat selesai realisasi 100% ini. Ini barangkali mungkin dari Badiklit, kemudian Linjamsos, Dayasos, Rehapsos. Saya kira itu semua itu yang harus kita cepat-cepat itu menyelesaikan program-program yang ada kemitraan dengan Komisi VIII.

Saya kira itu Pak Ketua, saya karena itu tinggal apa yang mau dibahas tinggal 3 bulan ini sudah selesai semua Pak titik koma anggarannya Bapak, saya sudah paham semua baru saya lihat tadi sudah paham ini. Ini tinggal mau dibantu Bapak ini menyelesaikan program-programnya ini saya kira begitu mengenai masalah PKH BPNT itu kan sudah berjalan dengan baik memang kesalahpahaman saja itu. Saya kira itu saja Pak terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Ya mohon singkat ya Bu Wulan.

F – P NASDEM (Hj. SRI WULAN S.E) :

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati.
Pak Dirjen dan juga Pak Sekjen
Serta Undangan.

Salam sehat selalu, harus selalu sehat.

Jadi tambahan sedikit. Tadi kalau misalnya kita sampaikan bahwa penyerapan inikan kita lihat banyak yang kurang begitukan. Sama saya senafas dengan Pak Samsu tadi, kita sebenarnya membantu bagaimana untuk pencapaian target di lapangan itu satu.

Terus yang kedua, hal yang paling penting ini juga masukan dari Dapil Pak. Jadi sebenarnya sama mau sampaikan *rodo-rodo* sedih begitu. Jadi ini ada yang titip di saya jadi tali asih untuk TKSK itu ada yang belum sampai sekarang Nah ini seperti apa? Jadi nanti saya mohon nanti segera diselesaikan, terus kemudian ini juga untuk honor BPNT itu juga belum diselesaikan juga jadi terakhir diselesaikan pada bulan Agustus padahal September itu belum. Terus kemudian yang TKSK itu juga belum jadi tolong menjadi perhatian khusus ini juga termasuk dalam penyerapan juga.

Terus kemudian ini juga ada titipan bahwa terkait untuk Permensos di 92 mengenai bantuan peserta bantuan. Nah ini kalau saya boleh bacakan yang di non aktifkan terkait PBI, JKN, KIS Se-Indonesia kalau tidak salah 12.69 Juta Jiwa. Tetapi untuk khususnya BNBA Kabupaten Grobogan yang salah satu dari Dapil saya itu sekitar 46.000 yang di non aktifkan BNBA-nya dan belum bisa dilihat sekitar 160 yang keseluruhannya sekitar 160.000. Nah ini mohon jadi tolong dipermudah untuk akses pembukaan datanya, karena inikan nanti berimbas di dalam pelaksanaan di lapangan. Itu yang saya harap bahwa ini semua jadi perhatian. Jadi nanti tanggal 7 kita Reses ini sudah ada hasilnya saya nanti bertanya dengan TKSK sudah terbayarkan semuanya pendamping-pendamping juga sudah.

Terus kemudian yang kita perlu tanya tadi dari penemuan dari Irjen, bahwa ada banyak hal tadi temuan-temuan di lapangan. Kita menanyakan apasih setelah kita temukan itu aksi selanjutnya itu apa evaluasi apa dari hasil yang ditemukan? Terus kemudian kalau kita berbicara tentang pejuang muda, pejuang muda yang akan mendampingi PKH. Jadi ini sebenarnya tidak bisakah untuk PKH ini sendiri dioptimalkan dalam kerja? Karena kita lihat tadi yang untuk pejuang muda akan pelaksanaannya adalah Oktober. Sedangkan

ini sudah Oktober perekrutannya bagaimana? Terus targetnya tadi yang disampaikan sama rekan terdahulu juga tidak jelas. Inikan juga bagaimana kita mencoba mengoptimalkan tenaga-tenaga kita yang ada karena ini juga banyak refocussing untuk Covid, apakah tidak sebaiknya di evaluasi terlebih dahulu kemudian betul-betul kita manfaatkan yang sudah ada sehingga ini nanti tidak tumpang tindih kerjanya. Karena kita tahu bahwa inikan pendamping-pendamping ini banyak sekali namanya ada TKSK terus kemudian ada PKH dan ada ya lain. Jangan sampai ini nanti jadi mubazir akhirnya karena kita berharap bahwa kerja efektif dan efisien itu yang kita perlukan. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bu Wulan Pak Jeffry mohon singkat ya.

F- P. GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Bismillahirrahmannirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi VIII.
Dan juga Pak Sekjen dan juga para Dirjen.

Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Hari Hikmat dan juga Pak Hartono Laras atas jabatan yang baru. Semoga bisa bekerja secara maksimal untuk bangsa dan negara.

Kemudian yang kedua, setelah melihat dari pada paparan saya sangat menyayangkan bahwa realisasi anggaran tahun 2021 ini terserapnya di Kesekjenan ini cuma 17,55% yang harusnya ini tentu bisa dimaksimalkan dan dapat bermanfaat digunakan bagi kemaslahatan masyarakat. Satu yang menjadi pemikiran saya tadi disampaikan oleh Pak Sekjen ya? Bahwasanya salah satu yang mengapa penyebab itu belum terserap ya itu adalah beberapa kegiatan yang tadinya direncanakan di hotel kemudian ditarik ke balai kita seperti itu ya? Kemudian juga ya setidaknya kalau saya pikirkan mungkin kalau kegiatan itu dilaksanakan di hotel saat ini mungkin juga bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitarnya. Saat ini kan banyak dunia pariwisata dan lain-lain memang itu lesu seperti itu.

Kalau misalnya kegiatan itu nanti diadakan mungkin juga bisa menggerakkan perekonomian sekitarnya seperti pedagang-pedagang kecil, kemudian juga mungkin penerbangan bisa lebih banyak dan lain-lain. Saya juga ada cerita kawan ke satu tempat bahwasanya sepi dan ketika mau cari tempat itu katanya susah katanya seperti itu barang kali ya? Karena orang-orang di sekitarnya juga kesulitan dari sisi ekonominya.

Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan sama juga mungkin yang dibahas teman tadi program pejuang muda. Program pejuang muda ini tentu saja juga mempertanyakan tujuannya ini untuk apa? Kalau misalnya untuk pemutakhiran DTKS ini seharusnya bisa dilaksanakan oleh Pusdatin atau pilar-pilar yang ada di Kemensos yang lainnya. Kalau misalnya dengan kehadiran pejuang muda ini barunya secara otomatis pasti bersamaan juga ada anggaran yang keluar pasti tidak sedikit. Belum lagi tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad ya sisi mungkin mereka bisa saja belum berpengalaman barangkali seperti itu. Jadi tidak tahu bagaimana rasanya melakukannya dan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari hukum ini juga setelah itu ya hasilnya pun kalau misalnya ada bagaimana ya tentu itu harus menjadi saya rasa akan menyebabkan ada pekerjaan berikut barangkali seperti itu.

Dan kemudian untuk Dirjen Resos ini ada beberapa catatan menarik. Pertama ini penyandang disabilitas di Resos, penyandang disabilitas ini Pagunya ini tertinggi kemudian juga penghematan juga tertinggi dalam tiga tahap sampai Rp70.000.000.000,- dan juga dalam 3 tahapan penghematan terjadi penambahan anggaran. Artinya pengamatannya dialihkan ke penerima manfaat dan dari sudut realisasi penerima manfaat sudah terealisasi 70% dari target. Nah saya mohon penjelasan ini kenapa realisasi anggaran penyandang disabilitas ini rendah di bawah 50%? Padahal sudah ada pengamatan 75% penurunan anggaran belanja modal dan juga realisasi target penerimaan manfaat sudah mencapai 75%. Demikian mungkin dari saya terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Bapak Ibu sekalian.

Jadi ke mana-mana 1 menit saja ya.

F – P GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Saya dari 2 menit 1 menit saja singkat saja.

Pimpinan terima kasih.

Pak Sekjen dan Pak Dirjen yang saya hormati.

Terkait tentang beberapa program. Ini karena mau mempersingkat dari pertanyaan dari masing-masing Dirjen. Terkait program-program dari

Kementerian Sosial mulai dari Rutilahu, kemudian ada dana hibah dan sebagainya itu terkadang di beberapa kabupaten tertentu ada kendala yang kita temui dari misalnya pemerintah daerah.

Tidak semua kabupaten, tetapi ada Kabupaten yang kemudian ketika di lapangan harus membuat sebuah proposal yang ditujukan di Kementerian Sosial terhambat di dinas sosial. Ini misalnya saya temukan langsung. Tetapi ada juga Program yang tempo hari Bu Menteri menyarankan agar langsung saja ditujukan kepada Kementerian Sosial tanpa rekomendasi dari dinas sosial dan itu jauh lebih efektif. Tetapi program-program yang lain masih harus melalui dinas sosial dan itu banyak kendala, sehingga program yang kita ajukan untuk ke Kemosos tertunda karena masih belum mendapatkan rekomendasi.

Yang kedua, soal Rutilahu *alhamdulillah* yang dari kami sudah kita ajukan semua. Tetapi tidak ada kendala hanya satu misalnya yang kita temukan yang tadi juga disinggung oleh beberapa kawan adalah kepemilikan tanah. Beberapa waktu yang lalu ini sudah saya handle sendiri Pak Dirjen, Pak Sekjen, ada seorang bocah di Dapil saya yang mengidap penyakit kelainan jantung dan liver yang kemudian saya langsung turun *on the spot*. Langsung saya bawa ke rumah sakit saya tangani sendiri. Tetapi *pasca* dari itu kita pantau terus Pak tetapi kemudian setelah itu saya menanyakan ternyata rumah tersebut adalah beliau menumpang di rumah tetangganya yang secara ikhlas memberikan. Tetapi ketika kita mengajukan Rutilahu dia tanahnya bukan milik. Atau bahkan bukan hanya tanah sebuah KTP saja mereka terkadang kita temukan masih belum punya.

Nah mungkin solusinya bagaimana terima kasih Pimpinan, saya hitung 1 menit kurang 12 detik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Ya Ibu datang saja ke sini Bu, oke Bu ini dari memang belum ada silakan Bu singkat ya Bu.

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

(suara tidak ada 3.52.31)

F – P GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Pimpinan, izin sebentar tidak mau tanya hanya menambahkan untuk Dayasos itu di halaman 5 itu ada prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 6 pertanyaannya 3,4,5. Itu saja terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.):

Bisa langsung dijawab deh kepada Kementerian Sosial. Mohon izin Pak Hari, ini Pak Komang jarang tanya jadi dia tanya senang juga ini.

F-PDI P (I KOMANG KOHERI, S.E):

Terima kasih Pimpinan

Ini yang kami hormati Pak Sekjen dan Pak Dirjen.

Yang kami ditanyakan di Dirjen Rehabilitasi Sosial ini berkaitan dengan apa namanya program IPWL (Intruksi Penerima Wajib Lapor). Kemarin kami melakukan kegiatan dengan Ibu Menteri Sosial, kami menginginkan ada pencanangan dari IPWL Intruksi Penerima Wajib Lapor yang jumlahnya 172 lembaga IPWL. Dan yang kita tanyakan anggarannya cukup besar Rp110.000.000,- dan sampai mana di daerah mana saja? Ibaratnya itu karena beberapa sekarang ini yang melakukan rehab ini Bu Ketua ini ada biaya yang cukup besar juga 25 di luar itu yang standarnya tidak ada yang banyak saudara-saudara kita ini yang terkena korban daripada narkoba. Ini sepertinya kemarin saya tanya juga Bu Menterinya juga tidak mengerti tentang itu.

Jadi mohon kiranya karena ini program daripada Pak Presiden tentang darurat narkoba, ini kita berharap semua kita ini menjadi selain Bansos ini kita berharap masalah narkoba ini juga penting sekali demi untuk menyelamatkan generasi muda kita ke depan. Itu mungkin terima kasih Bu Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya terima kasih Pak Komang, kita sudah lihat dan sudah dicermati sudah direspon juga oleh teman-teman Komisi VIII. Memang yang agak mengawatirkan ini penyerapan untuk beberapa tentunya Dirjen atau satker yang masih di bawah 50%. Karena inikan sudah masuk 2/3 atau 3/4 tahun ya tinggal 3 bulan sampai akhir tahun dan harus segera tutup buku. Kalau rapat sebelumnya kita berlomba-lomba ingin anggaran dinaikkan begitu tapi jangan di akhir tahunnya kok penyerapannya minim begitu. Terutama ini Pak Sekjen juga cuma 17,5% di Kesekjenan. Nah saya tidak tahu metode apa kalau sampai 17,5% ini untuk kebut-kebutannya bagaimana di akhir tahun ini? Tentunya kita ingin dapat gambaran atau kayak Pusdatin iya kan itu juga

rendah sekali itu sementara persoalan sinkronisasi data itu hampir di setiap pelosok tanah air itu menunggu sementara anggaran yang kita anggarkan itu ternyata terserapnya sangat rendah.

Apakah ada di tengah dinamika di Kementerian Sosial, apakah ada rencana efisiensi begitu ya? Sehingga ada beberapa yang kemudian karena referensi efisiensi itu jadi penyerapannya rendah itu misalnya kayak tadi tidak menggunakan fasilitas hotel untuk pelatihan dan atau untuk acara-acara yang biasanya di hotel. Itu mungkin semangatnya efisiensi. Tapi ada beberapa yang dalam kerangka kinerja ini harus kita cermati juga ada persoalan apa gitu kok penyerapannya sampai menjelang akhir tahun ini masih di bawah 50%? Nah itu yang kita tangkap tadi oleh beberapa kawan mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman dari Kementerian Sosial silakan Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Baik, Para Dirjen Kepala Badan dan Pak irjen mendahului saya menjawab tanggapan dari Komisi VIII. Pertama yang kami rasakan secara riil untuk 2021 ini memang terdampak pandemi Covid, PPKM itu bukan suatu keniscayaan yang harus kami hadapi sisi lain kami harus tetap bertugas ke lapangan demi untuk kemanusiaan. Dan itu Bu Menteri sangat komit untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan sosial apa pun bentuknya itu bisa sampai ke masyarakat. Karena itulah upaya keras yang dilakukan oleh semua Direktorat Jenderal untuk menyalurkan bantuan itu terus dilakukan dan juga menugaskan berbagai perangkat yang dimiliki, apakah itu pendamping di balai pegawai di balai pendamping PKH pendamping BPNT semua bekerja.

Tetapi dibalik itu, saya kira saudara kita selalu ditemukan di WA grup dalam keadaan berdampak Covid dan banyak sekali pendamping PKH pendamping BPNT, pendamping Resos yang harus meninggalkan dunia ini dunia fana ini karena menjaga menjalankan tugas. Jadi itu kondisi itu yang membuat semangat kami tetap tumbuh tetapi kami juga harus berhitung harus rasional untuk menjalankan misi kemanusiaan tapi sisi lain keselamatan dari SDM yang kita tugaskan juga tetap diperhatikan.

Upaya *refocussing* terus menerus dilakukan di masing-masing Dirjen dan itu tampak nanti di dalam pengawasan Dirjen. Kami sadari juga untuk menyiapkan protokol kesehatan dengan APD juga tidak mudah begitu sehingga ada saja temuan-temuan tapi itu satu risiko. Tapi yang jelas PPKM memang menjadi salah satu faktor membuat realisasi dari Program-program Kementerian Sosial tidak selancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Perkiraan bulan Juli, Juni sudah 50% balai-balai itu masih ada merangkap di 20-30%. Karena Balai tidak bisa menyediakan fasilitas untuk PM yang PM-nya pun dalam keadaan terpapar Covid kita sering kali Lockdown kemudian masuk lagi PM sempat kita semangat sampai 100-200 1 balai ternyata 60% terkena Covid jadi terpaksa *lockdown* lagi.

Jadi kalau melihat realisasi di Resos masih juga sangat terbatas termasuk penyandang disabilitas itu dampak dari resiko terpapar Covid yang begitu tinggi di balai-balai. Sehingga Protokol kesehatan diperbarui-diperbarui lagi dari Pak Sekjen terdahulu seringkali mengirimkan surat edaran keseluruh Satker untuk memperhatikan prokes. Ibu Menteri seringkali meminta tiap hari Senin harus dilakukan *swab* Antigen bahkan sekarang PCR dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang dilakukan tetapi tetap secara psikologis secara mental secara semangat memastikan time line itu berjalan sesuai dengan rencana itu terpengaruh cukup tinggi akibat dari Pandemi Covid ini.

Kemudian yang kedua keberadaan para pendamping SDM dalam saat ini sedang dikaji oleh Bu Menteri beserta jajaran para Eselon I. Bu Menteri merencanakan tidak lagi pendekatan berdasarkan program yang cenderung tadi ditemukan cenderung parsial mungkin fragmentaris masing-masing program mungkin memperhatikan capaian tujuan dan sasaran. Padahal disebutkan tujuan sasaran yang sama untuk mengatasi kemiskinan mengatasi kerentanan orang memotivasi mereka untuk berdaya dan sebagainya. Tapi di lapangan *over lapping* tugas kemudian juga ada.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Interupsi Pimpinan sebelah kiri. Izin interupsi Pak Sekjen. Ini saya sama kawan-kawan belum dapat jawaban yang agak detail Pak. Ini kalau saya amati *ngambang* maksudnya Pak Sekjen. Kami ingin tahu dengan anggaran yang sekian ini yang terbatas punya kendala apa begitu di lingkungan Kementerian apakah kendalanya kami membuat anggaran perjalanan dinas kebanyakan? Misalnya begitu Pak Sekjen jadi sekarang tidak bisa kami lakukan itu jawab Pak Sekjen.

Kedua, misalkan kami tidak lakukan sekarang secara Zoom untuk menyurvei jawab Pak Sekjen. Jadi harus detail begitu jangan mengambang ini karena kalau hanya untuk mengeksekusi anggaran kalau survei itu dilakukan tidak mesti turun ke bawah Pak. Staf Bapak itu begitu, bisa terealisasi semua itu malahan dengan Zoom itu tampak itu Pak digital media itu tampak Pak begitu itu kami mau jawaban yang detail Pak. Terima kasih saya kembalikan Pimpinan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Saya baru masuk nomor 2 ini Pak. Jadi secara umum hambatan yang ditanyakan tadi PPKM detailnya saya kira sudah saya kira sudah *clear* tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, mengenai SDM sayakan tidak harus satu persatu kalau satu persatu bisa berapa jam menjelaskan. Yang kedua mengenai SDM BU Menteri sudah mengarahkan untuk melakukan integrasi

dari pendampingan, sistem pendampingan ini Tusi dari Kesekjenan terkait dengan penyiapan SDM. Karena itu akan ada revisi Permensos yang Nomor 16 Tahun 2017 untuk memastikan bahwa SDM pendamping itu terintegrasi dari pendekatan program ke pendekatan teritorial.

Oleh karena itu nanti bukan lagi di kecamatan itu ada pendamping PKH ada pendamping BPNT, ada pendamping Resos, ada pendamping dan macam-macam itu ada 17 kategori Pak sekarang nanti menjadi pendamping Kecamatan A, pendamping Kecamatan A di situ ada koordinatornya dan ada anggota dari tim pendamping sosial. Dan ini sejalan dengan kebijakan yang dari Bappenas agar ada sinergi antar pendamping. Kelak nanti bukan hanya pendamping dari Kementerian Sosial tetapi akan diintegrasikan juga pendamping dengan PDT dengan pendamping di kementerian dan lembaga lain itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendamping.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan realisasi anggaran di Kesekjenan. Saya secara efektif baru seminggu menjadi Sekjen pada saat persiapan untuk mengikuti RDP ini saya mencoba memetakan apa yang menjadi *bottleneck* dari realisasi tersebut. Kalau dari sisi anggaran misalkan untuk Pusdatin sebetulnya Pusdatin berproses sekarang sudah melakukan pelaksanaan kegiatan. Realisasi memang baru Rp25.9Miliar untuk Pusdatin dari 697 sehingga sisa realisasi 671. Tapi dalam proses penyerapan sekarang pengadaan perangkat dan sistem informasi itu sekitar Rp111.4Miliar, dalam posisi proses lelang sehingga pasti akan mengalami peningkatan untuk direalisasikan.

Kemudian ada anggaran pejuang muda yang per Oktober ini akan mulai terealisasi secara keseluruhan memang Rp172.000.000.000,- sehingga ini berproses nanti bulan Oktober, November, sampai Desember untuk Rp172.000.000.000,-.

Kemudian ada rencana alokasi ke Dirjen PFM untuk bayar biaya salur BST bulan Maret dan April ke PT.POS ini Rp122.000.000.000,- . Jadi ini yang mungkin butuh kecepatan tinggi untuk merevisi karena sudah alih antar Satker antar Eselon I dari Sekjen dari Pusdatin ke PFM ini yang perlu segera mungkin dan sisa ada 265, 265 sudah dipastikan untuk kegiatan penyiapan *warehouse*. Jadi semacam sentra pengaduan di Cawang Kencana, sehingga ada renovasi ruangan dan juga penyiapan peralatan IT maupun sarana prasarana lain plus juga untuk *command center*. *Command center* ini sudah berjalan tinggal ibaratnya pembayaran untuk tahap termin I dan II. Jadi saya optimis kalau melihat pemetaan seperti ini Pusdatin bisa merealisasikan seoptimal mungkin dan mungkin bulan-bulan depan sudah nampak perkembangan yang signifikan. Karena kalau di satker lain selain pada Pusdatin yang ada di Sekjen itu realisasinya sudah di atas 43%. Jadi karena

ada di Pusdatin yang 3.72 itu yang membuat Kesekjenan terpengaruh menjadi 17,5%.

Begitu itu juga yang ada di Biro Umum, begitu juga dengan belanja modal terutama yang di Biro Umum itu saat ini ada Rp19.000.000.000,- pekerjaan tahun lalu yang belum terselesaikan ini sedang diperiksa oleh KJPP kalau ini bisa selesai dalam bulan ini dan dapat persetujuan dari DJPB ini Rp19.000.000.000,- bisa terealisasikan.

Dalam posisi sekarang proses renovasi untuk di gedung Salemba dan juga Cawang Kencana baik untuk ruangan, taman peralatan, mesin termasuk AC dan sebagainya itu sedang berlangsung. Dan memang penyediaannya secara bertahap jadi tidak dalam bentuk kontraktual dalam bentuk yang sangat besar tetapi bertahap sesuai dengan kebutuhan. Sekarang yang jelas AC semua itu diperbaiki akan disentralkan itu diselesaikan. Taman relatif sudah 80% selesai jadi rincian-rincian itu saya perhatikan semua saya coba cermati dan ekspektasi saya pada saat bulan Oktober-November untuk belanja modal di khusus di Biro Umum itu bisa terealisasi dengan optimal. Itu penjelasan saya mengenai anggaran yang di Kesekjenan yang relatif rendah. Tapi ini tetap menjadi masukan penting untuk di pantau untuk dipastikan timelinenya bahkan mungkin nanti akan kami cek betul secara detail kapan termin per terminnya bisa diselesaikan dan jangan sampai nanti takhkir tahun dalam posisi siap.

Kemudian yang berikut untuk anak yatim. Kami berterima kasih atas dukungan dan juga saran yang kongkrit tentang perlunya regulasi pada tingkat negara bahkan mungkin dalam bentuk Undang-undang untuk Perlindungan Sosial bagi anak yatim ini. Kalau diperlukan nanti akan kami siapkan juga nanti apakah itu inisiatif dari DPR atau dari Pemerintah, saya kira bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi paling tidak rencana untuk Permensos memang sedang dalam proses di Biro Hukum, sementara untuk pedoman teknis atau pedoman operasional itu sekarang sudah tahap finalisasi. Sehingga nanti pelaksanaan di daerah lebih jelas tahapan-tahapan mekanisme maupun penyalurannya.

Selanjutnya terkait dengan Penjuang Muda Harapan ada Juklak itu sebetulnya sudah ada saya sudah pegang draf Juklak. Tapi mohon maaf mungkin saya belum berani untuk menyampaikan ke Komisi VIII, karena ini masih dalam proses pembahasan setiap hari oleh tim yang memang ditugaskan membidangi pejuang muda ini. Ini Juklaknya dan di dalamnya sudah sangat rinci termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para mahasiswa persyaratan untuk rekrutmen dan juga kegiatan yang mereka harus lakukan itu diatur secara rinci dalam lampiran. Sehingga harapan kami justru kehadiran pejuang muda yang mengabdikan dirinya selama satu semester tapi dia dapat kompensasi 20 SKS itu betul-betul terpanggil punya komitmen dan punya tanggung jawab bukan karena pendekatan struktural

tetapi lebih pada pendekatan fungsional. Karena itulah ternyata responsnya sampai 11.000 yang daftar walaupun nanti akan diambil sekitar 5000 lebih 5140 orang mahasiswa yang minimal semester 5 dengan IPK 2,75.

Dan tahapan yang harus dilakukan juga tidak langsung mereka diterjunkan ada pembekalan terlebih dahulu selama 1 bulan baik itu offline maupun online course. Ini rinciannya sudah ada kurikulum kemudian tim best project-nya dari pemetaan masalah sosial ini yang dimaksud satu kabupaten itu 10 orang itu bukan berarti melakukan sensus kembali DTKS, karena verifikasi dalam konteks setiap keluarga layak atau tidak mendapatkan PKH itu ada di sistem DTKS dan juga sudah ada di Cek Bansos.

Jadi mekanisme reguler itu tetap dipertahankan. Tapi turunnya mahasiswa itu dalam rangka mendorong masih mahasiswa itu bukan hanya melakukan verifikasi semata, tetapi ikut menyelesaikan solusi. Untuk mencari solusi terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem. Ini sudah disampaikan di rapat terbatas di depan Wapres masalah pejuang muda ini dan mendapatkan apresiasi dan dukungan dari para menteri yang lain.

Jadi Pak Menteri, Pak Nadiem sendiri sangat memberi apresiasi dan nanti *legal standing*-nya MOU antara Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dengan Kementerian Sosial. Nah kalau diperlukan nanti dalam Pemensos nanti kita akan kaji lebih lanjut dengan Biro Hukum, tapi karena ini belum berjalan saya kira sambal jalan kita akan siapkan untuk itu. Mudah-mudahan belum ada yang terlewat.

Dan mengenai teknik untuk sistem penyaluran. Saat ini sedang dikaji atas kemungkinan *cardless* jadi bukan menggunakan kartu lagi, tapi tanpa kartu jadi PM itu datang hanya membawa badan notifikasi nanti bisa dari biometrik atau sidik jari. Kalau dia cocok dengan data KTP yang sudah padan Dukcapil maka dia tidak perlu pakai kartu lagi sekarang, inikan banyak persoalan yang Ibu Menteri sampai emosional katakanlah di lokasi karena kartu belum terdistribusi atau kartu sudah dibagi tapi uangnya belum cair macam-macam. Saya kira Bapak Ibu Anggota Komisi tahu persis di lapangan bagaimana masalah-masalah ini terjadi.

Sehingga Ibu Menteri membuat sebuah kebijakan sekarang sedang mengkaji sangat serius untuk *cardless*. Jadi tanpa kartu tapi uang bisa cair dan disebut dengan mungkin dengan *smartphone* yang jadupun bisa dilakukan, business process-nya sudah ada nanti mungkin pada saatnya nanti Bu Menteri yang menyampaikan di forum Komisi VIII ini.

Kemudian juga *cardless* itu bisa tarik tunai maupun setor tunai tanpa kartu dan transaksi ke cabang pun bisa dilakukan tanpa kartu, jadi itu yang satu kemajuan jadi secara teknologi dengan menggunakan Scan QR. Jadi QR yang sekarang sedang di desain ada dokumennya saya punya tapi pada

kesempatan yang baik nanti akan disampaikan oleh Ibu Menteri secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang mungkin.

F – P NASDEM (Hj. SRI WULAN S.E):

Sedikit saja, menyambung tadi yang disampaikan Pak Sekjen 1 menit terima kasih. Pak Sekjen tadi kan disampaikan bahwa tidak perlu pakai kartu bisa dengan biometrik saja, apakah ini alat-alatnya sudah siap?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Sedang diproses, sedang dipersiapkan sebetulnya pengalaman ini sudah juga di beberapa tempat terutama di Pahlawan Ekonomi Nasional.

F – P NASDEM (Hj. SRI WULAN S.E):

Pilot project-nya dimana?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Kalau *pilot project*-nya sudah ada di Surabaya tapi nanti akan dicoba di beberapa kabupaten/kota.

F – P NASDEM (Hj. SRI WULAN S.E):

Jadikan jangan sampai nanti programnya kita sudah oke kan sudah berjalan tetapi mereka belum siap dengan semuanya. Dan sekali lagi Pimpinan jadikan rasanya juga perlu juga memanggil Himbara disini untuk kroscek semuanya dengan Kemensos. Jadikan ada masalahnya ada banyak banget ini yang masih *ter-hold* di banknya begitu. Jadi nanti kita bisa kroscek antara Kemensos dengan Himbara-nya terima kasih.

F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.):

Ya, nanti yang teknis ini karena kita masalah waktu jadi nanti hal-hal teknis bisa kita bicarakan di luar forum ya karena kalau tidak ini secara *technical* ini *practical solution*-nya untuk banyak hal jadi banyak begitu.

F- PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Pimpinan-pimpinan ini hanya mengutarakan saja dari Dapil, BPNT bisa diganti dengan tunai. Karena ini sedang viral di daerah saya bahkan dari pendamping PKH juga menanyakan begitu Bu.

KETUA RAPAT :

Ya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Asep ya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Baik, dari saya cukup sekian mohon maaf kalau awal tadi menjelaskan agak makro. Tapi pada prinsipnya kami ingin menjelaskan secara detail bertahap nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa diterima tanggapan dari kami, terima kasih. Silakan pada Pak Asep mungkin melanjutkan.

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN:

Baik, terima kasih Bu Pimpinan pertama kami mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang di angkat ya di dalam kesempatan ini. Jadi memberikan informasi kepada kami terima kasih. Perlu kami sampaikan juga Bu Pimpinan, kami juga mengapresiasi para TA Komisi VIII sekarang semakin intens berdiskusi dengan teman-teman kami ya di Direktorat 1,2,3 sehingga ini memudahkan ya. Jadi hal-hal teknis di lapangan itu pernyataan dengan komunikasi yang intens artinya bisa lebih cepat begitu.

Dari Bapak Ibu sekalian, saya catat ada 6 yang menyampaikan berkenaan dengan Rutilahu. Pertama mungkin Pak Bukhori tidak apa-apa ya karena tadi substansinya juga sangat menarik jadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bagaimana dipesankan atau dikonsepsikan oleh Ibu Menteri. Jadi RS-Rutilahu itu konsepnya sinergitas seperti jadi rumah betul memang rumah tapi bukan hanya sekedar rumah begitu pengisi rumahnya. Kemudian kelembagaan sosial yang ada di kawasan itu juga ditata.

Kemudian yang perlu kami jelaskan Bapak Ibu sekalian, RS RTLH ini kegiatannya berkelanjutannya ya tidak hanya satu tahun ini saja, tapi berkelanjutan karena targetnya RS RTLH juga sama mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di wilayah itu. Oleh karenanya targetnya RS RTLH juga sama nanti mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di wilayah itu oleh karenanya di antara kami ini sekarang sedang mengkonsolidasikan Bapak Ibu sekalian program-program seperti Pak Edi Suharto nanti akan diarahkan ke yang apakah PM yang ada di RS RTLH, kemungkinan program-program seperti kalau daerah itu indikasikan rawan konflik misalkan begitu ya. Itu bisa saja nanti dari tempatnya Pak Pepen keserasian sosial bisa masuk ke situ.

Nah, kemudian dari telaah lapangan Bapak Ibu sekalian di lokasi RS RTLH ada juga sih disabilitas begitu ya, lansia terlantar sangat memungkinkan, mungkin dikembangkan nanti ke depan ada atensi komunitas ya Pak Hari ya. Jadi akan mengembangkan. Jadi mungkin ke depan bisa saja

atensi itu tidak mesti atensi tidak mesti di balai begitu ya barangkali nanti ikut komunitas karena kan manfaatnya juga luar biasa begitu.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin Pimpinan, Pak Dirjen, saya menyarankan bertahap-tahap Pak kalau kita pertama Bapak suruh kami Program Rutilahu masyarakat antusias dan memberikan syaratnya itu penuh dulu Pak, baru pengembangan yang Bapak bilang tadi program lain. Jadi orang tidak nanti rasanya bohong-bohongan ini.

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN:

Saya mau menjelaskan Pak *punten*. Tadikan pertanyaannya dari Pak Bukhori ya menyampaikan itu sangat setuju dengan disampaikan Pak Bukhori meskipun tidak ada tapi substansinya menarik untuk diketahui semua. Kemudian itu yang Pak Bukhori ya.

Kemudian dari Pak Rudi Hartono, terima kasih Pak Rudi. Kalau TA-nya juga intens ya kami sering komunikasi disampaikan biar sekaligus nanti melaporkan ya. Kami menyampaikan progres usulan RS RTLH yang datanya sudah di padankan Pusdatin, karena kami tidak bisa mengeksekusi sebelum kami mendapatkan data dari Pak Kapusdatin. Terima kasih Pak Kapusdatin ini di tengah kesibukan yang luar biasa Pak Kapusdatin dengan crew-nya melakukan pemadanan boleh jadi di materi ini ada bahannya dari 4864 usulan yang disampaikan Bapak Ibu sekalian.

Alhamdulillah sekarang yang sekarang tengah proses ya di wilayah sebetulnya di wilayah 1 juga tengah proses ,ya 1 2 3 khusus untuk data-data yang sudah oke yang datanya sudah padan dengan Dukcapil itu langsung kita proses administrasinya begitu. Sebagai informasi untuk wilayah I yang paling banyak ini wilayah 1 itu 2220 ya 2209 semuanya. Ini dari *feedback* yang disampaikan Pusdatin Bapak Ibu sekalian data yang bisa kami langsung eksekusi diproses nanti rekeningnya atau (suara tidak jelas) itu sebesar 1569 jadi kami sangat hati-hati dari sisi ini. Jangan sampai kita eksekusi tahu-tahu jadi persoalan di belakang hari begitu.

Kita ingin program kegiatan yang kita laksanakan baik dan benar ya baik untuk profesional benar sesuai dengan regulasi. Karena semua program di PFM itu harus mengacu ke DTKS, sekarang DTKS harus padan dengan Dukcapil itu. Nah kemudian halnya nanti TA-nya mungkin nanti bisa intens dengan kami ada ini non DTKS tidak padan Capil ini ada angkanya 170 KPM.

Nah mungkin nanti secara detail kami akan distribusikan ya dengan siapa saja supaya ini mungkin kita bisaantisipasi secepatnya. Jita carikan

solusinya tentu nanti konsolidasi data ya Pusdatin dengan daerah dibantu oleh kita semua begitu.

Saya kira itu sebagai informasi mudah-mudahan, kami berharap lebih cepat lebih bagus Pak bagi kami realisasi lebih bagus ya. Karena gotong royong tidak mudah juga pada suasana Covid, sehingga semula memang awal ya tapikan Ibu semula menjadi kebijakan menjadi 2.000.000 Alhamdulillah sudah selesai mudah-mudahan nanti Minggu sekarang sudah ada yang bisa dieksekusi ya eksekusi kemudian nanti bisa ditransfer sehingga nanti pelaksanaan bisa dilaksanakan intinya kita simultan saja Bu ya Bapak sekalian ya kalau yang sudah ada datanya langsung kita eksekusi bisa berjalan begitu.

Nah, kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Rido dan Bu Ina, terima kasih Bu atas masukannya. Nih mungkin khusus untuk saudara kita ini yang diusulkan persoalannya tidak punya lahan. Jadi yang sudah-sudah biasanya dibuatkan pernyataan hitam di atas putih saja, misalkan ada si A Bapak si A begitu ya dia apa namanya itu meskipun lahannya bukan yang bersangkutan tapi yang penting ada hitam di atas putih yang dikhawatirkan itu Bapak setelah dibangun itu bangunan itu dikomplain itu saja. Jadi untuk *security* seperti itu.

Jadi saya kira meski ada solusi dan saya kira itu tidak terlalu banyak yang diusulkan dari Bapak Ibu sekalian seperti itu jadi mungkin itu Bu Ina sama Pak Ali Ridha ya *clear* masalahnya. Intinya jangan sampai nanti bantuan yang disalurkan ini di kelak kemudian hari jadi kasihan bukan nanti untuk yang bersangkutan begitu.

Kemudian Bu Wulan, terima kasih dan *alhamdulillah* minggu kemarin baru kami *v-con* dengan seluruh provinsi menyoal tentang dana Dekon yang memang realisasinya masih agak kurang juga ini masih sekitar 50%. Termasuk hal yang disampaikan seperti tadi disampaikan oleh Bu Wulan jadi ada honorarium dari pendamping sosial di tingkat kecamatan mereka kan lapor juga ke kami begitukan.

Kemudian kami juga dorong supaya lebih akselerasikan begitu. Selama apa laporannya sudah *clear* eksekusi. Jadi insya Allah teman-teman dari seluruh provinsi itu akan mengakselerasi itu. Manakala ada hal seperti itu boleh Bu Bapak Ibu sekalian langsung saja dikomunikasikan ke Dinas Sosialnya atau kalau tidak misalkan melalui Direktorat 1,2,3 begitu. Jadi itu mungkin.

Kemudian yang terakhir tadi disampaikan di beberapa kesempatan Bapak Ibu sekalian itu memang menentukan atau mengeksekusi ya khusus KPM yang mengalami sumbatan realisasi kan begitu. Tapi bukan semuanya Bu Ina tapi hanya untuk kasus yang terlambat begini. Di beberapa

kesempatan di eksekusi supaya cepat langsung diuangkan begitu. Jadi tidak untuk semuanya hanya di kasus-kasus tertentu saja.

Jadi contoh misalkan ada ya ada KPM di daerah itu belum dapat beberapa bulan terus itu lokasinya juga jauh dari mengaksesnya susah. Sehingga kalau misalkan dipaksakan paket BPNT susah disana juga tidak ada warung yang mempunyai kapasitas menyelenggarakan program itu. Atas kasus seperti itu Ibu Menteri mengarahkan dan disepakati oleh Himbara untuk nanti dipercepat langsung diuangkan karena memang di Perpres dibolehkan yang bantuan sosial non tunai ini bentuknya bisa uang maupun barang. Tetapi secara apa namanya itu konseptual BPNT itu harus berupa barang begitu. Jadi yang seperti disampaikan Bu Ina bukan berarti semua Bu hanya untuk kasus daerah-daerah tertentu saja yang dinilai terlambat supaya lebih cepat begitu. Kan karena kalau uang nanti Himbaranya langsung menyampaikan langsung selesai.

Karena ini di Bulan Oktober itu Bapak Ibu sekalian kita atau kami ini dimintakan untuk menyalurkan untuk 18,8 Pak terutama yang belum sukses 18.8. Kemudian ada juga 2 bulan ya untuk apa namanya itu penambahan indeks yang PPKM ditambah lagi yang itu yang 5.9 juga harus mulai bulan Oktober. Jadi memang banyak PR dan Insha Allah dan ini berarti akan membantu percepatan realisasi sebetulnya karena anggaran sudah ada Pak anggarannya sudah ditambahkan. Jadi kalau kami eksekusi itu berarti anggaran nanti di kami bisa lebih cepat karena di PFM ini anggarannya paling banyak otomatis nanti bisa mendongkrak realisasi kementerian begitu. Itu saja mungkin

F- PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Tentunya perlu sosialisasi Pak karena semua pada sibuk ribut. Pinginnya semua minta tunai begitu. Jadi makanya saya perlu klarifikasi supaya nanti ini didarah mau reses Pak pasti banyak pertanyaan seperti itu. Jadi mohon nanti di sosialisasi atau bagaimana mengenai itu.

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN:

Karena ini programnya untuk BPNT dan PKH, mungkin barangkali kalau tidak Ibu Menteri mungkin bisa Pak Sekjen Suratnya ya. Karena inikan 2 program sebetulnya PKH dan BPNT nanti. Terima kasih Bu atas masukannya luar biasa dan mudah-mudahan solidaritas di antara TA dan teman-teman di Direktorat 1, 2, 3 semakin intens, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Selanjutnya Pak Eddy apa Pak Irjen? Pak Irjen dulu ini tadi temuannya banyak juga Pak ya. *Follow up*-nya bagaimana ini?

INSPEKTOR JENDRAL PEMBERDAYAAN SOSIAL:

Baik Bapak Ibu Komisi VIII DPR RI.

Terkait beberapa pertanyaan tadi dari Pak Bukhori, Pak Achmad, dan Pak Husni dan Bu Wulan. Pertama terkait dengan 12 pertemuan sebenarnya kalau kami rekap lebih banyak lagi Ibu temuan-temuan yang ada ini lebih fokus kepada BPNT, PKH dan juga lainnya.

Namun catatan yang 12 ini tentunya ada hal-hal yang memang temuan ini bisa langsung kita tindak lanjuti dan ada juga yang dalam proses. Nah sebagai contoh yang langsung bisa kita tindak lanjuti biasanya kita pada saat pemeriksaan itu berkoordinasi dengan pihak Polres atau Bareskrim melalui Polres setempat, biasanya terkait dengan temuan-temuan keuangan itu ada yang kita minta stor ke Kas Negara. Di salah satu Provinsi di Jawa Tengah itu ada yang sampai Rp3.000.000.000,- kita minta kembalikan itu disanggupi oleh yang bersangkutan khususnya oleh *supplier* ataupun *vendor*-nya.

Nah yang kedua, juga terkait dengan barang-barang yang rusak dan segala macam itu juga langsung ditindak lanjuti untuk diganti. Termasuk ada E-Warong yang mungkin dari sisi tidak terdata di Himbara ya itu EDC-nya juga langsung ditarik, jadi langsung itu juga diminta oleh pihak Himbara terhadap E-Warong yang tidak terdaftar atau mungkin menjadi E-Warong gelap segala minta EDC-nya ditarik dicabut tidak berfungsi.

Banyak hal lain tentunya terkait dengan para pendamping yang juga terlibat juga langsung kita eksekusi untuk minta diberhentikan dicopot. Dan hal-hal lain tentunya yang dalam proses, kami biasanya memantau membuat matriks dan kami melakukan pemantauan tentunya kerja sama dengan Direktorat Dirjen PFM dan juga dengan Dirjen Linjamsos dan Satker Eselon I lainnya terkait dengan temuan-temuan permasalahan baik itu dari Dumas, Pak Husni temuan-temuan atau informasi yang dari Anggota Komisi VIII, kami langsung tindak lanjuti di lapangan. Artinya ini juga menjadi satu catatan hasil temuan ini kita lapor ke Bu Menteri kita buat matriks dan kita pantau terus terhadap proses tindak lanjutnya.

Dan harapan Pak Bukhory kita punya namanya program pengendalian berbasis masyarakat artinya kita juga pada saat tertentu kita mengumpulkan pihak-pihak terkait di lapangan baik itu dari Kepolisian dari Kejaksaan, Dinas Sosial dari Tim Saber Pungli juga yang ada di provinsi dan kabupaten termasuk Inspektorat Provinsi, kita mengundang Himbara kita mengundang Korda TKS K untuk kita *sharing* bagaimana kita ke depan upaya preventif ini

kita tonjolan dalam rangka pengambilan Bansos. Kalau tidak ini satu persatu kesini kayaknya semakin melebar.

Jadi suatu saat kami juga berharap dari Pak Bukhori, juga berharap juga kami bisa duduk bersama lah dan ini kami ingin kembangkan Bu Diah untuk ke depan sisa 3 bulan ini ya ada memang kalau memang ada Dapil tertentu yang ingin kita libatkan sama-sama kita duduk bersama, kita mengundang pihak-pihak terkait di dinas sosial biasanya di dinas provinsi atau kabupaten. Mungkin itu Ibu terima kasih.

KETUA RAPAT :

Selanjutnya, monggo Pak Eddy.

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL (Dr. EDDY SUHARTO):

Terima kasih.

Beberapa pertanyaan terima kasih sudah dijawab oleh Pak Sekjen, Pak Asep ada beberapa isu yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, dari Pak Bukhory terima Kasih walaupun sudah tidak ada tapi intinya tentang adanya serapan yang masih rendah di pengembangan SLRT dan Puskesmas. Jadi betul seperti tadi saya sampaikan ini terkait dengan perubahan tempat, jadi yang tadinya kegiatan sosialisasi itu akan dilakukan di kabupaten/kota tetapi ada kebijakan PPKM. Maka kami sekarang sudah ketemu strateginya jadi regional dan ini memerlukan sedikit revisi. Tapi *alhamdulillah* nanti di bulan Oktober ini sudah ada kegiatan ini yaitu di 5 balai yaitu di 5 regional sistemnya, nanti Padang, Makassar, DIY, Bandung, Banjarmasin itu akan melakukan Bimtek yang serentak antara untuk SLRT di kabupaten/kota maupun Puskesmas. Jadi secara *hybrid* ada luring, daring sehingga ini Insya Allah di bulan Oktober ketiga itu sudah kelihatan akan terjadi lonjakan serapan. Tapi terima kasih pengingatnya Pak Bukhori betapa kita memang harus terus-menerus mengawal program ini di tengah dinamika yang terjadi terkait dengan Covid-19 ini.

Untuk Ibu Ina, juga ini masukan terkait dengan usaha mikro. Memang betul Ibu kami juga kemarin di beberapa tempat mengunjungi ya bahwa mereka itu kadang-kadang modalnya hanya Rp200.000,- kecil begitu ya. Tapi dan yang mereka rill mereka perlukan itu selain pendampingan ya modal. Makanya kemarin terima kasih dukungan DPR bahwa memang Prokus ini perlu ada bantuan modal atau paling tidak mungkin peralatan dan lain-lain.

Ini yang sedang terus dikembangkan karena ternyata masih diblokir oleh Bappenas. Jadi Bappenas tetap menginginkan hanya pelatihan saja, lalu bagaimana caranya? Kita masih punya acara jadi kita ada dana hibah jadi

bisa jadi Anggota Dewan misalnya di dapilpun untuk Prokus untuk modal-modal tertentu bisa diusulkan lewat dana itu ada dana CSR yang ada.

Jadi di proposal Ibu misalnya di daerah Ibu, misalnya ada katakanlah 20 misalnya berupa modal Rp1.000.000,- misal begitukan itu bisa kita proses. Karena ini yang menjadi arahan Ibu Menteri target kita untuk bantuan-bantuan dana hibah itu tidak melulu harus sembako atau beras, beliau menginginkan juga untuk modal usaha untuk menggerakkan wirausaha. Bisa juga untuk membeli katakanlah mesin jahit katakanlah atau alat sablon begitu ya. Jadi kami tunggu justru itu proposal yang kita tunggu.

Baik, berikutnya terima kasih Bu Wulan ini ada keterlambatan tali asih cuma nanti kita minta data kira-kira dimana untuk Jateng 3. Tapi tadi terus kita pantau mudah-mudahan ini segera di selesaikan. Namun dapat kami sampaikan bahwa kemungkinan keterlambatan ini terkait dengan pelaporan dari TKS-nya, karena ada temuan dari BPK dari Pak Irjen juga, bahwa memang kita tidak bisa membayarkan tali asih kalau yang bersangkutan belum menyerahkan laporan kinerjanya. Nah ini mungkin saja yang bersangkutan itu belum melaporkan menyerahkan laporannya. Tapi sudah kami pantau dan kami tunggu barangkali daerahnya di mana syukur kalau ada nama TKSK-nya sehingga ini bisa kita bantu secara cepat.

Nah terkait tadi ada pertanyaan mengenai untuk di Dayasos ya? Untuk izin dari Dinsos, jadi kami sudah tidak harus lagi misalnya proposal dari Bapak-Ibu sekalian untuk Prokus dan lain-lain itu ada apa namanya rekomendasi dari Dinas Sosial. Jadi ini alternatif saja bisa disertakan bisa juga tidak dari Dinas Sosial. Tapi nanti dari Bapak-Ibu sekalian ada rekomendasi nanti dari kita dari teknis yang akan memberikan ini akan mempermudah mempercepat. Karena kami menemukan memang di lapangan kendalanya ada disitu karena perbedaan pandangan perbedaan ini kadang-kadang bupatinya tidak mau menyerahkan memberikan rekomendasi oleh karena itu sudah kami antisipasi. Dan ini ada di Pemensos Nomor 4 2021 aman.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin Pimpinan! Pak Dirjen, mengingatkan tadi yang mengenai rekomendasi dari bupati atau gubernur atau dinas baiknya memang jangan Pak. Karena apa? karena saya mengalami sendiri kemarin itu untuk mengajukan suatu permohonan diputar-putar saya minta bantuan teman di DPRD kabupatennya juga di bola-bola. Jadi akhirnya ribut panggil wartawan. Jadi akhirnya bukan mau ajukan program, akhirnya mau cari ribut Pak. Jadi saya minta ada prosedur yang lebih baik dari kita Kementerian Pak, karena di bawah itu sarat kepentingan politisnya tinggi Pak itu informasi ya terima kasih Pak.

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL (Dr. EDDY SUHARTO):

Terima kasih menambah kekuatan kita siap jadi ini sudah clear tidak usah lagi dan bisa disaksikan nanti masukan-masukan itu sudah tidak perlu lagi rekomendasi.

Yang terakhir pertanyaan mengenai di halaman 5 periode 1, 2, 6 ini dari sana. Jadi itu nama prioritas di dalam RPJMN itu. Jadi di sana jadi misalnya program prioritas kita masuk diprioritas 1 RPJMN sementara yang lainnya diprioritas 2 berikutnya tidak ada kita di prioritas 3, 4, 5 yang Dayasos itu adanya di prioritas 6 ini hanya penomoran dari nama dari prioritas dari mereka dari Bappenas. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh.

F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.) :

Jadi yang penting Pak, programnya tidak hanya bagus tapi bisa dicairkan Pak. Masyarakat soalnya pandemi begini perlu banget Kemensos Bansos dan juga bantuan kelompok-kelompok disabilitas dan lain-lain begitu ya. Selanjutnya Badiklit dulu ya kanan kiri Pak Hartono.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYULUHAN SOSIAL (HARTONO LARAS):

Terima Bu Pimpinan Bu Diah dan Bapak-Ibu Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Pada prinsipnya Kami berterima kasih atas saran masukan dan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk program di Badiklit Pensos atau di BP3S yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk bagaimana program ini kita perkuat untuk menjaga *link and match* dari program-program yang ada di masing-masing Direktorat Jenderal. Khususnya dalam rangka untuk percepatan penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan agar kita konsep satu program. Yang berkaitan bagaimana Balai Besar sebagai UPT sebagai unit pelayanan teknis dari BP3S ini menjadi satu sentra edukasi yang berkaitan dengan kediklatan atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan langsung dengan upaya bagaimana KPM pendamping untuk dapat bersama-sama menangani berbagai masalah sosial terutama yang berkaitan dengan program-program perlindungan sosial.

Dan juga yang berkaitan dengan penguatan yang tadi istilahnya disebut sebagai satu kajian ya kalau penelitian itu memang akan ke BRIN ya. Tapi kita sedang mencari nomenklatur, apakah kajian ini ya juga tidak apakah berbeda dengan penelitian. Tapi maksudnya yang disampaikan oleh Pak

Bukhory tadi adalah kita ingin betul-betul Badiklit ini memberikan suatu kontribusi untuk satu masukan yang berkaitan dengan program-program yang akan dikembangkan.

Dan juga berkaitan dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bu Ina sangat konsen itu kita akan tindak lanjuti saran Ibu ya. Oleh karena berkaitan dengan bagaimana efektifitas akademik perguruan tinggi Politeknik Kesejahteraan Sosial sebagai satu pendidikan tinggi vokasi di bawah kementerian, ya kita akan langsung bagaimana melihat dari sisi *Tri Dharma* perguruan tinggi baik di bidang pendidikannya penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Disitu nanti kita akan perkuat seiring dengan komitmen pemerintah sedang berkoordinasikan perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga ini sedang di *godog* dan kemarin sudah rapat ditingkat Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dan terima kasih juga berkaitan dengan upaya kita untuk memberikan kontribusi kepada terutama masyarakat dan pendamping. Lalu penyuluhan sosial yang akan kita kembangkan baik, penyuluhan sosial secara langsung maupun penyuluhan sosial berbasis multimedia.

Olehnya itu kita bersama-sama nanti bisa turun. Pak Husni nanti kita turun bersama-sama karena Pak Samsu Niang itu Komisariss termasuk Pak Jeffry ya Bapak-Ibu sekalian kita punya 3 balai dan.

F- PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Pak Dirjen, perlu saya tambahkan keluhan dari mahasiswa ini menyatakan kepada saya pada waktu saya memberikan kuliah umum itu tidak dilirik ketika lulusannya mendaftarkan pekerjaan di lembaga atau kementerian atau di tempat pekerjaan. Jadi banyak yang tidak lulus begitu Pak itu, yang pertama.

Yang kedua, kalau umpama ada rekrutmen PKH atau pekerja sosial yang ada di kementerian itu tidak dilirik juga. Jadi saya mohon kualitas dan juga diutamakan yang produk dari Kementerian Sosial harus diutamakan. Jadi banyak mahasiswa yang mengatakan, "Bu kalau umpama saya sudah bekerja keras tetapi di apa namanya rekrutmen TKSK atau PKH itu kita tidak dilirik Bu". Itu Pak nanti mohon apa namanya evaluasi, terima kasih.

F – P GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Pimpinan menambahkan, Bu Ina saya setuju Pak Sekjen Pak. Artinya mahasiswa yang sudah direkrut ini nanti ketika memerlukan pekerjaan seperti yang disampaikan itu mestinya diutamakan. Kita melihat misalnya di Jawa Tengah itu macam sekolah Taruna Nusantara itu ketika dia mendaftarkan

menjadi tentara itu diutamakan karena mereka sudah dilatih dari program itu terima kasih Pak.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYULUHAN SOSIAL (HARTONO LARAS):

Baik, terima kasih saya kira Bu Ina kita akan lihat secara komprehensif. Jadi kalau kita melihat perguruan tinggi memang kita harus melihat dari dosen dan juga berkaitan dengan program-program yang ada dan juga terutama program tingginya kita akan kemudian tingkatkan. Jadi perguruan tinggi ini kita harapkan di samping harus diperkuat ditingkatkan tetapi juga perguruan tinggi ini harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat yaitu melalui mahasiswanya dan juga berbagai kegiatan yang ada. Sehingga perguruan tinggi tidak menjadi menara gading yang hanya mampu menerangi dirinya, tapi juga harus betul-betul dirasakan masyarakat kemanfaatannya dan eksistensinya.

Saya kira mohon *support* dari bapak Ibu sekalian, ada Undang-Undang tentang Pekerja Sosial dan ini menjadi suatu landasan yang kuat bahwa Politeknik atau sama dengan kurang lebih 30 perguruan tinggi yang memiliki program study bidang kesejahteraan sosial akan nanti kita bersama-sama. Dan Politeknik memiliki satu ciri khas memiliki *culture* yang sangat khusus spesifik sehingga ini menjadi satu moda yang bisa kita kembangkan terima kasih Bu.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Izin Pimpinan boleh saya menambahkan sebelum nanti ditegur Pak I Komang, karena pertanyaan beliau belum terjawab. Saya lupa mohon maaf jadi kalau usulan itu saat ini sudah sampai 7600 residen yang diusulkan oleh IPWL untuk mendapatkan bantuan Atensi. Nah kami mengoptimalkan keberadaan balai untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dimaksud termasuk IPWL. Kalau bantuannya rata-rata itu 2.4 Juta itu rata-rata tapi perorang per residen tapi realisasinya tergantung asesmen. Jadi seperti Pak Komang melihat langsung ke Mojokerto itu ada residen yang awalnya dia pengen jadi barista kopi sehingga kita latih untuk jadi barista dengan dukungan beralatan semua bahkan untuk sewa cafenya kita biyai itu sampai Rp20.000.000,-. Sekarang sudah mapan dia dan tidak terpikirkan lagi untuk relaks menjadi pengguna narkoba lagi.

Ada lagi yang sepatu kalau sekarang 7670 yang mengusulkan melalui IPWL, jadi ada yang langsung ditangani di balai ada yang langsung di IPWL ada yang langsung di Keluarga tergantung dari *assessment* dan hasil *assessment* yang menentukan nanti berapa besar bantuan dan bentuk bantuannya seperti apa macam-macam seperti yang kunjungan kerja ke berapa tempat banyaknya memang diorientasikan ke pemberdayaan. Tapi

kalau untuk residen ini yang pengguna harus mengikuti rehabilitasi sosial dulu paling tidak ikut terapi *community* di balai-balai setelah itu baru dipersiapkan untuk di masyarakat. Karena kalau langsung dari pengguna Narkoba langsung diberdayakan dimasyarakat khawatir malah tempat pemberdayaannya dipersalahgunakan barista kopi malah sekaligus digunakan tempat transaksi kan bahaya itu. Saya kira itu tambahannya Bu.

KETUA RAPAT :

Nanti Pak Komang pendalaman bisa sama Pak Hari ya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Kemudian terakhir, saya ada pesan juga bahwa yang sebenarnya DTKS itu kan dengan cara yang sekarang dilakukan itu kan efisiensi Bu. Kalau kami melihat Bu ya bahkan dialihkan untuk kepentingan pelayanan itu jadi tidak menggunakan pendekatan proyek tapi membangun sistem di internal Pusdatin itu. Bahwa itu ada perubahan-perubahan kami akui itu perubahan dari proses internal Kementerian Sosial sesuai dengan arahan Bu Menteri itu.

KETUA RAPAT :

Ya, makanya tadi katakan dinamika Pak tapi secara normatif kalau kita baca anggarannya makanya kita ingin penjelasan begitu Pak dalam dinamika itu kan tidak semua hal bisa kita *catch-up* bisa kita ikuti begitukan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Ya dari 160 juta sekian 156 sekarang sudah padan Dukcapil tahun sebelumnya cuma sekitar 56 yang padan Dukcapil.

KETUA RAPAT :

Jadi bobot pemrograman pada saat kemarin direncanakan itu di Pusdatin ini kan kalau dilihat serapannya 7% ya Pusdatin? Nah itu kompensasinya itu apakah ada pendekatan dari program lain ataukah bagaimana begitu? Kalau ini memang ada perubahan di Pusdatin begitu dari perencanaan sebelumnya begitu

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Pertama, penguatan ini penguatan untuk pemadanan jadi sudah sangat intensif dan itu memang tidak pendekatan proyek tapi lebih kepada

pendekatan proyek tapi lebih kepada pendekatan sinergi antar kelembagaan. Jadi yang namanya Professor Zuhdan itu sudah seperti orang Kemensos Bu, bahkan Bu Menteri sendiri tidak harus datang Kemendagri tapi mendatangi Prof Zuhdan itu saking intensnya. Jadi tidak lagi pendekatan MOU tidak pendekatan proyek kerja sama tapi sudah seperti in-line saja terus-terusan itu efisiensinya luar biasa.

Yang kedua, penguatan di dalam. Jadi SDM-SDM di dalam menguatkan untuk membangun sistem digitalisasi dalam Bansos itu salah satunya program cek Bansos itu bukan oleh kontraktor, bukan oleh pihak lain pihak ketiga tetapi oleh *expert-expert* yang ada di Pusdatin. Yang memang ditugaskan oleh Bu Menteri menyiapkan cek Bansos. Kalau pendekatan proyek itu sudah M juga dengan mengoptimalkan tapi servernya sudah harus di *upgrade*. Nah kompensasinya memang ada 111 Milyar untuk perangkat data. Itu memang sekarang sedang lelang Bu. Mudah-mudahan kalau itu sudah selesai lelang kalau saya hitung dari 25 itu 20% itu naik jadi sekitar 40% untuk Pusdatin. Kalau akhir bulan ini sudah beres lelang sudah dicairkan dan perangkat ada begitu.

Saya kira itu Bu, jadi beberapa hal termasuk yang perjuang muda itu untuk memastikan bahwa DTKS itu tidak hanya diverivali tidak hanya mendukung Bansos PKH dan BPNT tapi juga untuk penyiapan mereka dalam program pemberdayaan. Ini instrumen mahasiswa inilah yang dianggap masih bisa diandalkan yang masih *imparsiall* begitukan tidak berfikir tidak akan mungkin ada *conflict interest* kira-kira begitu cara pandang kita.

Tetapi tetap SDM yang regular yang sudah diamanahkan Dinas Sosial kemudian pendamping itu tetap dioptimalkan. Itu yang dikontrol terus menerus sekarang oleh Ibu Menteri jajaran Pusdatin dan ada juga pembiayaan untuk pendampingan ke daerah-daerah. Saya amati itu ada Perjadin juga tetap direalisasikan untuk pendampingan ke kabupaten/kota yang verivalinya dan perbaikan datanya tidak optimal begitu. Itu cara-cara sekarang yang lebih pada *internal capacity building* daripada menggunakan external tetapi akhirnya kita tidak kuat untuk menghadapi sebuah big data yang sangat-sangat menantang untuk Kementerian Sosial begitu. Orientasinya kepada penyiapan sistem untuk Kemensos menjadi sumber dan penyediaan big data untuk sosial kemasyarakatan kira-kira itu yang disampaikan oleh Bu Menteri kurang lebihnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terakhir berarti ya Pak Pepen ya.

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

(PEPEN NAZZARUDIN):

Bapak Ibu sekalian, jawaban terakhir dan tentunya tadi sebagian pertanyaan sudah di jawab terutama terkait dengan peningkatan SDM dan beberapa persoalan lainnya. Dari Dirjen Linjamsos ada beberapa yang ditanyakan tadi, terutama memerlukan konfirmasi adalah dari Pak Rudi Hartono tadi terkait dengan keserasian sosial dan kearifan lokal. Ini memang percepatan realisasinya kita genjot sebagaimana di slide saya tadi itu ada 4 point yang direncanakan untuk digenjot realisasi adalah melakukan percepatan proses verifikasi proposal keserasian sosial dan kearifan lokal.

Ini memang lebih kepada teknis beberapa pembahasan terkait keserasian sosial ini terutama sekarang keserasian sosial ini diarahkan kepada penguatan ekonomi. Jadi sebagian proposal juga kita alihkan dan kita sarankan untuk lebih kepada penguatan ekonomi. Namun beberapa yang lainnya juga sudah kita serahkan Pak Rudi dan *Insyallah* nanti dari yang lain pun akan selesai di Triwulan keempat ini.

Kemudian juga menyangkut terkait dengan pertanyaan dari Pak Achmad tentang saldo 0, Pak Doktor Haji Achmad. Kita sama-sama waktu itu melakukan evaluasi di Riau memang beberapa persoalan adalah menyangkut kartu tidak distribusi kartu tidak transaksi dan saldo 0. Nah terkait saldo 0 ini, kemungkinan adalah memang karena tidak distribusi sehingga kita blokir. Jadi tidak dibalik tidak blokir kemudian tidak distribusi tapi ada jangka waktu ketika itu tidak disini maka harus diblokir dulu. Namun kemudian kita buka kembali dan kita konfirmasi lagi sehingga ini yang menjadi perhatian Ibu Menteri Sosial saldo 0 ini kita betul-betul tekan seperti itu sehingga ini bisa salur karena 1-2-3 tidak salur itu sangat kita hindari seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan dari Pak

F – P DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD M.si) :

Sedikit Pak Dirjen, jadi dengan kasus di Riau itu di perbankannya bermasalah Bank BRI-nya itu. Jadi sepertinya itu dibagikan kartu 10 di depan Bu Menteri itu hanya simbolis saja 2 yang betul-betul yang 8 itu tidak begitu. Jadi supaya di depan Ibu Menteri tidak ada masalah Bank Riau-nya diambil kartu lain dibagi-bagi begitu permainannya seperti itu.

Nah hari ini kejadian seperti itu juga artinya di kementerian tidak ada masalah tapi yang bermasalah di Bank BRI itu Bank BRI. Jadi ini mungkin perlu dievaluasi Bank Himbara itu karena disana tidak hanya Bank Riau. Jadi tidak ada komperatif tidak ada perbandingan begitu sehingga apa namanya berkali-kali pendamping ini menanyakan pihak bank tapi jawabnya belum-belum itu saja. Ini sebagai masukan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

(PEPEN NAZZARUDIN):

Ya terima kasih Pak Doktor Achmad, masukannya memang persoalan ini kita sama-sama akhir-akhir ini untuk mencari solusi. Artinya tidak mencari siapa yang salah tapi kita carikan solusi termasuk sesudah kita rekon di seluruh perjalanan ini terus kita monitor oleh Direktorat DSK untuk realisasinya seperti itu Pak Achmad.

Kemudian satu lagi, ini juga sangat penting terkait dengan dari Pak Muhammad Husni adalah kartu yang tergadaikan dan kartu-kartu yang digadaikan seperti itu. Jadi memang pendekatan kita kepada pendamping bahwa ketika kartu tergadaikan itu mungkin saja ini kartu tidak di KPM nya atau ada kelalaian dari dalam pendampingan. Oleh karena itu peningkatan kapasitas pengawasan kinerja dari pendamping untuk selalu memonitor KPM ini selalu kita tingkatkan Pak Husni jadi terima kasih atas informasinya. Demikian Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Kita masuk ke kesimpulan ya ini kalau di ikutin bisa 2 hari 2 malam ini. Nanti semua Kecamatan persoalannya keluar lagi. Ini saya bacakan,

Draf Kesimpulan
Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI
dengan

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, PLT Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI

Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2021-2022
Senin, 4 Oktober 2021.

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, PLT Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI dengan agenda evaluasi program dan anggaran tahun 2021 serta isu-isu aktual disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di unit kerja Eselon I Kementerian Sosial RI sampai 3 Oktober 2021 sebagai berikut:
 - a. Unit kerja Eselon I.
 - 1) Sekretariat Jenderal, anggarannya sebesar Rp1.060.287.197.000,- yang realisasinya sebesar Rp185.569.810.818,- dalam persentase 17,5%
 - 2) Inspektorat Jenderal anggarannya sebesar Rp32.258.503.000,- yang realisasinya sebesar Rp22.966.301.891 sebesar 71,19%.
 - 3) Dirjen Dayasos anggarannya sebesar Rp333.822.278.000,- yang realisasinya sebesar Rp155.580.960.793,- yakni sebesar 46,61%.
 - 4) Dirjen Rehsos anggarannya sebesar Rp1.103.078.210.000,- yang realisasi Rp468.928.290.567,- yakni sebesar 42,51%.
 - 5) Dirjen Linjamsos anggarannya sebesar Rp30.223.964.450.000,- yang sudah terealisasi sebesar Rp21.969.423.316.850 yakni sebesar 72,69%.
 - 6) Dirjen PFM anggaran sebesar Rp73.895.644.330.000,- yang terealisasi sebesar Rp46.263.624.624.557.434,- yakni sebesar 62,61%.
 - 7) Badiklit Pensos anggarannya sebesar Rp237.015.950.000,- yang sudah direalisasikan sebesar Rp149.538.475.732,- atau sebesar 63,9% total anggarannya sebesar Rp106.886.070.918.000,- yang secara keseluruhan realisasi sebesar Rp69.215.630.714.000.085,- atau sudah terealisasikan sebesar 64,76%.

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Sosial RI untuk mempercepat penyerapan anggaran pada Triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2021.

2. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, PLT Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk merespons dengan sungguh-sungguh pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memastikan program Pejuang Muda benar-benar dapat diimplementasikan dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, rekrutmen yang selektif, serta pembinaan untuk menghasilkan SDM yang loyal dedikatif dan bertanggung jawab.
 - b. Mendorong verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar dapat dilaksanakan secara sinkron dan terpadu

- dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait sehingga dapat diandalkan menjadi satu data untuk seluruh program sosial.
- c. Pengembangan program-program di Kementerian Sosial RI harus berbasis kajian ilmiah sehingga efektivitas program dapat diukur dan diukur dan dipertanggung jawabkan kepada publik.
 - d. Meningkatkan kolaborasi antar Dirjen agar keluarga penerima manfaat atau KPM tidak hanya menerima manfaat melainkan juga mendapatkan pemberdayaan secara ekonomi dan sosial.

Apakah ada yang ingin disesuaikan disempurnakan ditambahkan atau diperbaiki? Pak Hari *mangga*.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS (Dr. Ir. Hari Hikmat, M.Si.):

Izin Pimpinan yang nomor D ditambahkan tidak hanya menerima manfaat bantuan sosial melainkan juga mendapatkan pemberdayaan secara ekonomi dan sosial.

KETUA RAPAT :

Ada lagi? Teman-teman tidak ada cukup ini menjelang magrib sudah *lowbat* ini untungnya *lowbat* ini Pak. Sudah ya? Ini kan umum saja sebetulnya tapi poin besarnya itu bagaimana apapun bermanfaat untuk masyarakat kita ingin terserap benar di luar yang sudah di desain atau dalam kerja kerja-kerja Kementerian Sosial berupa efisiensi. Nah ini sebetulnya kabar bagus juga kalau Kementerian ini bisa menjalankan efisiensi tapi di satu sisi bantuan-bantuan yang untuk masyarakat kita ingin terserap habis itu karena ya memang di momentum ini masyarakat sangat membutuhkan .

Terima kasih atas kehadiran semuanya yang mengikuti rapat pada hari ini rapat saya tutup.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin.*

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.34 WIB

**Jakarta, 4 Oktober 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**